

**IMPLEMENTASI NILAI TOLERANSI BERAGAMA PADA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI BENGKULU**



**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Megister Pendidikan (M.Pd)

**Oleh:**

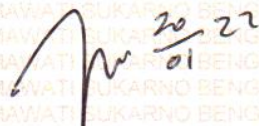
**NURMA HUTARI**  
**NIM. 1911540074**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2022**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
HASIL PERBAIKAN TESIS**

Pembimbing I,

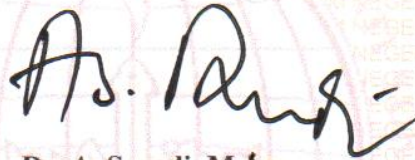
Pembimbing II,



**Dr. Adisel, M.Pd**  
NIP. 197612292003121004

**Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I**  
NIP. 198107202007101003

Mengetahui  
Ketua Prodi PAI



**Dr. A. Suradi, M.Ag**  
NIP. 197601192007011018

Nama : Nurma Hutari  
NIM : 1911540074



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 53848. Fax. (0736) 53848

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI NILAI TOLERANSI BERAGAMA PADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI BENGKULU**

Penulis

**NURMA HUTARI**  
NIM. 1911540074

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022.

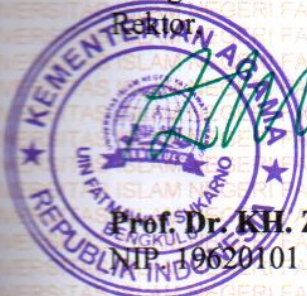
No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I (Ketua)	10-01-2022	
2	Dr. Pasmah Candra, M.Pd.I (Sekretaris)	11-01-2022	
3	Dr. Ahmad Suradi, M.Ag (Penguji Anggota)	11-01-2022	
4	Dr. Mindani, M.Ag (Penguji Anggota)	11-01-2022	

Mengetahui

Rektor

Bengkulu, Januari 2022

Direktur,



**Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd**  
NIP. 19620101 199403 1 005

**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag**  
NIP. 19640521 199103 1 001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurma Hutari  
NIM : 1911540074  
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Judul Tesis : Implementasi Toleransi Beragama Pada Pegawai Di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister (M.Pd) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, September 2021



**Nurma Hutari**  
**NIM. 1911540074**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Khairuddin, M.Ag  
NIP. : 196711141993031002  
Jabatan : Ketua Tim Verifikasi

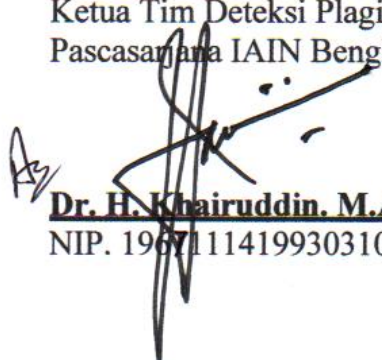
Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui turnitin tesis mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurma Hutari  
NIM : 1911540074  
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Judul Tesis : “Implementasi Toleransi Beragama pada Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bengkulu”

Yang bersangkutan dapat diterima dengan hasil 20 % Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 19 Oktober 2021  
Ketua Tim Deteksi Plagiasi  
Pascasarjana IAIN Bengkulu,

  
**Dr. H. Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 196711141993031002

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Harapan yang berakarkan pada keyakinan dan kerja keras lahir dari perpaduan jiwa yang teguh. Walaupun didera oleh cobaan perjuangan yang panjang dengan penuh kesabaran namun cita cita tak kenal usai. Saya memiliki secercah harapan, tetapi saya ingin membuat sejuta harapan menjadi kenyataan.

Ku persembahkan karya tulis ini untuk:

- ❖ Kepada kedua orang tuaku Ayahanda Alm. Lilis Iswanda dan Ibunda Nilesni. A tercinta dan sangat ku sayangi yang tak tergantikan selalu memberikan kasih sayang, dorongan motivasi dan semangat kepadaku serta selalu mendoakan ku demi keberhasilanku dimasa depan.
- ❖ Ayuk-ayukku tersayang Nurmaeini dan Nurmi yang selalu memberikanku semangat.
- ❖ Kedua Pembimbingku Bapak Dr. Adisel, M.Pd selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I selaku pembimbing pendamping yang telah membantuku dan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing menyelesaikan tesis ini dengan baik. Terima kasih Pembimbingku.
- ❖ Untuk sahabat perjuangan ku dan semua pihak yang menjadi teman baik yang selalu memberikan dukungan motivasi..
- ❖ Terutama untuk kepala bappeda dan pegawai maupun honorer Bappeda Provinsi Bengkulu yang juga sudah memberikan semangat dalam penyelesaian tesisku ini.
- ❖ Alamamter ku UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## **MOTO**

***“Jika kamu tak menghargai dirimu sendiri, orang lain tak akan pernah menghargaimu. Jangan sampai kehilangan dirimu yang berharga”***

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI NILAI TOLERANSI BERAGAMA PADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI BENGKULU

Penulis :

Nurma Hutari

NIM. 1911540074

Pembimbing :

1. Dr. Adisel, M.Pd
2. Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd. I

Rumusan masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu?, (2) Apakah kategorisasi implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu bersifat aktif atau pasif?, (3) Apakah implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu bersifat toleransi aktif atau pasif?, (4) Apa saja faktor pendukung implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran (*mix metode*) yang menggabungkan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi serta angket. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan uji regresi sederhana yakni *uji t one sample*. Hasil penelitian ini adalah (1) Implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan belum pernah ditemukan perilaku pelanggaran toleransi. Selain itu, implementasi dapat dilihat dari 3 indikator, namun tanpa ada proses atau tahap perencanaan dan evaluasi; (2) Kategorisasi nilai toleransi beragama pada karyawan Bappeda Provinsi Bengkulu tergolong aktif dengan nilai perbandingan persentase aktif dan pasif adalah 83% : 17%; (3) Perhitungan uji hipotesis ditemukan bahwa data  $H_0$  diterima yang menandakan bahwa implementasi nilai toleransi beragama pada karyawan Bappeda Provinsi Bengkulu tergolong aktif dengan  $t_{hitung} < t_{table}$  dengan nilai  $-2,64 < 2,07$ ; (4) Faktor pendukung implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu adalah sikap menghormati dan menghargai yang telah terinternalisasikan dalam diri setiap individu.

Kata Kunci: Bappeda, Implementasi, Nilai Toleransi



**IMPLEMENTATION OF THE VALUE OF RELIGIOUS TOLERANCE  
FOR EMPLOYEES IN THE ENVIRONMENT OF THE REGIONAL  
RESEARCH AND DEVELOPMENT PLANNING AGENCY (BAPPEDA)  
BENGKULU PROVINCE**

Nurma Hutari  
NIM. 1911540074

Adviser  
Dr. Adisel, M.Pd and Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I

**ABSTRACT**

The formulation of the research problem is: (1) How is the implementation of the value of religious tolerance for employees in the Bappeda of Bengkulu Province?, (2) Is the categorization of the implementation of the value of religious tolerance on employees in the Bappeda of Bengkulu Province is active or passive?, (3) Is the implementation of The value of religious tolerance for employees within the Bappeda of Bengkulu Province is active or passive tolerance?, (4) What are the supporting factors for the implementation of the value of religious tolerance for employees within the Bappeda of Bengkulu Province?. This study uses a mixed type of research (mix method) which combines the types of qualitative and quantitative research in the data collection process. Data collection techniques that researchers use are interviews, observation, documentation and questionnaires. Qualitative data were analyzed using data reduction, data presentation and data verification, while quantitative data were analyzed using a simple regression test, namely the one sample t test. The results of this study are (1) The implementation of the value of religious tolerance on employees in the Bappeda of Bengkulu Province has been going well and there has never been a violation of tolerance behavior. In addition, implementation can be seen from 3 indicators, but without any planning and evaluation process or stage; (2) The categorization of the value of religious tolerance on Bappeda employees of Bengkulu Province is classified as active with the ratio of active and passive percentage values being 83%: 17%; (3) Calculation of the hypothesis test found that  $H_0$  data was accepted which indicated that the implementation of the value of religious tolerance for Bappeda Bengkulu Province employees was classified as active with  $t_{count} < t_{table}$  with a value of  $-2.64 < 2.07$ ; (4) Factors supporting the implementation of the value of religious tolerance for employees within the Bappeda of Bengkulu Province are the attitude of respect and appreciation that has been internalized in each individual.

Keywords: Bappeda , Implementation, Tolerance Value.

## ملخص

تنفيذ قيمة التسامح الديني للموظفين في بيئة وكالة التخطيط للبحث والتطوير الإقليمية

(بابيدا) محافظة بنغكولو

كاتب:

نورما هوتاري

التمرة التسجيل : ١٩١١٥٤٠٠٧٤

المشرف:

١. دكتور أدي سيل ، الماجستير ٢. دكتور قلبي خير، الماجستير صياغة  
بابيدا في للموظفين الديني التسامح قيمة تنفيذي تم كيف (1): هي البحث مشكلة  
في الموظف علمي الديني التسامح قيمة تنفيذي تصنف هل (2)؟، بنجكولو بمقاطعة  
الديني التسامح قيمة تنفيذي هل (3)؟، سلبية أم نشط بنجكولو مقاطعة من بابيدا  
العوامل هي ما (4)؟، سلبية أم نشط تسامح هو بنجكولو بمقاطعة بابيدا داخل للموظفين  
؟. بنجكولو بمقاطعة بابيدا داخل للموظفين الديني التسامح قيمة لتنفيذ المدعومة  
عن مباشرة الباحثون فيه ي بحث الذي الوصف في النوعي البحث الدراسة هذه تستخدم  
يستخدمها التي البيانات جمع تقنيات المجال في مباشرة المعلومات أو البيانات  
بما تستخدم البيانات تحليلي تم ثم والتوثيق والملاحظة المقابلات هي الباحثون  
التسامح قيمة تنفيذي كان (1). البيانات من قوال تحقق البيانات وعرض البيانات تقملي  
أبدًا هناك يمكن ولام يرام ما علمي يسير بنجكولو مقاطعة في بابيدا داخل للموظفين الديني  
ولكن، مؤشرات 3 خلال من التنفيذ رؤية يمكن، ذلك إلى بالإضافة التسامح لسلوك انتهاك  
موظف علمي الديني التسامح قيمة تصنف (2)؛ وتقييم تخطيط مرحلة أو عملية أي بدون  
النشطة المدعومة النسبة قيم نسبة مع نشط أنه علمي مصنف بنجكولو مقاطعة في بابيدا  
تشير التي بيانات قبول أنه الفرضية اختبار حساب وجد (3)؛ 83%: 17% والسلبية  
مع نشطة أنها علمي تصنف فيها تم مقاطعة لموظف في الديني التسامح قيمة تنفيذي أن إلى  
الديني التسامح قيمة تنفيذي تدعم التي العوامل (4)؛  $2.07 < -2.64$  بقيمة جدول  
تم الذي والتقدير الاحترام موقف هي بنجكولو مقاطعة في بابيدا داخل للموظفين  
فرد كل في استيعابها

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، قيمة التسامح، بابيدا

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun artikel ini dengan judul “Implementasi Nilai Toleransi Beragama Bagi Pegawai Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Bappeda”. dan keluarganya

Dengan ketekunan, kemauan dan bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan sebaik-baiknya, dan penulis dapat mengatasi masalah, kesulitan, hambatan-hambatan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari adanya kritik, saran dan dukungan doa dari berbagai pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih khususnya penulis ucapkan kepada :

1. Dr. H. Zulkarnain, S.M. Ag selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag selaku Direktur Program Pasacsarjana IAIN Bengkulu
3. Dr. A. Suradi, M. Ag selaku Ketua Program Studi PAI Program Pascasarjana IAIN Bengkulu
4. Dr. Adisel, M. Pd selaku pembimbing utama yang telah memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan tesis ini
5. Dr. Qolbi Khoiri, M. Pd. I selaku pembimbing pendamping yang telah berkontribusi memberikan saran, kritik dan masukan terhadap perbaikan tesis ini
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua yang telah membantu penulis di terima Allah swt. Dan dicatat sebagai amal baik serta diberika balasan yang berlipat ganda.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>TAJRID</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Landasan Teori	
1. Konsep Kebijakan dan Implementasi pada Lembaga Pemerintah .....	10
2. Toleransi Beragama dalam perspektif pendidikan Islam .....	12
3. Konsep Toleransi Beragama pada Negara Pancasila .....	16
4. Instrumen Pendukung Toleransi beragama di Indonesia.....	37
B. Penelitian Relevan .....	55

C. Kerangka Pikir .....	58
D. Hipotesis .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	61
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	61
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	61
D. Setting Penelitian.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik keabsahan Data .....	67
G. Teknik Analisis Data .....	72
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	80
B. Pembahasan .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	120
B. Implikasi .....	120
C. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Gender Pegawai Bappeda di Provinsi Bengkulu.....	75
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan di Bappeda .....	76
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Agama. ....	77

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Daftar Lampiran 1 SK Pembimbing

Daftar Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Daftar Lampiran 3 Kisi-kisi Pedoman Wawancara

Daftar Lampiran 4 Pedoman Observasi

Daftar Lampiran 5 Pedoman Dokumentasi

Daftar Lampiran 6 Struktur Organisasi

Daftar Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Daftar Lampiran 8 Foto Wawancara

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	59
-----------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latarbelakang

Keberagaman muncul atas dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari berbagai suku, ras, kepercayaan dan bahasa, keragaman merupakan bagian integral dari kehidupan berbangsa. Hal ini tertuang dalam ideologi Pancasila. Keberagaman tersebut tentunya akan memberikan warna kehidupan sendiri bagi bangsa Indonesia, sehingga Kebhinekaan tersebut menjadi bingkai kehasan, kekayaan dan kekuatan bangsa jika dikelola dengan baik oleh setiap individu. Disisi lain, keberagaman tidak dapat terhindar dari gesekan-gesekan baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu, perlunya penanaman prinsip saling menghargai bagi setiap bagi setiap warga negara Indonesia. Keberadaan keragaman juga dijelaskan pada Q.S Al-Hujarat ayat 13 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.<sup>1</sup>

Ayat diatas mejelaska bahwa keberagaman merupakan suatu jalan yang diciptakan oleh Allah swt agar setiap manusia saling mengenali dan menghormati perbedaan satu dengan yang lainnya dimuka bumi ini. Ayat tersebut juga secara

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2007), hlm 516.

jelas menggambarkan bahwa keberagaman merupakan takdir yang telah digariskan dan merupakan upaya yang harus dikendalikan oleh seluruh umat dalam menciptakan kehidupan yang rukun. Artinya keberagaman harus diolah sedemikian rupa agar menjadi buah keutuhan berkehidupan yang kuat agar gesekan yang memicu perpecahan tidak sedikitpun diberikan ruang untuk merusak keutuhan NKRI. Contohnya, keberagaman menjadikan ciri khas keberadaan Indonesia dimata dunia yang dapat kita banggakan sebagai warganya.

Bagian kecil dari keberagaman di Indonesia adalah keberagaman keyakinan atau agama. Keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yakni, Islam, Kristen katolik, Kristen protestan, Hindu, dan Budha. Keberagaman kepercayaan tersebut setiap individu dapat bebas memilih dan menentukan kepercayaan atau keyakinan yang ingin dianut oleh mereka. Agama islam tentunya mengajarkan hal-hal yang menyangkut kewajiban umatnya dalam menyikapi keberagaman keyakinan atau kepercayaan yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yaitu :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ...

Artinya : "...untukmu agamamu, dan untukku agamaku." <sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam meyakinkan setiap umatnya tanpa terkecuali untuk tidak saling menggunjing, membandingkan, menyamakan serta mengusik keberadaan agama lain termasuk umat Islam yang berada di Indonesia. Menurut pendapat Rihuh, bahwa Bangsa Indonesia dengan tingkat keberagaman dan jumlah penduduk yang tinggi sangat memungkinkan munculnya

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran...*, hlm 516.

sikap pro dan kontra bagi masyarakat luas.<sup>3</sup> Pro dan kontra tersebut kaitannya dengan sikap masyarakat dalam menilai keberagaman yang ada disekitar mereka. Seperti halnya kemungkinan adanya potensi perpecahan dan kesalah pahaman. Konflik yang muncul akibat penolakan masyarakat atau sikap kontra terhadap kondisi keberagaman di Indonesia ini dapat terjadi dalam skala kecil maupun konflik dalam skala yang besar. Dilanjutkan oleh Rihuh, bahwa :

Skala kecilnya, Konflik tercermin dalam komunikasi yang buruk atau ketidakmampuan untuk bekerja dengan baik, yaitu kurangnya kesadaran individu akan nilai toleransi. Hal tersebut pada akhirnya akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, Misalnya merasa tersinggung, marah, frustrasi, kecewa, galau, bingung, bingung, dll. Pada saat yang sama, konflik-konflik berskala besar telah terjadi, antara lain keresahan sosial, kekacauan multikultural, konflik antar ras, suku, dan agama.<sup>4</sup>

Konflik akibat keberagaman dapat saja terjadi dimana saja, baik lingkungan sosial masyarakat maupun interaksi sosial pada suatu lembaga. Untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antar umat beragama, setiap umat beragama perlu disadarkan akan tingginya toleransi antar umat beragama. Yaitu melalui saling menghormati antar umat beragama dan sebagainya. Agar tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan antar pemeluk agama yang berbeda agama.

Atas dasar toleransi, kerukunan antar umat beragama bisa terjadi di dalamnya. Dengan toleransi sebagai landasan untuk berinteraksi maka memungkinkan terjadinya kerukunan antar umat beragama di dalamnya. Tingginya sikap toleransi yang harus ditanamkan oleh masyarakat Indonesia

---

<sup>3</sup>Rihuh Baranda Sutu, *Peta Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 1

<sup>4</sup>Rihuh Baranda Sutu. *Peta Kerukunan Umat...*, hlm. 2

dalam menjalani aktifitas sehari-hari turut menjadi faktor penentu berjalannya setiap kegiatan. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa toleransi adalah sikap wajib tertanam bagi seluruh warga negara Indonesia sejak mereka dilahirkan.

Kesadaran individu dengan meningkatkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap adanya keberagaman keyakinan akan melahirkan kehidupan yang rukun, tentram dan harmonis dilingkungan masyarakat. Keharmonisan dan saling menjaga keberlangsungan sejarah wahyu Tuhan atas kepercayaan masing-masing, yang dimulai sejak awal kehidupan hingga dizaman nabi Muhammad SAW<sup>5</sup>. Al-Quran pada surah al-maidah ayat 48 yaitu :

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ

Artinya: *Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al-Maidah : 48).*<sup>6</sup>

Surat di atas menjelaskan bahwa keberagaman yang Allah SWT ciptakan harus dijadikan sebagai peluang bagi setiap umat untuk berlomba-lomba dalam kebajikan dan bukan untuk saling berselisih pandangan. Surat diatas juga menerangkan bahwa telah diturunkannya aturan dan jalan sebagai petunjuk bagi

---

<sup>5</sup>Humaid Abdussamidan Tahir Masnun, *Islam dan Hubungan Antar Agama (Wawasan untuk Para Da'i)*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), h.18

<sup>6</sup>Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Quran...*, hlm 516.

manusia untuk dapat hidup rukun diantara perbedaan tersebut. Artinya sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk dapat menjadikan keberagaman termasuk keberagaman beragama sebagai upaya berbuat kebajikan terhadap sesamanya. Sehingga manusialah yang harus menciptakan kerukunan dengan tidak mempermasalahkan keberagaman tersebut. Tentunya khusus bagi umat Islam diharamkan bagi mereka untuk menjadikan keberagaman keyakinan ini sebagai sebuah pemicu timbulnya konflik sosial.

Implementasi menghadapi keberagaman dapat dilakukan setiap manusia dengan meningkatkan sikap saling menghargai atau yang disebut dengan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi merupakan suatu upaya untuk menghormati dan menghargai hal-hal dasar dan krusial baik itu Keyakinan dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain. Dalam literatur agama Islam, toleransi disebut tasamuh, yang dianggap sebagai sifat atau sikap saling menghormati, menghargai atau membolehkan keyakinan (pandangan) seseorang atau orang lain yang bertentangan dengan pandangan kita<sup>7</sup>. Artinya bagi setiap umat Islam, perbedaan pandangan atau keyakinan merupakan suatu hal yang harus dihormati. Adanya ajaran yang menuntut umat Islam untuk menjunjung tinggi nilai toleransi dalam berkehidupan, baik dari segi keyakinan, budaya, ras, suku dan lainnya. Sehingga ruang terjadinya konflik sudah diminimalisir sedemikian rupa dalam ajaran Islam.

Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna, manusia dengan keterbatasannya atas kesempurnaan tersebut mempunyai masalah atau hal-hal

---

<sup>7</sup>Ngainun Naim. *Islam dan Pluralisme Agama: Dinamika Merebut Makna*, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), hlm.78

yang perlu dipikirkan interaksi sosial yang kompleks dan dinamis. Sebagai upaya menjaga keharmonisan dan kerukunan hubungan antara sesama yang belum tentu berjalan lancar. Untuk memelihara keharmonisan hubungan ini, Tuhan menghidayahkan agama yang memuat pedoman dasar dalam mengatur keselarasan hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, sangatlah pentingnya rasa untuk bersikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama manusia tersebut. Sebab itulah, sikap toleransi harus terus dibina dan diteladani dengan baik agar keharmonisan serta kerukunan dalam masyarakat dapat terwujud.

Penerapan nilai toleransi didalam interaksi sosial antar umat beragama pada dasarnya bermula dari penghayatan atas ajaran agama masing-masing yang dipercayai mereka. Hanya saja ada beberapa golongan dari manusia yang mengagungkan kepercayaannya dengan memburukkan kepercayaan orang lain. Fenomena atau kejadian yang ada dimasyarakat bahwa perseteruan antar umat beragama yang sejauh ini terjadi sering kali disebabkan oleh sikap manusia yang merasa paling benar (*truth claim*). Mereka seringkali berperilaku mengeliminasi kebenaran dari agama orang lain yang berbeda darinya. Untuk menghindarinya setiap pribadi harus mempercayai dan menerapkan kepribadian yang penuh toleransi diri. Guna memelihara dan menjaga utuhnya kerukunan beragama antar umat manusia, sikap toleransi dalam diri manusia harus dikembangkan dalam upaya untuk menghindari konflik. Pembudayaan sikap toleransi ini sangat diharapkan terjadi pada lembaga-lembaga pemerintahan yang mana memiliki keragaman termasuk didalamnya adalah keragaman beragama. Keberagaman

keyakinan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia ini juga terjadi dilingkungan lembaga pemerintahan khususnya ditempat peneliti merencanakan penelitian yakni lembaga Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu (Bappeda). Lembaga Bappeda ini juga memiliki para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta karyawan lainnya yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Keberagaman keyakinan dilembaga ini tentunya juga harus dikelola dengan baik, agar tidak memunculkan berbagai konflik baik terbuka maupun konflik tertutup.

Bappeda adalah salah satu lembaga yang dapat dijadikan contoh keberagaman kepercayaan dalam interaksi sosial. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa terdapat 115 pegawai atau ASN yang berkerja dilingkungan Bappeda, dari 115 ASN tersebut didominasi beragama Islam dengan jumlah 109 orang dan 6 orang menganut agama Kristen Protestan. Termasuk juga dalam hal ini potensi keberagaman keyakinan. Tidak menutup kemungkinan munculnya konflik akibat keberagaman ditengah interaksi sosial yang terjadi. Maka dari itu sangatlah penting penumbuhan sikap toleransi pada individu yang bekerja di lembaga tersebut. Adanya perbedaan agama akan memicu konflik dalam beberapa hal yang disebabkan oleh kedalaman dan keyakinan, kegiatan keagamaan yang berbeda, makanan yang berbeda dan banyak lainnya.

Namun, sebagai lembaga dibawah naungan pemerintahan, tentu harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Didalam masyarakat sosial, jika kita berpedoman atas dasar Pancasila, terutama pada sila pertama bahwa bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak.

Hal tersebut menandakan bahwa ketentuan kebebasan beragama adalah hak bagi setiap umat. Maka seharusnya, semua agama harus selalu saling menghargai dan menghormati setiap manusia. Maka dari itu semua umat beragama juga wajib saling menghargai. Maka dari itu, antar umat yang berlainan agama akan terbina kerukunan dan keharmonisan hidup. Sikap yang sangat perlu ditanamkan dalam pribadi manusia adalah sikap toleransi. Sikap toleransi harus diwujudkan dan diamalkan oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat supaya terbentuknya suatu masyarakat yang kompak dan rukun dalam keberagaman. Sehingga kaya akan ide-ide baru dalam memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat.

Oleh karena itu lembaga Bappeda dirasa perlu dalam menyusun turunan dari peraturan mengenai toleransi beragama. Melihat kondisi keharmonisan serta keadaan keberagaman agama dilingkungan Bappeda yang dirasa perlu dan pentingnya implementasi nilai toleransi beragama dilingkungan lembaga, maka peneliti akan meneliti tentang “Implementasi Nilai Toleransi Beragama Pada Pegawai Dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian tentang latar belakang penelitian ini maka identifikasi masalah yakni sebagai berikut :

1. Bangsa Indonesia yang dikaruniai keberagaman yang termasuk didalamnya keberagaman keyakinan
2. Pluralitas khususnya pluralitas beragama adalah sebuah takdir bagi warga negara Indonesia, sehingga wajib bagi mereka untuk memahami satu sama lain dengan memperkuat sikap toleransi dalam interaksi sosial.



3. Individu yang awam terhadap kewajiban memahami satu sama lain dalam interaksi sosial dilingkungan masyarakat dan lembaga.
4. Individu tidak menjunjung tinggi nilai toleransi
5. Keberagaman keyakinan yang ada dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu

### **C. Batasan Masalah**

Peneliti menyusun batasan masalah dalam penelitian ini dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini terfokus pada apa yang ingin dideskripsikan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan bentuk implementasi nilai toleransi beragama pada lingkungan pada pegawai di lingkungan Bappeda provinsi.
2. Mengukur jenis toleransi beragama yang berjalan di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu termasuk jenis toleransi aktif atau toleransi pasif

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu?
2. Apa saja kategorisasi implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu?
3. Apakah implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu bersifat toleransi aktif atau pasif?
4. Apa saja faktor pendukung implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu?

## **E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang disusun dalam penelitian ini merujuk pada rumusan masalah yang ada, yakni :

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu.
- b. Mengukur kategorisasi implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu.
- c. Menentukan kategorisasi implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu bersifat toleransi aktif atau pasif
- d. Mendeskripsikan faktor pendukung implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu

### **e. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan kegunaan sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis
  - 1) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan Pendidikan Agama Islam.
  - 2) Untuk mengetahui implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu.
- b. Kegunaan secara praktis
  - 1) Bagi peneliti menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian tentang masalah yang terjadi.

- 2) Bagi kampus, untuk menambah bahan bacaan dan referensi di perpustakaan IAIN Bengkulu.
- 3) Bagi pihak lain, sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam. Selain itu untuk memberi pengetahuan dan bahan acuan bagi praktisi pendidikan yang dalam prosesnya mengedepankan nilai toleransi pada pegawai.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, Yang berisi penjelasan secara garis besar, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang implementasi, toleransi beragama, hasil penelitian-penelitian yang relevan dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi deskripsi hasil data penelitian dan pembahasan dengan membandingkan teori

Bab V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Implementasi Kebijakan pada Lembaga Pemerintah

##### 1. Hakikat Implementasi Kebijakan

Haedar menarangkan jika yang diartikan Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, pelaksana suatu kebijakan melakukan suatu kegiatan atau kegiatan, dan pada akhirnya memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri<sup>8</sup>. Perihal yang sama pula dipaparkan oleh Rendal jika implementasi diduga selaku bentuk utama serta sesi yang sangat memastikan dalam proses kebijakan<sup>9</sup>. Pemikiran lainnya dari Edwards III kalau implementasi kebijakan ialah kegiatan yang nampak sesudah dikeluarkan pengarahan yang legal dari sesuatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input buat menciptakan output maupun outcomes untuk warga.<sup>10</sup>

Ketiga pendapat ahli diatas, dikuatkan kembali oleh pendapat Purwanto dan Sulistyastuti, yang menambahkan bahwa implementasi sebenarnya mengacu pada kegiatan untuk mendistribusikan berupa keluaran kebijakan atau kebijakan turunan (*to deliver policy output*) yang dikembangkan oleh para implementor atau pimpinan kepada kelompok

---

<sup>8</sup> Haedar Akib Antonius Tarigan, "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2018, Universitas Pepabari (Makassar, 2018), h. 117.

<sup>9</sup> Rendal Ripley B dan A. Franklin Grace, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 2016, h.15

<sup>10</sup> George Edward III, *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London- England. Goggin, Malcolm L *et al.* 2010), h. 1

sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>11</sup> Daniel

A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan bahwa :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, umumnya dalam wujud undang- undang, tetapi bisa pula berupa perintah- perintah ataupun keputusan- keputusan eksekutif yang berarti ataupun keputusan tubuh peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi permasalahan yang mau diatasi, mengatakan secara tegas tujuan ataupun target yang mau dicapai, serta bermacam metode buat menstrukturkan ataupun mengendalikan proses implementasinya”<sup>12</sup>

Implementasi dari suatu kebijakan merupakan proses yang seharusnya melibatkan berbagai unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaannya. Tentunya hal ini akan menemui beberapa kendala ataupun kesulitan terkait jalannya sebuah kebijakan tersebut. Kesulitan dalam jalannya implementasi sebuah kebijakan itu dapat dilihat dari sebuah pernyataan tentang studi kebijakan yaitu Eugne Bardach yang menggambarkan tentang kerumitan proses implementasi tersebut dalam sebuah pernyataan bahwa yakni :

Proses yang terlibat cukup untuk membuat rencana dan kebijakan universal menjadi indah di atas kertas, tetapi juga lebih sulit untuk mengungkapkannya dalam kata-kata atau slogan yang terdengar akrab bagi para pemimpin dan pemilih yang mendengarnya. Bahkan lebih sulit untuk melakukan ini dengan cara dan cara untuk menyenangkan semua orang, termasuk mereka yang dianggap pelanggan.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah rangkaian-rangkaian dari sebetuk tindakan memungkinkan dilakukan oleh beberapa orang pelaksana kebijakan atau pimpinan terhadap jajarannya. Sarana yang menjadi pendukung terhadap

---

<sup>11</sup> Purwanto dan Sulistyastuti , *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 21

<sup>12</sup>Daniel Mazmanian and A. Sabatier Paul, *Implementation and Public Policy*, (Scott Foresman and Company USA:2013), h.139

berupa sasaran, target perubahan serta strategi penerapannya yang disusun sedemikian rupa guna tercapainya tujuan utama dari keberadaan kebijakan tersebut.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi dari Kebijakan

Seorang ahli bernama George C. Edwards III berpendapat secara teoritis bahwa “Hal-hal krusial dalam penentu kebijakan implementasi mereka adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi”.<sup>14</sup> Pendapat lain juga terkait dengan keberhasilan dari implementasi kebijakan menurut seorang ahli bernama Merile S. Grindle, bahwa terdapat dua variable yang saling mempengaruhi dalam implementasi kebijakan, yakni variable isi kebijakan (*content of policy*) dan variable lingkungan implementasi (*context of implementation*). Merile S. G juga mengungkapkan bahwa:

Variabel yang utama yakni isi dari kebijakan, dimana hal tersebut terdiri dari : 1) kepentingan kelompok; 2) manfaat yang diterima; 3) perubahan yang diharapkan; 4) ketepatan letak program. Selanjutnya, Variabel lingkup dari kebijakan yakni : 1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi; 2) karakteristik institusi dan rejim berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan daya tanggap target.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, sebagai upaya dalam mencapai keberhasilan dari implementasi suatu peraturan, langkah berupa mengatasi sedini mungkin kemungkinan kemunculan tantangan-tantangan yang telah diprediksi harus dituntaskan berdasarkan serta terdeteksi diawal uji coba implementasi. Di sisi lain, untuk menjadi sukses, ada banyak variabel yang mempengaruhi

---

<sup>14</sup> Agostiono, “Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn” artikel diakses pada 5 April 2021 dari <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, h. 154.

<sup>15</sup> Grindle Merile S, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), h. 21

implementasi kebijakan, baik itu individu, kelompok, atau organisasi. Implementasi kebijakan akan melibatkan upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrasi sebagai pelaksana. Bersedia untuk dapat memberikan pelayanan di masa yang akan datang dan mengatur tujuan atau perilaku objektif. Dalam beberapa sistem politik, kebijakan publik dilaksanakan oleh lembaga pemerintah.

Cakupan dari sebuah pelaksanaan kebijakan tidak semata-mata terlihat dari jumlah unit kerja yang terlibat. Melainkan bisa jadi disebabkan oleh tahapan dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang pada kenyataannya berpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai variable yang ternyata sangatlah kompleks. Sangat memungkinkan bahwa variabel individualnya ataupun variabel organisasinya yang berpengaruh. Masing- masing variable ini saling berinteraksi satu sama lain.

V. Meter dan V. Horn mendeskripsikan pendapat mengenai hal ini yakni tentang tugas dari suatu implementasi ialah berupaya menumbuhkan jaringan-jaringan yang dimungkinkan mampu mencapai sasaran akhir dari suatu kebijakan public. Dimana hal tersebut dapat direalisasikan melalui aktivitas-aktivitas sebuah instansi pemerintah. Hal ini tentunya akan turut yang melibatkan beberapa pihak yang terkait yang juga memiliki kepentingan dalam hal yang sama.<sup>16</sup> Terdapat sebuah penemuan mengenai implementasi kebijakan, dimana terdapat tiga penerus yang membahas mengenai

---

<sup>16</sup> Erwin, Agus, P, dkk, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media 2012), h.75

implementasi kebijakan tersebut, hal tersebut diungkapkan dalam pendapat dibawah ini :

“Fokus pertama diwakili dari studi Pressman dan Wildavsky, dalam hal ini memfokuskan “bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan”. Penerus kedua mendalami tentang “determinan keberhasilan implementasi kebijakan”. Dan Penerus ketiga membahas tentang “model konseptual model proses implementasi”. Dari ketiga penerus ini menyimpulkan terdapat dua pendekatan. Pendekatan tersebut sangat mendominasi yakni “pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-down*”.<sup>17</sup>

Berdasarkan teori tersebut, pengembangan kebijakan itu sendiri merupakan akar dimana tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Dalam hal inilah awal dari proses implementasi bermula. Dimana, proses implementasi akan berbeda-beda, bergantung pada sifat dan sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut. Keputusan-keputusan yang berbeda ini nantinya akan menunjukkan karakteristik, struktur dan hubungan antara yang erat antar faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Sehingga nantinya proses dari implementasi ini akan mengalami perbedaan.

Karakteristik kebijakan menurut ahli, yakni dalam Winarno, dimana beliau mendeskripsikan bahwa terdapat karakteristik kebijakan yang dianggap berbeda yaitu sisi jumlah perubahan akibat kebijakan dan rentang konsensusnya mempengaruhi tujuan. Tujuan ini akan dilihat pengaruhnya terhadap pemerintah serta proses tersebut, sejauh mana juga implementasi

---

<sup>17</sup> Paul Sabatier, “*Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research*” *Journal of Public Policy* 6, 2016, h.. 21-48.



tersebut telah berlangsung. Perubahan unsur tersebut merupakan karakteristik yang sangat krusial atau penting dalam dua hal yakni<sup>18</sup>:

- a. Implementasi akan dipengaruhi oleh seberapa jauh kebijakan tersebut menyimpang dari asal kebijakan sebelumnya. Dalam pengertian ini, perubahan inkremental lebih cenderung menyebabkan reaksi positif daripada perubahan drastis (rasional). Seperti disebutkan di atas, perubahan inkremental berdasarkan pengambilan keputusan inkremental bersifat korektif dan dirancang lebih kuat untuk mengkompensasi kekurangan sosial spesifik saat ini. Mempromosikan tujuan sosial masa depan. Hal ini sangat tidak sesuai dengan penggunaan perubahan berdasarkan keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan penting dan mendasar. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya konflik dan ketidaksepakatan antar pengambil keputusan akan sangat tinggi.
- b. Proses implementasi baru akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diharapkan. Jika forum implementasi tidak perlu dipromosikan dengan cepat, implementasi yang efektif akan sangat mungkin dilakukan. Kegagalan perencanaan sosial disebabkan oleh meningkatnya tuntutan terhadap struktur dan mekanisme administrasi yang ada.

Berdasarkan teor-teori diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana perubahan kebijakan yang lama kekebjakan baru dharapkan atau yang sering dikenal dengan istilah *outcome*. Kualitas *outcome* ini dipengaruhi juga oleh konseksus yang terlibat dan arah implementasi yang berlangsung. Selain itu, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa keefektifan proses implementasi kebijakan dipengaruhi juga oleh tujuan atau sasaran perubahan. Artinya komplestifitas kebijakan terhadap unsur-unsur yang terlibat sebagai *outcame* akan mempengaruhi keberhasilan atau efektifitas implementasi kebijakan tersebut pada suatu lembaga.

---

<sup>18</sup> Grindle Merile S, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), h. 21

## **B. Toleransi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Islam**

### **a. Pengertian Toleransi**

Toleransi ialah standarisasi dalam penambahan ataupun pengurangan yang masih dalam batas kewajaran. Toleransi dapat juga didefinisikan sebagai sifat ataupun afeksi yang menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) melakukan suatu tindakan. Pengertian lain juga mengartikan bahwa toleransi yakni sebuah koeksistensinya dalam Mempertahankan kelompok atau keyakinan yang berbeda dalam jangka waktu tertentu, mempertahankan perbedaan dan karakteristik individu dari masing-masing kelompok.<sup>19</sup>

Toleransi dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang saling bahu-membahu, meskipun suatu aktivitas atau perbuatan yang kurang disenangi; atau memberikan tempat atau ruang kepada orang lain walaupun antar kedua belah pihak itu tidak sependapat. Dalam bahasa Arab, toleransi biasa disebut “*ikhtimal*”, “*tasamuh*” yang artinya membiarkan sesuatu atau kondisi untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan untuk menyelesaikan suatu urusan.

Dasar-dasar al-Sunnah (Hadis Nabi) dikemukakan untuk menegaskan bahwa :

Toleransi Islam sangat luas dan mencakup segalanya. Baik secara fisik maupun mental. Karena itu, jika tidak dari hati dan hati, toleransi tidak akan terjalin. Artinya toleransi tidak hanya menuntut kesediaan menerima perbedaan, tetapi juga pengorbanan material dan spiritual, baik lahir maupun batin. Di sinilah konsep

---

<sup>19</sup> Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), hlm.104

toleransi Islam (assamahah) menjadi dasar bagi umat Islam untuk menjadikan mu'amalah (hablum minan nas) yaitu yang ditopang oleh kaitan spiritual kokoh (hablum minallāh).<sup>20</sup>

Kesalahan memahami arti toleransi dapat mengakibatkan *talbisul haq bil bathil* (mencampuradukan antara hak dan bathil) yakni suatu sikap yang sangat dilarang dilakukan oleh seorang muslim, seperti halnya mengurus agama atau keyakinan orang lain.

Toleransi dapat disimpulkan sebagai suatu sikap yang menghargai dan menghormati setiap orang yang berbeda-beda baik secara kepercayaan, tata cara dalam beribadah dan memahami agama lain atau bisa jadi dari etnis, ras, bahasa, budaya, politik, pendirian, kepercayaan ataupun tingkah laku. Hakikat manusia dalam kehidupan ini, tidak dapat terlepas dari kepercayaan. Bahkan lebih-lebih dalam hal beragama. Agama merupakan suatu bentuk corak atau kekhasan dari kepercayaan (dalam arti sesuatu di akui dan diterima sebagai kebenaran) yang tertinggi didalam hati individu.

Kepercayaan atau keimanan ataupun agama ialah proses kejiwaan atau nuranisetiap individu. Yang mana dengan kepercayaan itu menangguhkan dan mengesampingkan segala sesuatu yang bersifat nonrasional terhadap pernyataan dasar mengenai dalam menjalankan kehidupan. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan sebuah gejala yang berada di dalam alam fikiran setiap orang.

---

<sup>20</sup> Ajat Sudrajatx, *Din Al Islam*, (Yogyakarta: UNY Press, 2018) h. 13

Jikalau kepercayaan ini diungkapkan secara kelompokpun tidak akan pernah mampu menyamakan persepsinya terhadap individu lain meskipun sama keyakinan agamanya. Untuk memahami perihal ini, sebenarnya kita sudah harus berurusan dengan pikiran bawah sadar atau rohaniah seseorang sebagai individu. Seperti yang diungkapkan oleh Schleiermacher, seorang teolog Jerman, bahwa baginya agama murni adalah perasaan murni yaitu rasa bersandar secara mutlak kepada Tuhan. Unsur emosi dalam beragama sangat menonjol. Emosi dapat menjadi bahaya dan menyesatkan orang, kecuali jika dipimpin oleh akal logis dan rasional.<sup>21</sup>

Dalam bahasa Arab, "tasamuh" berarti saling izin dan saling promosi. Jadi toleransi termasuk konsesi. Artinya, penghargaan adalah pemberian yang semata-mata didasarkan pada kemurahan hati dan kebaikan, bukan pemberian yang didasarkan pada hak. Jelas, toleransi diberikan dan diterapkan karena ada perbedaan prinsip, menghormati perbedaan atau prinsip orang lain itu tanpa mengorbankan prinsip mereka sendiri.

Ketika agama menjadi respon terhadap seluruh wujud manusia, maka ia tidak dapat dipisahkan menjadi bagian tersendiri dari kehidupan manusia, karena di dalamnya terkandung berbagai doktrin dan tujuan segala sesuatu yang ada untuk kebahagiaan manusia. Sebaliknya, agama

---

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 117

harus dirasakan dan dipikirkan, dan harus didefinisikan sebagai pengejaran realitas primitif dengan hidup dan diwujudkan dalam tindakan keagamaan.<sup>22</sup>

Posisi toleransi beragama diartikan sebagai peleluasaan dalam memberikan kebebasan kepada sesama manusia atau warga masyarakat dalam menjalankan keyakinannya serta mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing. Sejauh ini, pengamatan peneliti selama melaksanakan penelitian di dalam menentukan sikapnya, manusia itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat azas terciptanya ketertiban, keamanan dan perdamaian didalam lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu.

(a) Manfaat toleransi

Manfaat-manfaat yang diperoleh dari sikap toleransi antara lain:<sup>23</sup>

a. Menghindari Terjadinya Perpecahan

Bersikap toleran adalah solusi agar tidak ada perpecahan dalam mengamalkan agama. Toleransi harus menjadi kesadaran pribadi yang selalu digunakan dalam bentuk interaksi sosial. Toleransi dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak dengan adanya berbagai agama surgawi dan agama ardlly dalam kehidupan manusia. Pesan universal ini merupakan pesan kepada seluruh

---

<sup>22</sup> Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011)

<sup>23</sup> Abdussami, Humaidy, dan Masnun Tahir, *Islam dan Hubungan Antar Agama (Wawasan untuk Para Da'i)*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), h.27

umat manusia, tanpa terkecuali intinya dalam menjalankan agama harus menjauhi perpecahan antar umat beragama dengan sesama umat beragama.

b. Memperkokoh Silaturahmi dan Menerima Perbedaan

Salah satu wujud toleransi beragama adalah dengan menjalin dan mempererat hubungan antar umat beragama serta menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.<sup>24</sup> Pada umumnya manusia tidak dapat menerima perbedaan satu sama lain, perbedaan dijadikan alasan untuk saling bertentangan. Perbedaan agama merupakan salah satu penyebab utama konflik antar manusia.

Jalinan hubungan damai antar pemeluk agama hanya bisa terwujud jika masing-masing pihak saling menghormati. Mengembangkan sikap toleransi beragama, agar setiap pemeluk agama dapat menjalankan ajaran dan ritual agamanya secara bebas dan tanpa tekanan. Oleh karena itu, toleransi beragama harus kita jadikan sebagai kekuatan untuk mempererat silaturahmi dan menerima perbedaan. Dengan ini, kedamaian, ketenangan dan kemakmuran akan terwujud.

---

<sup>24</sup> Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama: Dinamika Merebut Makna*. (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), h.214

## (b) Sikap Toleransi

### a. Pengertian Sikap Toleransi

Sikap adalah organisasi pendapat, keyakinan seseorang tentang objek atau situasi yang relatif stabil, disertai dengan perasaan tertentu, dan memberikan dasar bagi orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dengan cara tertentu yang dipilihnya.<sup>25</sup>

Sedangkan pengertian lain tentang sikap adalah suatu keadaan mental dan syaraf kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamis atau terarah pada respon individu terhadap semua objek dan situasi yang berhubungan dengannya.

Tolerance dalam bahasa Inggris adalah toleransi dan kata kerjanya ditoleransi. Sedangkan toleransi dalam bahasa Arab biasa disebut dengan ikhtimal, tasamuh yang artinya sikap membuka dada. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah kesiapan seseorang untuk bertindak menghargai, menghormati, mengizinkan pendapat atau keyakinan yang bertentangan dengan kita.

### b. Ciri-ciri Sikap Toleran

Ciri-ciri sikap toleran Menurut Hasyim ciri-ciri sikap toleran sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Offset, 2014), h. 120

<sup>26</sup> Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan dalam Islam: Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. (Surabaya: Media-K, 2019), h. 17

(1) Mengakui hak setiap orang

Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda dalam hidupnya. Mengakui hak setiap orang adalah sikap mental yang mengakui bahwa setiap manusia berhak menentukan perilaku dan nasibnya sendiri.

(2) Menghormati keyakinan orang lain

Tidak menghormati keyakinan orang lain atau memaksakan keyakinan seseorang dengan kekerasan atau dengan cara yang tidak halus akan mengakibatkan orang lain menjadi munafik atau munafik.

c. *Agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan)

d. Perbedaan tidak harus menimbulkan konflik karena perbedaan selalu ada di dunia ini.

e. Saling mengerti

Tidak akan ada rasa saling menghormati antar sesama jika tidak ada saling pengertian, saling membenci, saling mempengaruhi merupakan salah satu akibat dari tidak adanya saling pengertian dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.

f. Kesadaran dan kejujuran

Sikap toleransi menyangkut sikap dan kesadaran batin seseorang dan kesadaran mental yang menimbulkan kejujuran dan keluguan perilaku.



(c) Pentingnya Sikap Toleran dalam Kehidupan Plural

Di negara kita mayoritas beragama Islam, namun toleransi tetap menjadi agenda pertama dan sangat penting dalam kehidupan<sup>27</sup>. Pemerintah juga mencanangkan tri harmoni kehidupan beragama, yaitu kerukunan internal antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dari tri harmoni kehidupan beragama, pemerintah juga menuntut sikap toleran antar umat beragama, serta memberikan kebebasan memeluk agama menurut keyakinannya masing-masing, dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama.

Islam, pada hakikatnya, datang tidak hanya untuk membela agamanya, tetapi juga untuk mengakui keberadaan agama-agama. Hal ini karena bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat dan rasa hormat antar pemeluk agama. Terjalannya kerukunan dan terjadinya sikap toleran antar umat beragama akan memungkinkan dan memudahkan dalam bekerja sama. Dapat dikatakan bahwa mewujudkan kerukunan antar umat beragama merupakan upaya mendorong setiap pemeluknya untuk konsisten dengan agama tersebut, sehingga kebhinekaan tersebut tidak hanya berupa pengakuan atau suri tauladan, tetapi dapat memberikan nilai dan manfaat bagi dirinya dan masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdullah Maskuri, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), h.56

<sup>28</sup> Al Munawar, Said Agil Husain, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Perss, 2015), h. 71

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan yang pluralistik merupakan bagian dari upaya menciptakan kemaslahatan umum dan kelancaran hubungan antar umat yang berbeda agama, sehingga setiap umat beragama dapat menjalankan sebagian dari tuntutan agamanya masing-masing. Selain itu, adanya toleransi antar pemeluk agama masing-masing dapat menciptakan masyarakat yang religius. Keindahan masyarakat yang religius tercermin dari kerjasama antar kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Islam memang agama dakwah, namun tetap mengedepankan sikap toleransi (tasamuh/tepa selira) dalam menyebarkan agama Islam.

Islam melarang permusuhan dan menyebarkan kebencian di antara manusia, tetapi Islam mengajarkan untuk bersikap toleran dan menghormati agama lain. <sup>29</sup>Karena hal ini akan menghindari kekerasan dalam beragama. Kekerasan adalah perbuatan yang membahayakan manusia. Kekerasan akan menimbulkan prasangka, kekakuan dan Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama diperlukan etika antar umat beragama. Etika menurut Al-Munawar adalah: pertama, saling menerima, masing-masing subjek menerima subjek lain dengan segala keberadaannya, dan tidak menurut kehendak dan kehendak subjek pertama. Dengan pengertian, setiap

---

<sup>29</sup> M. Quraish, Shihab, *Islam yang saya anut (Dasar ajaran islam)*, (Tangerang : Lentera Hati, 2017), h 14

kelompok agama menerima kelompok agama lain, tanpa memperhitungkan perbedaan, kelebihan atau kekurangan.<sup>30</sup>

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa setiap kelompok dapat saling mengenal satu sama lain, tanpa memperhitungkan kekurangan dan perbedaan. Kedua, saling percaya adalah kenyataan dan pernyataan saling menerima. Kendala utama dalam menjaga keharmonisan sosial adalah ketika rasa saling percaya hilang dan digantikan dengan saling prasangka dan saling curiga.<sup>31</sup>

Bertahan atau tidak, retak atau tidaknya hubungan, baik antar individu maupun antar kelompok sangat ditentukan oleh bertahan atau tidaknya rasa saling percaya. Kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama akan tetap terjaga, yaitu dengan saling percaya antara umat yang satu dengan umat yang lain. Ketiga, prinsip berpikir positif. Dalam masyarakat, manusia selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan. Setiap masalah mengandung nilai positif dan negatif yang membutuhkan pemecahan. Dan solusi. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus berusaha agar setiap permasalahan yang muncul dihadapi, diselesaikan dan diselesaikan secara objektif dengan cara berpikir yang positif.

#### (d) Faktot-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sikap Toleransi

Pelaksanaan sikap toleran ini harus dilandasi oleh sikap keterbukaan terhadap orang lain dan memperhatikan prinsip-prinsip

---

<sup>30</sup> M. Najir, A. *Tafsir Kebangsaan Cinta Tanah Air, Toleransi dan Bela Negara dalam al-quran*. ( Tangerang Selatan : El-Bukhari, 2021), h.118

<sup>31</sup> M. Quraish, Shihab. *Islam yang saya ...*, h.29

yang dianut oleh diri sendiri. Prinsipnya adalah tidak mengorbankan prinsip-prinsip ini. Jelas, toleransi itu karena perbedaan prinsip, menghargai perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Dengan kata lain, implementasinya hanya pada detail dan aspek teknis, bukan tema utama.

Padahal, toleransi yang bersumber dari karakter Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Qur'an tidak hanya mengharapakan tetapi juga menerima realitas perbedaan dan keragaman sosial<sup>32</sup>. Realisasi umat beragama dalam memperkokoh kerukunan dan ketentraman, perlu dibina kerukunan umat beragama dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperkuat dasar kerukunan antarumat beragama dan antarumat beragama dengan pemerintah..
- b. Membangun kerukunan sosial dan persatuan bangsa dalam bentuk upaya mendorong dan membimbing seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam kerangka teologis, dan melaksanakannya dalam rangka membangun persatuan dan toleransi
- c. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif untuk memperkuat pendalaman dan penghayatan agama serta mendukung praktik keagamaan yang mendukung perkembangan kehidupan yang harmonis di dalam dan antar agama

---

<sup>32</sup> M. Imadadun Rahmat, *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realita*: (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 17

- d. Menggali secara mendalam pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari semua multi-agama umat manusia. Fungsinya digunakan sebagai kriteria dan dilaksanakan bersama-sama dengan prinsip Politik, dan menunjukkan sikap keteladanan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran, nilai-nilai kemanusiaan selalu bersifat informal, dan akan memberikan keragaman nilai bagi pilihan kualitas moral seseorang dalam masyarakat yang luhur (makromah), yaitu kualitas ketakwaan dan nilai-nilai masyarakat dimiliki oleh warga. Solidaritas sosial.
- e. Memperdalam nilai-nilai spiritual yang diterapkan bagi manusia, dan mengorientasikan kepada nilai-nilai ketuhanan, sehingga tidak terjadi penyimpangan nilai-nilai sosial dan agama.
- f. Menempatkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan pemeluk agama, menghilangkan rasa saling curiga antar pemeluk agama lain, dan menciptakan suasana kerukunan umat manusia tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor tertentu.
- g. Menyadari bahwa perbedaan merupakan realitas dalam kehidupan bermasyarakat, maka hendaknya dijadikan sebagai mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama

### (e) Macam-Macam Sikap Toleransi

Menurut Nurcholis, bahwa proses individu dalam memaknai konsep toleransi dalam kehidupan melalui dua penafsiran yakni penafsiran negatif dan penafsiran positif<sup>33</sup>. Penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi cukup menuntut sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain, baik yang berbeda maupun yang sama. Interpretasi positif yang menyatakan bahwa toleransi tidak hanya seperti yang pertama (interpretasi negatif) tetapi harus ada bantuan dan dukungan untuk keberadaan orang lain atau kelompok lain. Selain itu, toleransi pada dasarnya memiliki 5 unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengungkapkannya kepada orang lain<sup>34</sup>. Elemen-elemen ini adalah:

#### 1. Memberikan kebebasan atau kemerdekaan

Dimana setiap manusia diberi kebebasan untuk bertindak, bergerak atau berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga dalam memilih agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia dilahirkan sampai mati dan kebebasan atau kemerdekaan yang dimiliki manusia tidak dapat digantikan atau direnggut oleh orang lain dengan cara apapun. Karena kebebasan itu berasal dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Di setiap negara melindungi kebebasan setiap manusia baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu pula

---

<sup>33</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan Pemikiran Nurcholis Muda*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 31

<sup>34</sup> M. Imadadun Rahmat, *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realita* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 21

dalam memilih agama atau kepercayaan yang diyakini, manusia berhak dan bebas memilihnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

## 2. Mengakui Hak Setiap Orang

Sikap mental yang mengakui hak setiap orang dalam menentukan perilaku dan nasibnya sendiri. Tentunya sikap atau perilaku yang dilakukan tidak melanggar hak orang lain, karena jika demikian maka kehidupan dalam masyarakat akan kacau balau.

## 3. Menghormati Keyakinan Orang Lain

Dasar keyakinan di atas didasarkan pada keyakinan bahwa tidak benar adanya orang atau kelompok yang memaksakan kehendaknya sendiri pada orang atau kelompok lain.<sup>35</sup> Tidak ada orang atau kelompok yang memonopoli kebenaran dan landasan ini disertai dengan catatan bahwa masalah keyakinan adalah urusan pribadi setiap orang.

## 4. Saling Mengerti

Tidak akan terjadi apa-apa, saling menghormati antar sesama manusia jika tidak saling memahami. Saling anti dan saling membenci, saling memperebutkan pengaruh merupakan salah satu akibat dari kurangnya saling pengertian dan saling menghormati<sup>36</sup>. Bahwa toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berdasarkan agama masing-masing merupakan tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri, memiliki bentuk peribadatan (ritual) dengan sistem dan tata cara tersendiri yang ditetapkan (dibebankan) dan menjadi tanggung jawab umat. orang-orang

---

<sup>35</sup> M. Imadadun Rahmat, *Islam Pribumi Mendialogkan Agama...*, hlm.21

<sup>36</sup> M. Imadadun, *Islam Pribumi Mendialogkan Agama...*, hlm.21

yang menganutnya atas dasar itu. Jadi toleransi itu dalam urusan agama, tetapi lebih kepada perwujudan sikap beragama para pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antar umat yang tidak seagama, dalam masalah sosial atau dalam kemaslahatan umum.<sup>37</sup>

Dapat disimpulkan bahwa toleransi beragama berarti sikap terbuka seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agamanya menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dan ketentuan agamanya masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari pihak lain. keluarga mereka sekalipun. Secara teknis, implementasi toleransi beragama yang dilakukan di masyarakat lebih banyak terkait dengan kebebasan dan kebebasan untuk menafsirkan dan mengekspresikan ajaran agamanya masing-masing.

#### 5. Kebebasan Beragama

Kebebasan memeluk suatu agama atau agama sebagai salah satu hak esensial bagi kehidupan manusia, karena kebebasan memilih agama bersumber dari fitrah dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bukan dari orang lain atau dari orang tua. Untuk itu dalam menganut atau memilih suatu agama tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Di Indonesia, undang-undang tersebut tertuang dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

---

<sup>37</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaa...*, h. 76



agama dan kepercayaannya”.<sup>38</sup> Jelas bahwa negara sendiri menjamin penduduknya dalam memilih dan memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing dan menjamin serta melindungi penduduknya dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Masyarakat Islam memiliki sifat pluralistik dan sangat toleran terhadap berbagai golongan sosial dan agama karena hidup bermasyarakat merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia agar tujuan hidup manusia dapat terwujud, karena jika suatu kehidupan dibentuk berdasarkan persaudaraan, penuh cinta dan harmoni. Toleransi kepada kaum muslimin sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam 4 kriteria yang harus dipatuhi oleh setiap manusia<sup>39</sup>. Berikut ini keempat kriteria tersebut dijabarkan :

1. Tidak boleh memaksakan suatu agama pada orang lain

Dalam Islam, umat Islam tidak diperbolehkan memaksakan pemaksaan terhadap agama lain, karena pemaksaan terhadap suatu agama bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Kafirun ayat 1-6.

2. Tidak boleh bermusuhan dengan orang selain muslim atau kafir

Perintah Nabi untuk melindungi orang selain Muslim seperti yang dilakukan Nabi ketika berada di Madinah. Orang-orang Yahudi dan Kristen yang sedikit jumlahnya dilindungi baik dalam keamanan

---

<sup>38</sup> Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013),h.11

<sup>39</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, ( Beirut: Darul Fikri, 2013), h.71

maupun dalam beribadah. Umat Islam didorong untuk dapat hidup rukun dengan sesamanya meskipun berbeda keyakinan.

### 3. Hidup rukun dan damai dengan sesama manusia

Hidup rukun antara muslim dan non muslim seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW akan membawa kehidupan yang damai dan tentram. Selain itu dalam Abukhari dijelaskan bahwa manusia juga dianjurkan untuk bersikap lemah lembut terhadap sesama manusia, baik muslim maupun nasrani atau yahudi..<sup>40</sup>

### 4. Saling tolong menolong dengan sesama manusia

Dengan hidup rukun dan saling membantu, manusia akan membuat kehidupan di dunia yang damai dan tenang. Rasulullah memerintahkan untuk saling tolong menolong dan tolong menolong tanpa membedakan suku dan agama.

Artinya, secara khusus konsep toleransi beragama dalam Islam telah diuraikan sedemikian rupa sehingga tidak ada pelanggaran terhadap sikap toleransi dalam diri umat Islam. Dalam pedoman hidup telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dalam kitab Allah swt yaitu Al-Quran memuat beberapa ayat yang menjadi pedoman umat Islam dalam hidup rukun dalam keberagaman.

## **b. Toleransi Dalam Perspektif Kajian Islam**

Sebenarnya toleransi dibutuhkan oleh Islam sepenuhnya, karena menurut definisi Islam berarti “damai”, “keselamatan” dan “menyerah”. Hal ini

---

<sup>40</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah, *Shahih Bukhari...*, h.73

didasarkan pada rumusan istilah “Islam, agama rahmatil lil’alamîn” yang merupakan agama yang melindungi seluruh alam. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti Islam bukanlah agama yang hadir untuk menghapus semua agama yang ada, tetapi dalam Islam dikenal dengan tawaran dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah, karena itu tak mungkin disamakan. Dalam al-Qur’an surah Yunus ayat 99 Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى  
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: ‘dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?’<sup>41</sup>

Selanjutnya, selain di Surah Yunus Allah menandakan lagi dalam surah ali-imran ayat 64 yang berbunyi :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ  
بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا  
مُسْلِمُونَ

Artinya: “Katakan olehmu (ya Muhamad), ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah menuju ke titik pertemuan (kalimatun sawā atau common values) antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak pula memperserikatkan-Nya kepada apa pun, dan bahwa sebagian dari kita tidak mengangkat sebagian yang lain sebagai “tuhan-tuhan” selain Allah!’<sup>42</sup>

<sup>41</sup> QS Surah Yunus Ayat 99

<sup>42</sup> QS Surah Ali-Imran ayat 64

Jadi dapat disimpulkan bahwa ayat ini mengajak umat beragama (khususnya Yahudi, Nasrani, dan Islam) untuk menekankan persamaan dan menghindari perbedaan. Hal ini dilakukan demi saling menghargai dan menghormati. Selain itu, ayat ini juga mengajak untuk sama-sama menegakkan tauhid, yaitu sikap tidak menyekutukan Tuhan selain Dia<sup>43</sup>. Berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas bahwa konsep Islam menghadirkan konsep toleransi antar umat beragama berdasarkan kepentingan yang sama, yaitu 'menghindari konflik.

Selain itu, hadits Nabi tentang persaudaraan semesta juga menyatakan, “irhamuu man fil ardhi yarhamukum man fil samā” (cintai yang ada di bumi dan yang di surga juga akan mencintaimu)<sup>44</sup> Persaudaraan universal adalah bentuk toleransi yang diajarkan oleh Islam. Persaudaraan ini menyebabkan perlindungan hak-hak orang lain dan penerimaan perbedaan dalam masyarakat Islam. Dalam persaudaraan universal juga melibatkan konsep keadilan, perdamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan dan meniadakan segala kejahatan..

Berdasarkan fakta sejarah, bentuk toleransi dalam Islam juga dapat ditunjukkan melalui Piagam Madinah. Dimana Piagam ini merupakan contoh dari prinsip kebebasan beragama yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad

---

<sup>43</sup> Syeikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Toleransi Islam Menurut Pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Abdillah Mohammad Afifuddin As-Sidawi (Misra: Penerbit Maktabah Salafy Press, t.t.),h.109

<sup>44</sup> Mohamad Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, (Jakarta: Penerbit Hudaya, 2017), hlm.4

SAW di Madinah.<sup>45</sup> Dalam piagam tersebut terdapat poin-poin yang menekankan toleransi beragama yaitu sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang ada dan tidak saling menyakiti serta saling melindungi anggota yang terikat dalam Piagam Madinah. Dimana sikap saling melindungi dan saling tolong menolong tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan juga tampak dalam sejumlah hadits dan amalan Nabi. Bahkan sikap ini dianggap sebagai bagian dari melibatkan Tuhan. Misalnya, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dalam *Shu'ab al-Imam*, karya seorang pemikir abad ke-11, al-Baihaqi, dikatakan: "Barang siapa yang membongkar aib orang lain di dunia ini, maka Allah (nant) pasti akan membongkarnya. aibnya di hari kiamat." Artinya di sini, gotong royong antar manusia muncul dari pemahaman bahwa manusia adalah satu tubuh, dan kehilangan kodrat kemanusiaannya ketika saling menyakiti. Tolong menolong, sebagai bagian dari inti toleransi, merupakan prinsip yang sangat kuat dalam Islam.

Berdasarkan prinsip yang paling mengakar dalam pemikiran Islam yang mendukung teologi toleransi adalah kepercayaan pada agama alam, yang mendarah daging dalam diri semua manusia, dan kebaikan manusia adalah konsekuensi alami dari prinsip ini.

Berdasarkan hadits Imam Bukhari, Nabi ditanya: "Agama apa yang paling dicintai Allah?" Dia menjawab "agama asal toleran (*al-hanîfiyyatus samhah*). Maknanya jelas dari dalil-dalil di atas, telah ditunjukkan bahwa baik Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi secara shahih mengajarkan toleransi secara

---

<sup>45</sup> Syeikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Toleransi Islam Menurut Pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah...*, h.110

utuh. Selain itu, toleransi dalam Islam sangat berbeda dengan ide dan praktik toleransi yang ada di Barat. Dimana toleransi di Barat lahir karena perang agama pada abad ke-17 yang telah mengoyak rasa kemanusiaan sehingga hampir harkat dan martabat manusia jatuh ke titik terendah.<sup>46</sup>

Dengan latar belakang inilah telah dibuat kesepakatan-kesepakatan di bidang toleransi antar umat beragama yang kemudian meluas ke aspek persamaan manusia di depan hukum. Kemudian dalam Islam dikenal juga dengan istilah *as-samahah* (toleransi). Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sebaik. Kesediaan hati karena kemuliaan dan kemurahan hati
- b. Dada yang lapang karena kebersihan dan ketakwaan
- c. Kelembutan karena kemudahan
- d. Wajah ceria dengan kegembiraan
- e. Rendah hati dihadapan kaum muslimin bukan karena dihina
- f. Kemudahan dalam pergaulan (*mu'amalah*) tanpa penipuan dan kelalaian
- g. Memudahkan dakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi lagi
- h. Terikat dan tunduk pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada keberatan.

Selanjutnya, menurut Salim al-Hilali karakteristik itu merupakan a. Inti Islam, b. Seutama iman, dan c. Puncak tertinggi budi pekerti (*akhlaq*).

Dalam konteks ini Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda. Artinya:

---

<sup>46</sup> Syekh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Toleransi Islam Menurut Pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Abdillah Mohammad Afifuddin As-Sidawi, (Misra: Penerbit Maktabah Salafy Press, t.t.).

Sebaik- baik orang adalah yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang jujur, ditanyakan: Apa hati yang mahmum itu? Jawabnya : 'Adalah hati yang bertaqwa, bersih tidak ada dosa, tidak ada sikap melampaui batas dan tidak ada rasa dengki'. Ditanyakan: Siapa lagi (yang lebih baik) setelah itu?. Jawabnya : 'Orang-orang yang membenci dunia dan cinta akhirat'. Ditanyakan : Siapa lagi setelah itu? Jawabnya “ Seorang mukmin yang berbudi pekerti luhur.”<sup>47</sup>

Dasar-dasar al-Sunnah (Hadits Nabi) dikemukakan untuk menegaskan bahwa toleransi dalam Islam sangat komprehensif dan menyeluruh. Baik secara fisik maupun mental. Toleransi, oleh karena itu, tidak akan terbentuk jika tidak lahir dari hati, dari dalam. Artinya, toleransi tidak hanya membutuhkan kesediaan menerima perbedaan, tetapi juga membutuhkan pengorbanan material dan spiritual, baik fisik maupun mental. Di sinilah konsep Islam tentang toleransi (*as-samahah*) menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan mu'amalah (*hablum minan nas*) yang ditopang oleh mata rantai spiritual yang kokoh (*hablum minallah*).

### **C. Konsep Toleransi Beragama Menurut Ideologi Pancasila**

#### **1. Pancasila Sebagai Dasar Prinsip-prinsip Toleransi**

Pancasila sebagai teologi bukan berarti Pancasila menggantikan posisi agama. Pancasila juga tidak menjadikan Pancasila sebagai "Tuhan" yang diyakini oleh agama-agama. Namun, menjadikan Pancasila sebagai landasan teologis kehidupan beragama. Artinya dalam menjalin hubungan baik antar pemeluk agama, untuk saling toleran diperlukan kekuatan budaya yang dapat diterima oleh semua agama. Untuk itu, Pancasila memiliki posisi sebagai

---

<sup>47</sup> Al-Baihaqi, Syu'ab al-Imam (Beirut: t.t), ed. Abu Hajir Muhamad b. Basyuni Zaghul, VI, h. 105

landasan nilai dalam membangun sikap beragama di tengah pluralisme agama dan budaya. Sesuai dengan falsafah negara ini sebagai “negara beragama”. Identitas keagamaan merupakan fondasi bangsa yang paling fundamental. Maka wajar jika nenek moyang bangsa menjadikan sila pertama sebagai dasar pandangan ketuhanan. Dengan maksud melahirkan suatu kekuatan yang begitu fundamental lintas agama dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Gus Dur pernah berkata bahwa agama dan kebangsaan adalah satu ikatan. Antara agama dan bangsa adalah pertandingan yang tidak bisa ditawar lagi. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Agama adalah representasi dari perjuangan teologis nasional.<sup>48</sup> Sehingga tidak dapat dipungkiri oleh siapapun bahwa agama merupakan kekuatan terpenting bagi bangsa, melalui toleransi, mengingat Indonesia memiliki pluralisme agama yang luar biasa. Menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan umat beragama bertujuan untuk menjaga sikap kebangsaan yang kuat. Bhineka Tunggal Ika bukan hanya semboyan tanpa nilai. Ia merupakan representasi dari sistem budaya bagi keragaman kehidupan bangsa. Nenek moyang bangsa sudah lama menyadari pentingnya toleransi antar umat beragama demi kehidupan dan kebhinekaan bangsa.

Jadi teologi kebhinekaan atau Pancasila adalah sebuah keniscayaan. Prinsip teologis ini lahir dari ibu pertiwi. Teologi Pancasila merupakan budaya masyarakat adat yang menjunjung tinggi kesopanan dan keramahan dalam budaya keagamaan. Itulah sebabnya Pancasila mengabadikan semua

---

<sup>48</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 21



nilai tersebut dalam sistem kebhinekaan dan Pancasila. Teologi Pancasila lahir dari budaya pluralistik. Yudi Latif pernah mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk<sup>49</sup>. Artinya kemajemukan adalah keniscayaan sejarah. Kemajemukan adalah sunnatullah yang tidak bisa ditolak. Kemajemukan adalah nilai kehidupan berbangsa bagi kesatuan dan persatuan. Melalui budaya majemuk ini perjuangan Indonesia dalam memerdekakan diri menjadi langkah gerakan kolektif demi mewujudkan Negara yang maju dan berkembang.<sup>50</sup>

Teologi Pancasila penting bagi Indonesia. Teologi Pancasila adalah nafas perjuangan dan pembebasan. Teologi inilah yang menggerakkan para pejuang bangsa untuk merebut dan menegakkan kemerdekaan. Melalui teologi ini, seluruh elemen bangsa, kyai, santri, pesantren, berpartisipasi dalam perjuangan melawan penjajah untuk kemerdekaan bangsa. Saat ini teologi Pancasila begitu penting dan sangat perlu dikuatkan. Melihat krisis nasional saat ini, itu termasuk krisis keteladanan, sedangkan Pancasila adalah contoh terbaik. Di tengah krisis politik demokrasi, kembali ke Pancasila adalah cara terbaik untuk membangun kesatuan visi. Melihat gejala terorisme dan radikalisme agama, teologi Pancasila menjadi kunci untuk melawan segala aksi teror yang merusak kemajemukan bangsa.

Teologi Pancasila adalah semangat perjuangan. Teologi Pancasila memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme yang kuat. Teologi pancasila mencerminkan sikap budaya yang mencerminkan nilai-nilai pancasila, yang

---

<sup>49</sup> Yudi Latif, Negara Paripurna, *Historisitas Rasionalitas dan...*, h. 25

<sup>50</sup> Yudi Latif, Negara Paripurna, *Historisitas, Rasionalitas dan...*, h. 282

secara jelas terinci dalam lima sila di dalamnya.<sup>51</sup> Bagi Indonesia, teologi Pancasila telah lama menjadi semangat pembebasan. Bahkan teologi Pancasila adalah pelopor semangat kemerdekaan. Termasuk dalam rumusan Pancasila itu sendiri juga merupakan representasi dari teologi Pancasila. Dimana semua elemen lintas agama dan budaya duduk bersama merumuskan pentingnya menjaga keharmonisan kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk.

Melihat berbagai kasus intoleransi beragama, hingga aksi teror, bahkan penindasan terhadap agama minoritas, di situlah pentingnya teologi Pancasila dihadirkan kembali. Pada dasarnya agama mempunyai mandate dari Tuhan adalah agama yang mempunyai dua unsure penting, yakni kebenaran dan toleransi. Maka harusnya hal tersebut tidak layak terjadi ditengah keberagaman.<sup>52</sup> Teologi Pancasila perlu diperkuat di semua elemen lintas agama untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Semangat Pancasila harus menjadi garda terdepan bagi seluruh pemeluk agama untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **2. Pancasila Sebagai Teologi Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama**

Berdasarkan sejarah agama-agama di Indonesia, ciri budaya keagamaan masyarakat adat adalah kesantunan dan keluhuran budi. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, secara kultural agama-agama telah membentuk pribadi yang berbudaya. Bukti dari kehidupan budaya masyarakat adat dapat dirasakan hingga saat ini, seperti tradisi

---

<sup>51</sup> Al-Juwaini. *Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam.* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 12

<sup>52</sup> Zuhairi, Musrawi. *Al-Quran Kitab Toleransi.*, ( Jakarta : Kompas Gramedia, 2010). h, 158

persembahyangan, gamelan, kesenian wayang, dan sebagainya. Melalui budaya tersebut, sifat luhur masyarakat adat kental dengan nilai-nilai luhur berupa kerukunan dan kesopanan<sup>53</sup>.

Terbentuknya bangsa-bangsa, suku dalam berbagai periode sejarah bukan meruntuhkan rumah kemanusiaan dan menyulut konflik, melainkan menghindarinya. Bahkan ketika Islam datang ke Indonesia, ia tidak datang dengan wajah garang. Tapi Islam datang dengan senyuman dan kesenangan.<sup>54</sup> Negosiasi budaya antara Islam dengan penduduk asli Indonesia berlangsung secara dialogis, sehingga Islam dengan mudah diterima sebagai agama baru pada saat itu. Dalam perkembangannya, Islam mampu menggeser kepercayaan penduduk pribumi dan Islam kemudian menjadi agama mayoritas<sup>55</sup>. Islam datang ke Indonesia penuh dengan penghargaan budaya. Peran Walisongo erat kaitannya dengan dakwah kultural Islam Indonesia. Para wali tidak sepenuhnya menghapus tradisi budaya pra-Islam di Indonesia, tetapi menjadikannya sebagai media dakwah, bahkan tidak sedikit tradisi pra-Islam yang masih dipertahankan hingga saat ini. Fakta ini membuktikan kearifan teologis umat beragama di Indonesia.

Bahkan di zaman kerajaan, Islam dan agama lain, hampir tidak ada catatan konflik. Sebab Islam juga kental dengan kehidupan kepemimpinan yang disebut *khalifah*. Hal tersebut menandakan bahwa heterogen, kemajemukan dan keberagaman sangat erat kaitannya dengan Islam dimasa

---

<sup>53</sup> Wijaya, A. *Menusantarakan Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), h. 184

<sup>54</sup> M. Najih, A. *Tafsir Kebangsaan (Cinta Tanah Air, Toleransi dan Bela Negara dalam Al-Quran)*. (Tangerang Selatan : El-Bukhari, 2021). h.47

<sup>55</sup> M Karim, A. *Islam Nusantara*, ( Yogyakarta: Pustaka Book Publiser, 2007), h. 47

tersebut.<sup>56</sup> Sejarah banyak bercerita bahwa Islam sangat rekonsiliasi dengan sistem kerajaan, dan hal ini seolah memberikan ruang positif bagi perkembangan Islam di Nusantara. Jadi, konflik agama jelas bukan budaya bangsa kita. Budaya bangsa Indonesia adalah kesopanan, keramahan, dan juga sopan santun. Nilai-nilai budaya dan etika bangsa Indonesia tertanam dalam Pancasila. Pancasila merupakan nilai yang “abadi” bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nenek moyang bangsa menempatkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila sebagai landasan pembangunan bangsa Indonesia yang berbudi luhur dan maju. Jadi dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah sistem budaya, sistem nilai, sistem perilaku, sistem politik, dan juga agama bagi masyarakat Indonesia.

Belum lagi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, yang erat kaitannya dengan landasan teologis untuk memicu semangat perjuangan kemerdekaan. Seluruh elemen lintas suku, budaya, agama, bahu membahu menumpahkan darah berjuang untuk Indonesia. Dengan demikian teologi nasional adalah teologi perjuangan dan pembebasan.<sup>57</sup>Teologi ini mengilhami semangat keuletan para prajurit dalam berjihad untuk mewujudkan kedaulatan NKRI. Jadi, Pancasila merupakan landasan penting bagi kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan representasi perjuangan semua suku, agama, dan budaya. Kekuatan Pancasila sebagai dasar perjuangan telah mengobarkan semangat pembebasan, dari kungkungan kolonialisme

---

<sup>56</sup> M. Najih, A. *Tafsir Kebangsaan (Cinta Tanah Air, Toleransi dan Bela Negara dalam Al-Quran)*.(Tangerang Selatan : El-Bukhari, 2021). h. 47

<sup>57</sup> Al-Juwaini, *Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 121

menuju kemerdekaan. Hingga Indonesia benar-benar merdeka dari penjajahan asing. Perjuangan teologi nasional ini seharusnya menjadi titik pergerakan sampai sekarang dalam perjuangan kedaulatan nasional dan nasionalisme.

Oleh karena itu, teologi Pancasila harus menjadi dasar pokok kehidupan beragama di Indonesia. Bukan untuk satu agama saja, tapi untuk semua agama. Tujuannya untuk membentuk sikap kerukunan, toleransi dan kerukunan umat beragama. Dan visi terpenting adalah menjaga stabilitas kehidupan bangsa dan meneguhkan nasionalisme dalam bingkai kehidupan umat beragama. Konsep teologi Pancasila memiliki lima prinsip nilai. Kelimanya jelas tertuang dalam lima sila Pancasila. Dengan demikian, kelima sila dalam Pancasila harus menjadi visi kebhinekaan dalam kerangka nasionalisme dan kebangsaan. Pertama, Ketuhanan, melalui sila pancasila, mengukuhkan Indonesia sebagai negara Ketuhanan. "negara agama".

Indonesia adalah negara yang berdasarkan ideologi pancasila. Bukan negara agama tertentu, tetapi milik semua agama. Pengertian terakhir Indonesia adalah Pancasila, sehingga semua agama akan mengemban visi Ketuhanan Nasional.<sup>58</sup> Artinya, agama akan menjalankan praktik sosial keagamaan dalam visi kebangsaan, menjaga demokrasi, dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan atas nama kebangsaan, toleransi antar umat beragama akan benar-benar ditegakkan dengan kokoh demi terciptanya kesatuan budaya bangsa. Kedua, kemanusiaan, prinsip ini penting bagi kehidupan umat beragama di Indonesia. Selain tujuan kemanusiaan antar

---

<sup>58</sup> Al-Juwaini, *Peletak Dasar Teologi Rasional...*, h.121

agama, tujuan kemanusiaan global juga perlu ditekankan, terutama mengenai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Selama ini agama menjadi garda terdepan dalam melahirkan manusia yang berkarakter dan bermoral. Tegasnya, hal yang sama juga ada dalam amanat Pancasila untuk membentuk manusia yang adil dan beradab. Untuk itu, agama juga memiliki tanggung jawab yang erat dalam menegakkan keadilan dan keadaban, baik dalam praktik keagamaan maupun kemanusiaan.<sup>59</sup>

Ketiga, kebangsaan, agama membutuhkan sejarah, membutuhkan rumah, dan penting untuk memiliki status nasional. Nasionalisme merupakan ibadah nasional yang perlu ditekankan. Menjaga tanah air adalah bagian dari iman. Dalam visi nasional ini terdapat misi perjuangan. Jadi semua agama tanpa status golongan memiliki kewajiban yang sama dalam membela tanah airnya. Agama dan kebangsaan merupakan sinergi dialog kreatif dalam menciptakan budaya persatuan dan kesatuan. Melalui kebangsaan, toleransi beragama akan mudah dipersatukan, dengan visi ini pula toleransi di Indonesia dapat menjadi kiblat cita-cita perdamaian agama-agama di dunia.

Keempat, demokrasi deliberatif, melalui partisipasi politik semua agama memiliki hak yang sama. Hak sipil-politik dan hak-hak sosial-budaya. Tidak ada mayoritas atau minoritas. Keduanya diperlakukan sama di mata demokrasi. Kesadaran berdemokrasi ini penting bagi agama-agama, agar tidak saling menghina jika ada minoritas agama, misalnya mencalonkan diri sebagai calon presiden/gubernur. Karena Indonesia mengedepankan demokrasi

---

<sup>59</sup> M.Karim, *A Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisier, 2007). h.147

deliberatif, dalam kerangka teologi Pancasila, amanat ini sangat perlu dipraktikkan dalam kehidupan beragama.

Kelima, keadilan sosial, prinsip ini merupakan tujuan akhir kehidupan berbangsa. Dari semua sila sebelumnya, keadilan sosial merupakan muara kehidupan berbangsa. Kehidupan sosial harus menjadi yang terdepan dalam setiap gerakan keagamaan dan kebangsaan.<sup>60</sup> Mewujudkan keadilan sosial ini merupakan visi nasional, dan harus diwujudkan oleh seluruh kepentingan elemen bangsa. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam mendefinisikan keadilan sosial secara lebih luas. Agama sebagai unsur ketundukan, dan erat dengan kepekaan keyakinan, keadilan sosial akan menjadi perekat visi dan misi bersama serta nilai kebangsaan yang harus dijalankan. Baik dalam keadilan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Melalui penjelasan di atas, jelaslah bahwa teologi Pancasila adalah asas nasionalisme dan nasionalisme. Pancasila sebagai identitas bangsa, juga merupakan identitas kehidupan beragama. Tujuannya untuk menjaga demokrasi dalam rangka membangun toleransi dan kerukunan umat beragama. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin pernah menjelaskan (dalam konteks fikih kebhinekaan), bahwa representasi kebangsaan dalam kehidupan beragama harus menampilkan budaya yang arif. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam Pancasila, sehingga teologi Pancasila

---

<sup>60</sup> Zuhairi, Musrawi. *Al-Quran Kitab Toleransi*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2010),h.196

memiliki kedudukan yang sangat penting dan perlu diperkuat dalam kehidupan umat beragama di Indonesia.<sup>61</sup>

Iman berarti beriman, dalam ajaran Islam iman adalah mengikuti perintah-Nya (Tuhan), dan menjauhi segala larangan-Nya (Tuhan). Konsekuensi dari keimanan adalah ketundukan kepada aturan-aturan ketuhanan dalam ajaran agama, di samping harus meninggalkan segala bentuk larangan. Lalu bagaimana dengan “keyakinan” pada Pancasila? Yang pasti, “mempercayai” Pancasila bukan seperti menjadikan Pancasila seperti Tuhan atau agama. “Keyakinan” yang dimaksud adalah implementasi penegasan sikap terhadap ideologi Pancasila. Dimana semua umat beragama menjadikan Pancasila sebagai aturan dan pandangan hidup beragama demi toleransi dan kerukunan umat beragama.

Arti lain dari istilah “keyakinan” kepada Pancasila adalah menjalankan amanat konstitusi dan menjauhi segala bentuk larangan. Artinya, semua pemeluk agama harus menaati konstitusi, undang-undang, norma, dan etika budaya negara. Selain itu, umat beragama juga dilarang merusak sistem negara-bangsa, baik dengan cara makar, aksi teror, maupun radikalisme agama. Pancasila sebagai pedoman hidup umat beragama akan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kebersamaan. Kesadaran ini ditekankan pada nilai-nilai budaya bahwa Indonesia memang beragam. Berdasarkan pandangan tersebut, persatuan dan kesatuan akan menjadi visi yang dinamis dalam membangun budaya bangsa. Sehingga tidak terjadi saling klaim antar

---

<sup>61</sup>Saifuddin, L. H. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. “*Dalam W. Gunawan (ed), Fikih Kebhinekaan,*” (Jakarta: Mizan, 2015), h. 17



agama mengenai identitas dan ideologi bangsa, karena Pancasila bersifat final dan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Dasar “keyakinan” pada Pancasila adalah penguatan mentalitas bangsa secara kultural-religius. Pancasila harus diwartakan dalam wacana keagamaan. Semua agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu memiliki visi yang sama untuk menjaga keberagaman dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan ajaran agama. Melalui penguatan mentalitas Pancasila, semua pemeluk agama akan menyadari pentingnya perbedaan dan menghormatinya. Zuli Qodir pernah mengungkapkan bahwa konflik sosial-keagamaan dapat diminimalisir ketika internal umat beragama mau memahami keberadaan orang lain yang berbeda.<sup>62</sup> Bukan hanya itu, tetapi juga mengakui keberadaan kelompok lain yang berlawanan. Melalui kesadaran multikultural seperti itu tidak akan ada lagi riak fitnah antar agama. Hubungan antar agama akan menjaga keharmonisan satu sama lain. Bahkan lebih besar lagi, semua agama dalam satu ikatan kebangsaan akan benar-benar berpartisipasi aktif dalam mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial yang merata.

Dengan demikian, "keyakinan" pada Pancasila akan menjadi salah satu "ibadah nasional". Ibadah ini dimaksudkan sebagai ritual nasionalisme untuk menjaga demokrasi dan menjaga kebhinekaan. Melalui “ibadah nasional” seluruh elemen lintas agama berada dalam kondisi siap menumpahkan darah untuk mempertahankan kemerdekaan, baik kemerdekaan sosial, politik

---

<sup>62</sup>Z Qodir, *Pemikiran Islam, Multikulturalisme dan Kewargaan. Dalam W. Gunawan (ed), Fikih Kebhinekaan* (Jakarta: Mizan, 2015), h. 170

maupun ekonomi. Masdar Farid Mas'udi juga pernah mengungkapkan bahwa manusia bukan hanya makhluk individu tetapi juga makhluk sosial. Artinya kemerdekaan individu tanpa kemerdekaan kolektif sebagai bangsa akan sangat rapuh dan mudah runtuh. Jelas dimaknai bahwa jika agama-agama masih saling menuduh benar dan salah dan saling curiga, maka bangsa akan mudah rapuh. Sekali lagi, mengingat perjuangan agama-agama dalam perjuangan kemerdekaan merupakan upaya kolektif antaragama dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Kerjasama antar umat beragama sangat penting dalam membangun kemandirian dari segala bidang<sup>63</sup>. Dengan demikian pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, diperlukan peran agama dalam memperkuat mentalitasnya. Oleh karena itu, Pancasila layak untuk “diyakini” sebagai ideologi kehidupan nasional dalam kehidupan umat beragama. Bahkan nilai-nilai Pancasila perlu ditekankan sebagai upaya menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama, dengan kesadaran bahwa Indonesia memang multi dimensi, multi agama dan multikultural.

### **3. Pancasila Sebagai Ideologi di Indonesia**

Pancasila adalah ideologi dan falsafah negara. Pancasila didasarkan pada identitas budaya kehidupan multi etnis, multi budaya dan multi agama masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila layak dan layak menjadi inspirasi kehidupan setiap bangsa, baik sosial, politik, budaya, maupun agama. Indonesia adalah negara pancasila, bukan negara agama,

---

<sup>63</sup> M. F. Syarah Mas'udi, *Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Dalam A. Sahal (ed), *Islam Nusantara*, (Jakarta: Mizan, 2015), h. 293

Indonesia adalah negara agama berdasarkan Pancasila. Seperti yang diungkapkan Azyumardi Azra, Indonesia bukanlah negara beragama karena penduduknya mayoritas beragama Islam. Juga bukan negara sekuler, karena Pancasila dan hukum memberikan tempat bagi agama-agama. Menurutnya, Pancasila merupakan jalan tengah dimana ada tempat khusus bagi agama. Dalam ungkapan ini dapat dipahami bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila.

Nasaruddin Umar juga menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Pancasila. Ini bukan negara agama atau negara sekuler. Agama memiliki tempat khusus bagi agama, karena agama memegang peranan penting dalam menjaga kepentingan bangsa. Sejauh ini jelas bahwa agama harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi agama dalam kehidupan bernegara<sup>64</sup>. Kasus makar terhadap sistem negara-bangsa adalah bergesernya Pancasila sebagai ideologi agama dalam bernegara. Kemungkinan besar ada penumpang gelap di bahtera negara kita, jadi kita berusaha untuk merusak kebhinekaan bahkan menggantikan Pancasila. Dengan demikian, sangat penting untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar kehidupan yang harmonis umat beragama di Indonesia.

Baru-baru ini, sentimen agama dan politik telah diperdebatkan dengan hangat. Bahkan ada tindakan membela agama yang dikhawatirkan banyak pihak berindikasi makar dan berusaha melawan negara. Kekhawatiran ini wajar, terutama untuk menjaga stabilitas kehidupan nasional. Sudah

---

<sup>64</sup> Umar, N. *Islam Fungsional, Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*. (Jakarta: Gramedia, 2014), h.261

sepantasnya pemerintah menegaskan kembali Pancasila dan kebhinekaan di tengah gelombang radikalisme agama. Penguatan Pancasila sebagai ideologi agama menjadi benteng kedaulatan negara. aksi teror dan sejenisnya merupakan penyakit demokrasi yang perlu ditindak tegas. Apalagi radikalisme agama yang berujung pada makar.

Maka dibutuhkan mentalitas Pancasila dalam menjaga kekuatan kebangsaan lintas garis sosial budaya. Seluruh elemen bangsa harus memahami sepenuhnya kewajibannya sebagai warga negara dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munculnya konflik-konflik internal agama, kejadian-kejadian eksternal hingga mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa adalah karena lemahnya dan rapuhnya Pancasila. Untuk menjaga kerukunan hidup berbangsa, Pancasila harus ditegaskan sebagai ideologi agama dalam kehidupan bernegara. Sehingga tidak akan ada kecurigaan saling kecemburuan antar berbagai kepentingan. Karena tujuan seluruh elemen kehidupan bangsa adalah mewujudkan keadilan sosial yang merata.

#### **D. Implementasi Nilai Toleransi Beragama**

Peneliti menyusun simpulan mengenai implementasi nilai toleransi beragama berdasarkan simpulan beberapa teori yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dengan membandingkan dengan hasil-hasil yang telah dibuktikan pada penelitian terdahulu yang sudah teruji relevansi hasilnya. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, pelaksana suatu kebijakan melakukan suatu kegiatan atau kegiatan, dan

pada akhirnya memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri<sup>65</sup>. Adapun toleransi didefinisikan sebagai sifat ataupun afeksi yang menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) melakukan suatu tindakan.<sup>66</sup> Artinya implementasi nilai toleransi adalah pelaksanaan dari suatu kebijakan yang berkenaan dengan sifat atau afeksi seseorang untuk saling menghargai dan membolehkan melakukan suatu hal terhadap suatu hal yang pada dasarnya saling bertentangan atau berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan dengan implementasi nilai toleransi beragama, dapat kita simpulkan bahwa hal tersebut merupakan tindakan atau kesadaran individu dalam menghargai perbedaan agama dilingkungan sosial dan tetap menjaga harmonisasi dalam perbedaan tersebut.

Dalam kaitannya dengan implementasi nilai toleransi beragama, peneliti juga menyimpulkan definisi terkait berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan Utami, Siti Rizqy pada tahun 2018<sup>67</sup> tentang “Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Lembaga Pendidikan non-Muslim. Menurut data yang didapat dalam penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa implementasi nilai-nilai toleransi antar umat beragama di SMP Pangudi

---

<sup>65</sup> Haedar Akib Antonius Tarigan, “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2018, Universitas Pepabari (Makassar, 2018), h. 117.

<sup>66</sup> Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), hlm.104

<sup>67</sup> Utami, Siti Rizqy. Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Lembaga Pendidikan Nonmuslim (Studi Kasus Di Smp Pangudi Luhur Salatiga Tahun Pelajaran 2017/2018). 2018. Phd Thesis. Iain Salatiga.

Luhur Salatiga dapat dikategorikan dalam dua bidang yakni ritual dan sosial. Toleransi bidang ritual itu diantaranya adalah megizinkan berdo'a sesuai dengan keyakinan masing-masing, mengingatkan untuk selalu melakukan ibadah puasa bagi siswa muslim dan ikut memperingati hari besar agama lain. Adapun toleransi dalam bidang sosial yaitu tidak membeda-bedakan siswa, memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan, memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi siswa, keadilan dalam memberikan hukuman tanpa memandang status agama.

*Kedua*, Penelitian relevan selanjutnya tentang implementasi toleransi beragama adalah penelitian yang dilakukan oleh Mustaqim pada tahun 2019<sup>68</sup>, tentang Implementasi Nilai Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Antar Umat Beragama Di Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesadaran keagamaan membangkitkan pentingnya memiliki agama, karena di Indonesia setiap manusia yang memiliki agama, pasti melaksanakan perintah dan mematuhi larangan sesuai agama yang dianut. Hal tersebut merupakan keunikan tersendiri yang diwujudkan dalam toleransi antar umat beragama. Pada saat ini terjadi persoalan toleransi antar umat beragama, dimana setiap agama mengklaim kebenaran atas agamanya. Di Desa Gondoriyo tumbuh tiga agama berbeda yang dianut oleh masyarakatnya dan masyarakat disana saling menghormati

---

<sup>68</sup> Mustaqim, Saeful, Et Al. Implementasi Nilai Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Antar Umat Beragama Di Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. 2019. Phd Thesis. Unnes.

perbedaan tersebut. Masyarakat Desa Gondoriyo memiliki kegiatan bersama seperti Nyadran, Selamatan, dan Merti dusun yang menjadi simbol adanya toleransi antar umat beragama di Desa Gondoriyo. Hal menjadi kajian penelitian menarik tentang implementasi nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat antar umat beragama di Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Data penelitian menyimpulkan hasil bahwa (1) Masyarakat percaya dan yakin kepada Tuhan berdasarkan agamanya masing-masing ; (2) Masyarakat saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah yang dianut seperti aktivitas-aktivitas serta peringatan atau perayaan masing-masing agama serta tidak memaksakan kepercayaan agama kepada orang lain tapi tidak melarang orang lain pindah agama; (3) Sikap saling, bekerjasama, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari dan saling membantu dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Yunus, Muhammad<sup>69</sup> tentang “Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, Pada penelitian data hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai toleransi beragama dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Amparita dilakukan dengan cara 1) Memberi kesempatan kepada semua siswa untuk mengikuti ajaran agama sesuai dengan agamanya, 2) Mewujudkan sikap toleran. iklim dalam setiap pelajaran ( belajar yang berbeda, menciptakan rasa saling

---

<sup>69</sup> Yunus, Muhammad. Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 2017, 15.2: 166-187.

percaya, menjaga saling pengertian, Menghormati saling mencintai). 3) Mendalami materi (nilai-nilai toleransi).

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Khasanah, Nur dkk pada tahun 2017<sup>70</sup> tentang Implementasi Nilai Toleransi Terhadap Mahasiswa Lintas Keyakinan Pada Perguruan Tinggi Di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai toleransi terhadap mahasiswa lintas keyakinan pada perguruan tinggi di Yogyakarta. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi nilai toleransi terhadap mahasiswa lintas keyakinan pada perguruan tinggi di Yogyakarta diwujudkan melalui beberapa aspek, diantaranya, interaksi antar mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, bidang akademik, dan kebijakan yang diberikan perguruan tinggi terhadap mahasiswa lintas keyakinan. Sikap saling menghargai, terbuka dan adil, menjadi kunci suksesnya implementasi nilai toleransi terhadap mahasiswa lintas keyakinan pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi memperlakukan mahasiswa lintas keyakinan dengan perilaku dan ketentuan yang sama, tidak ada yang di khususkan dan semua terlaksana secara objektif sehingga tidak timbul rasa diistimewakan antar satu dengan lainnya yang dapat menimbulkan sikap pro kontra di kalangan mahasiswa. Adanya pengembangan nilai toleransi pada lingkungan perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa beragam latar belakang dan keyakinan dapat menjadi sarana dan pembelajaran terbentuknya sikap toleran. Perwujudan nilai toleransi

---

<sup>70</sup> Khasanah, Nur, Et Al. Implementasi Nilai Toleransi Terhadap Mahasiswa Lintas Keyakinan Pada Perguruan Tinggi Di Yogyakarta. Prodi Ppkn Universitas Pgri Yogyakarta, 2017.



terhadap mahasiswa lintas keyakinan dilaksanakan dengan baik, ditunjukkan dengan tidak ditemukannya hambatan dalam hubungan antar mahasiswa serta perguruan tinggi terhadap mahasiswa dalam menjalankan kebijakannya. Kesimpulan yang menonjol berdasarkan hasil penelitian dan uraian tersebut ialah tidak ditemukannya perilaku dan kegiatan yang mengarah pada intoleransi, sehingga lingkungan perguruan tinggi berjalan dengan damai dan tentram tidak terjadi perpecahan antar mahasiswa lintas keyakinan.

Berdasarkan empat hasil penelitian diatas yang difokuskan pada implementasi nilai toleransi beragama, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi toleransi beragama dapat diwujudkan dalam bentuk membebaskan setiap individu menyakini perilaku-perilaku keagamaan mereka masing-masing tanpa harus merugikan atau mengganggu ketentraman agama yang lainnya.
2. Wujud implementasi toleransi beragama dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghormati, saling bekerjasama, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.
3. Keberhasilan implementasi nilai toleransi beragama akan terjamin jika setiap pihak terkait menumbuhkan sikap saling menghargai, terbuka dan adil dalam memutuskan suatu kebijakan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu.

### **E. Instrumen Pendukung Toleransi Beragama di Indonesia**

Instrumen adalah alat-alat pendukung yang menjadi dasar berlakunya perilaku toleransi beragama di Negara Indonesia ini adalah sebagai berikut :

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. alam yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan.
2. UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa negara Indonesia sangat serius dalam memberikan hak atas kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Instrumen penegakan HAM di Indonesia dinilai memadai.
3. Deklarasi Kairo, khususnya Pasal 10, dimaksudkan untuk memberikan solusi atas kasus-kasus intoleransi beragama di Indonesia.
4. Hak asasi manusia berdasarkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yaitu hukum internasional dan tidak melibatkan diskriminasi semata-mata atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

### **F. Penelitian Relevan**

Sebagai bahan penguat penelitian dengan judul ini, maka peneliti merujuk beberapa penelitian yang relevan dengan judul ini sebanyak lima belas penelitian yakni sebagai berikut :

1. Karahayon, Imamatusholihah. Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Di SMA Yos Sudarso Sokaraja Kabupaten Banyumas pada tahun 2017. Jurnal Terbit. Bagaimana proses penanaman nilai-

toleransi antar umat beagama dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di SMA Yos Sudarso Sokaraja Kab. Bungamas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan berupa penyusunan peraturan atau tata tertib sekolah yang tidak menyinggung agama tertentu, pelaksanaan berupa praktik kegiatan disekolah harus mendukung bentuk toleransi beragama, sedangkan kegiatan evaluasi berupa pelaksanaan evaluasi kegiatan beragma harus disesuaikan dengan tutor agama masing-masing. Perbedaan penelitian dari hal lokasi penelitian yang dilakukan peneliti serta proses yang diteliti.

2. Igun Dwi Hermawan. Pengembangan Sikap Toleransi Antar umat beragama di SD Negeri 02 Klinting Kecamatan Somagede 34 Kabupaten Banyumas pada tahun 2017. Jurnal terbit. Bagaimana pengembangan sikap toleransi antar umat beragama di SD Negeri 02 Klintang kec. Somagede 34 Kab, Banyumas dan Bagaimana bentuk pengembangan yang diupayakan pihak sekolah tersebut. Metode penelitian pengembangan (R&D). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan dilakukan dengan melibatkan pihak sekolah (masyarakat sekolah) dalam hal penyusuan tata tertib sekolah, menyusun kegiatan keagamaan secara bergantian, menentukan tutor keagamaan sendiri dan mengoptimalkan budaya toleransi antar umat beragma dilingkungan sekolah. Perbedaan penelitian terletak pada

proses penelitian berupa pengembangan, lokasi penelitian serta subjek yang diteliti adalah lingkungan pendidikan/ sekolah.

3. Utami Yuliyanti Azizah. Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama dan Teknik Penanamannya dalam Film 99 Cahaya di Langit Eropa pada tahun 2017. Artikel terbit. Masalah penelitian bagaimana nilai toleransi beragama dalam film 99 Cahaya dilangit Eropa dan Bagaimana teknik penanaman nilai toleransi antar umat beragama pada film 99 Cahaya di Langit Eropa. Metode yang digunakan adalah analisis bedah buku. Hasil penelitian bahwa pada film 99 cahaya dilangit eropa terdapat penanaman nilai toleransi umat beragama dalam bentuk perilaku actor dan aktris yang menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. Perbedaan penelitian pada metode penelitian dan subjek penelitian.
4. Rini Fidiyani. Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas) pada 2013. Masalah penelitian yakni bagaimana kerukunan umat beragama di Indonesia (Belajar keharmonisan dan toleransi beragama di desa cikakak) serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan toleransi umat beragama. Hasil penelitian bahwa kerukunan umat beragama di tempat penelitian sangat baik dilihat dari keharmonisan dan sikap toleransi yang ditunjukkan warganya, serta faktor pendukung adalah kebijakan pemerintah desa, sikap toleransi warga yang tinggi dan kebiasaan turun-temurun sedangkan faktor penghambat adalah munculnya

kelompok apatis yang dibawa masuk melalui propokasi pihak luar. Perbedaan pada metode penelitian yang studi kasus dan subjek yang diteliti.

5. Lely Nisvilyah. Toleransi Antar Umat Beragama dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto) pada tahun 2013. Jurnal terbit. Masalah penelitian adalah keberagaman agama dilingkungan tempat penelitian, penduduk desa yang saling berdekatan rumah, dan tempat ibadah yang berdekatan. Hasil penelitian bahwa toleransi ditunjukkan dalam bentuk interaksi gotong royong desa, memaklumi ketika hari raya, harmonis dalam kegiatan sosial meskipun ada perbedaan pandangan halal dan haram. Perbedaan pada metode penelitian dan subjek yang diteliti.
6. Kholidia Efining Mutiara. Menanamkan Toleransi Multi Agama sebagai Payung Anti Radikalisme (Studi Kasus Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Tali Akrab) pada tahun 2016. Jurnal publikasi. Masalah penelitian banyaknya pengaruh kemunculan sikap radikalisme yang memecah sikap toleransi umat beragama. Hasil penelitian bahwa dalam menanamkan sikap toleransi multi agama sebagai payung antiradikalisme dapat dilakukan dengan memahami hakikat kepercayaan kepada masyarakat, mensosialisasikan dasar hukum yang memayungi toleransi multi agama di Indonesia, mensosialisasikan sikap radikalisme sebagai dasar perusak kerukunan

bangsa, menyusun tata tertib multi agama. Perbedaan pada metode penelitian, proses pelaksanaan penelitian dan subjek penelitian.

7. Hamlan Andi Baso Malla dengan judul “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Humanistik dalam Membentuk Budaya Toleransi Peserta Didik Di SMA Negeri Model Madani Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2017”. Jurnal terbit. Masalah pada penelitian ini kemunculan kelompok radikalisme yang memecah kerukunan beragama dan lingkungan pendidikan yang sering kali disalah gunakan oleh oknum tertentu dalam mempropokasi generasi penerus untuk memiliki sikap apatis terhadap kepercayaannya. Metode penelitian adalah PTK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan sikap toleransi antar umat beragama menunjukkan peningkatan pada siklus ke tiga. Perbedaan penelitian adalah metode yang digunakan PTK, subjek penelitian.
8. Abdul Ghoni. Judul Implementasi Sikap Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Kasus Di Rusunawa Cabean Kota Salatiga) tahun 2013. Jurnal terbit. Masalah penelitian keberagaman agama dilingkungan rusunawa Cabean kota salatiga. Metode penelitian adalah deskriptif studi kasus. Hasil penelitian bahwa sikap toleransi diwujudkan melalui kebijakan rusunawa yang disepakati bersama dalam bentuk saling menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan sebagai dasar kebersamaan. Perbedaan penelitian adalah pada metode studi kasus dan subjek penelitiannya.

9. Imam Tolkhah. Judul “Pendidikan Toleransi Keagamaan: Studi Kasus SMA Muhammadiyah Kupang Nusa Tenggara Timur” tahun 2013. Masalah penelitian adalah keberagaman agama di SMA Muhammadiyah yang berada dilingkungan mayoritas nonmuslim. Hasil penelitian bahwa tergambaran dari hasil studi kasus tentang pengembangan budaya toleransi keagamaan yang berlangsung pada SMA Muhammadiyah Kupang Nusa Tenggara Timur. Perbedaan pada metode penelitian dan lokasi penelitian serta proses yang diteliti.
10. Musrih. Judul pola komunikasi pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama tahun 2017. Masalah penelitian keberagaman agama antar anggota FKUB Kab, Banyumas. Hasil penelitian ini adalah: mendeskripsikan pola komunikasi pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan mendeskripsikan pendapat para tokoh FKUB terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Banyumas yang didasari atas kebijakan organisasi yang mendukung keharmonisan keberagaman beragama. Perbedaan penelitian pada tempat penelitian dan subjek yang diteliti.

### **G. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini ditata dengan kerangka berpikir yang peneliti susun agar kegiatan penelitian terencana dari awal hingga akhir. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yakni penelitian diarahkan untuk meneliti implementasi nilai toleransi, bentuk implementasi nilai toleransi tersebut serta faktor pendukung dan

penghambat terlaksananya implementasi nilai toleransi dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Proses yang diamati dan diteliti adalah bentuk kebijakan internal dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu, Implementasi kebijakan internal tersebut serta aktivitas yang ada dilingkungan Bappeda berkaitan dengan bahasan penelitian ini. Berikut bagan kerangka pikir dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan bagan diatas, dapat diartikan bahwa implementasi nilai toleransi beragama di Bappeda Provinsi Bengkulu dilihat dari kebijakan lembaga tentang toleransi beragama baik kebijakan umum nasional maupun kebijakan khusus yang dikembangkan internal oleh lembaga sebagai panduan dalam implementasi nilai toleransi beragama yang terlaksana. Kebijakan tersebut akan menjadi panduan dan dokumen penting yang akan menjadi data penelitian. Selain melihat kebijakan, peneliti juga akan mencari data mengenai faktor pendukung terlaksananya implementasi nilai toleransi beragama di lembaga Bappeda Provinsi



Bengkulu. Sejauh pengamatan pegawai Bappeda seberapa besar factor pendukung keberhasilan implementasi nilai toleransi beragama. Implementasinya pun juga akan dideskripsikan pada lembaga Bappeda.

### **H. Hipotesis**

Hipotesis adalah rumusan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dengan data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian. Adapun rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu bernilai rata-rata lebih dari 2,5 yang berarti bersifat toleransi aktif

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *sequential explanatory design*. *Sequential explanatory design* dicirikan dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama.<sup>71</sup> Penelitian ini menggunakan model *Sequential Explanatory*, yakni model penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis data kuantitatif pada tahap pertama, kemudian melakukan pengumpulan data dan menganalisis data kualitatif pada tahap kedua, selanjutnya menganalisis data secara keseluruhan untuk kemudian diambil kesimpulan dari analisis data tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kombinasi (*Mixed Methods*) antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 409.

<sup>72</sup> Rulam Almadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media,2014),h.53

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Bappeda Provinsi Bengkulu. Penelitian direncanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni untuk pengambilan data dan dokumen sebagaimana pada tujuan penelitian.

## **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **1. Populasi**

Suharsimi Arikunto memberikan pengertian populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian.<sup>73</sup> Sugiyono, memberikan pengertian tentang popuasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya, populasi bukan hanya orang akan tetapi benda-benda alam yang lain. Selanjutnya ditegaskan bahwa populasi yakni objek atau subjek yang berada dalam satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>74</sup> Artinya populasi dalam penelitian meliputi segala sesuatu yang akan dijadikan subjek atau objek penelitian yang dikehendaki peneliti. Berkenaan dengan penelitian ini maka yang akan dijadikan populasi dalam peneitian ini adalah Karyawan Bappeda Provinsi Bengkulu sebanyak 115 orang.

---

<sup>73</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 108.

<sup>74</sup> Ridwan, *Dasar-Dasar Statistika*, (Bandung:Alfabeta, 2010), h. 8.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>75</sup> Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar dapat diambil antara 10% - 15%, 20% - 25% atau lebih. Peneliti mengambil sampel dengan rumus 15% dari jumlah populasi yakni berjumlah 23 orang karyawan yang dipilih secara heterogen melihat jabatan, kepercayaan dan perannya di Lembaga tersebut.

### **D. Setting Penelitian**

Setting penelitian ini menunjukkan masyarakat yang diteliti sekaligus kondisi fisik dan sosialnya. Dalam penelitian kualitatif, setting penelitian akan menunjukkan lokasi penelitian yang langsung melekat pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. Setting penelitian ini tidak dapat diubah kecuali jika fokus penelitian diubah. Setting penelitian adalah lingkungan, tempat atau kawasan yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian. Setting penelitian kualitatif naturalistik memiliki tiga dimensi, yaitu 1) dimensi tempat, 2) dimensi pelaku, dan 3) dimensi kegiatan. Dimensi tempat penelitian ini dilakukan berada di Bappeda Provinsi Bengkulu. Pelaku dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang akan mencari informasi terkait hal-hal yang dapat menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam instrumen penelitian yang valid. Dimensi kegiatan dalam

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*(Bandung: CV. Alfabeta, 2009). h.85.

penelitian ini berusaha untuk mencari informasi yang valid terkait dengan rumusan masalah yang telah disusun peneliti pada bagian sebelumnya.

## **E. Teknik pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga makna dapat dikonstruksi dalam topik tertentu.<sup>76</sup> Dalam penelitian kualitatif, data yang dapat diambil dalam wawancara telah dideskripsikan dengan berbagai cara seperti format wawancara tidak terstruktur.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan untuk menggali data mengenai Implementasi Nilai Toleransi Beragama Pada Pegawai di Lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Adapun sasaran wawancara adalah kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Pegawai/Staf di Lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan format wawancara terstruktur yang telah dikembangkan dari kisi-kisi instrument penelitian menjadi daftar pedoman wawancara. Adapun format pedoman wawancara terlampir dalam lampiran 3 pada dokumen ini.

### **2. Observasi**

Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu prose yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Nasution mengemukakan bahwa observasi adalah dasar semua

---

<sup>76</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian...*, Hlm 88

<sup>77</sup> Sumadi Suryabrtara, *Metodologi Penelitian...*, h.75

ilmu pengetahuan. Menurut Marshall dalam Sutrisno observasi adalah: *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Berdasarkan pernyataan bahwa melalui observasi, penelitian dapat memperoleh data dengan mempelajari dan memahami perilaku secara langsung. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kegiatan subjek penelitian secara langsung di lapangan. Selain itu, observasi dimaksudkan untuk membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi berupa observasi langsung terhadap kondisi yang terjadi di lapangan subjek penelitian. Dengan demikian, melalui observasi, objek deskripsi individu dalam hubungan mereka yang sebenarnya satu sama lain dan hubungan mereka dengan lingkungan mereka. Pada penelitian ini observasi dilakukan peneliti dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang ditentukan peneliti di lapangan yang berkaitan dengan Implementasi Nilai Toleransi Beragama Pada Pegawai di Lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Pedoman observasi penelitian ini terdapat pada lampiran 4.

### 3. Dokumentasi

Dokumen disini mengacu pada bahan (materials) seperti fotografi, video, film, surat, rekaman kasus kritis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bagian dari studi kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data-data terkait kebijakan yang terkait dengan judul penelitian, seperti Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan peraturan turunan dari lembaga yang terkait dengan penerapan nilai-nilai toleransi beragama. Selain itu, data lain seperti Profil Bappeda, foto-foto ketika pelaksanaan penelitian dan biodata pegawai juga akan menjadi informasi pendukung dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya.<sup>78</sup> Pemilihan dengan model angket ini, didasarkan atas alasan bahwa: (a) responden memiliki waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan, (b) setiap responden menghadapi susunan dan cara pengisian yang sama atas pertanyaan yang diajukan, (c) responden mempunyai kebebasan memberikan jawaban, (d) dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan dari banyak responden dan dalam waktu yang tepat. Melalui teknik mode angket ini dikumpulkan data yang berupa jawaban tertulis dari responden atas sejumlah pertanyaan yang diajukan di dalam angket tersebut.

Dalam pengukuran instrument angket, peneliti menggunakan skala pengukuran yang digunakan dalam mengukur sikap pada penelitian ini adalah *skala likert*. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan *skala likert* mempunyai gradasi sangat positif sampai sangat negative, yang dapat berupa kata-kata dengan tabel skor berikut:

---

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Ketigabelas, (Jakarta: Rineka Purta, 2013), h. 199.

Tabel 3.1 Skala Likert<sup>79</sup>

Pernyataan	Positif	Negative
Sangat setuju / selalu	4	1
Setuju / sering	3	2
Ragu-ragu / kadang-kadang	2	3
Sangat tidak setuju / tidak pernah	1	4

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah untuk memeriksa apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penyelidikan ilmiah dan data yang diperoleh dari tes. Uji validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi pembuktian, kredibilitas, transferabilitas, reliabilitas, dan konfirmabilitas..<sup>80</sup>

Untuk menghitung data dalam penelitian kualitatif sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan pengujian keabsahan data. Uji validitas data yang dapat dilakukan.

### 1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Pengamatan yang diperpanjang dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan observasi berarti peneliti Kembali ke tempat kejadian, amati, dan wawancarai kembali sumber data yang ditemukan dan sumber data yang diperbarui. Perluasan observasi berarti

<sup>79</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h.135.

<sup>80</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta 2007), h.209



hubungan peneliti dengan nara sumber akan lebih terjalin, lebih akrab dan lebih terbuka, akan timbul rasa saling percaya dan informasi yang diperoleh akan lebih lengkap.

Perpanjangan observasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data penelitian, dengan fokus pada pengujian data yang telah diperoleh. Periksa apakah data yang diperoleh dari ke bidang benar atau tidak, dan jika ada perubahan tetap sama. Setelah verifikasi, kembali ke tempat kejadian. Data yang telah diperoleh dapat dijelaskan/benar artinya kredibilitas, dan sejauh mana pengamatan harus diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan ketelitian atau ketekunan secara berkesinambungan sehingga kepastian data dan urutan kronologis kejadian dapat terekam atau terekam dengan baik, sistematis. Meningkatkan akurasi merupakan salah satu cara untuk mengontrol/memeriksa pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Kegigihan peneliti dapat ditingkatkan dengan membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian sebelumnya dan dokumen terkait, serta dengan membandingkan hasil dari penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara ini, peneliti akan lebih berhati-hati dalam menyiapkan laporan akhir yang lebih berkualitas.<sup>81</sup>

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas didefinisikan sebagai

---

<sup>81</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, h.309

memverifikasi data dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, ada triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu

#### 1) Triangulasi Sumber

Untuk memverifikasi kredibilitas data, digunakan untuk memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan, kemudian meminta persetujuan dari ketiga sumber data (member check).

#### 2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda untuk memverifikasi data dari sumber yang sama. Misalnya, data dapat diverifikasi melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Jika teknologi pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda, peneliti selanjutnya akan berdiskusi dengan sumber data yang relevan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

#### 3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

#### 4) Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

#### 5) Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

#### 6) Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

#### 7) *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan

dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggung jawabkan.<sup>82</sup>

#### 8) *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

#### 9) *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar

---

<sup>82</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta 2007)

*confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>83</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategor, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>84</sup>

Pada data kualitatif peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu:

### *1. Data reduction* (Reduksi Data)

Mereduksikan data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

---

<sup>83</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta 2007)

<sup>84</sup> Sumadi. Suryabrtara, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2011) , h. 75

## 2. *Data display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka kegiatan selanjutnya mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## 3. *Conclusion Drawing/ verification* (Penerikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>85</sup>

Pada data kualitatif yang akan mengukur signifikansi implementasi toleransi beragama pada lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu bersifat aktif atau pasif, peneliti menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan tahapan yakni :

### 1. Uji Kualitas Data

#### a. Validitas

Validitas adalah menerangkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat digunakan dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur.<sup>86</sup> Pengukuran validitas angket dilakukan dengan mengkorelasikan skor item masing-masing nomor dengan total skor

---

<sup>85</sup> Sumadi. Suryabrata, *Metodologi Penelitian*,..., h. 75

<sup>86</sup> Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 128.

item, dengan menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment*.<sup>87</sup>

Untuk menghitung validitas alat ukur digunakan rumus *Person Product moment* adalah:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\}\{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

$N$  = jumlah responden

$\sum xy$  = jumlah perkalian x dan y

$(\sum x)^2$  = kuadrat dari jumlah x

$(\sum y)^2$  = kuadrat dari jumlah y

#### b. Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan akurasi, ketepatan dan konsistensi koesioner dalam mengukur variabel.<sup>88</sup> Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur sehingga alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam menguji reliabilitas ini peneliti menggunakan koefisien korelasi keandalan Alpha (*Cronbach`s Alpha*) dengan rumus:/1

$$r_{11} = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right)$$

<sup>87</sup> Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, h. 137.

<sup>88</sup> Duwi Priyatno. *SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data & Penyelsaian Kasus-Kasus Statistik*. (Yogyakarta: Mediakom, 2016), h.60.

dimana :

$r_{11}$  = Reliabilitas instrumen

$k$  = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma^2 =$  Jumlah varians butir /  $1\sigma^2 =$  Varian total

## 2. Uji Asumsi Dasar

### a. Uji Normalitas

Normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam analisis parametrik. Untuk yang menggunakan analisis parametrik seperti analisis perbandingan analisis dua rata-rata, analisis variansi satu arah, korelasi maka perunya dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Syarat yang harus dipenuhi adalah data berdistribusi normal. Normalitas data penting karena dengan data yang berdistribusi normal, maka data tersebut mewakili populasi.

### b. Uji Linieritas

Uji Linieritas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Pengujian pada mss. excel dengan menggunakan *test for linierity* pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dinyatakan mempunyai hubungan yang linier jika signifikansi ( *deviation for linierity* ) lebih dari 0,05.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Duwi Priyatno. *SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data & Penyelsaian Kasus-Kasus Statistik*, h. 44.



### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Normalitas

$D$  adalah jarak vertikal terjauh antara  $F_n(x)$  dan  $F(x)$ . Nilai  $D$  ini selanjutnya dibandingkan dengan nilai  $D^*(\alpha)$  kritis dari sebuah tabel statistik untuk pengujian  $\alpha$ . Berikut rumusnya :

$$D = \max_{1 \leq i \leq N} \left( F(Y_i) - \frac{i-1}{N}, \frac{i-1}{N} - F(Y_i) \right)$$

#### b. Uji t one sampel

Uji-t satu sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi ataupun opini. Karena uji ini hanya melibatkan satu kelompok sampel, kita akan melakukan pengujian nilai rata-rata sampel tersebut terhadap nilai rata-rata pada hipotesis nol.

$$t \text{ hitung} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

$\bar{X}$ : nilai rata-rata sampel

$\mu$ : nilai uji

$S$ : standar deviasi sampel

$n$ : ukuran sampel

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Bappeda Provinsi Bengkulu**

Badan Perencanaan Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu beralamat di Jalur Pembangunan Nomor. 1 Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225. Bersumber pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Fitur Wilayah Kabupaten Bengkulu Peraturan Wilayah Provinsi No 10 Tahun 2013 tentang Pergantian Yang ketiga merupakan Peraturan Wilayah Provinsi Bengkulu No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi serta Tata Kerja Inspektorat, Tubuh Perencanaan Pembangunan Wilayah serta Lembaga Teknis Wilayah dan Peraturan Gubernur Bengkulu No 3 Tahun 2010 tentang Pergantian ketiga atas Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas.

Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Wilayah Provinsi Bengkulu, menyatakan bahwa: melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Visi dan Misi Bappeda Provinsi Bengkulu**

Visi Bappeda diformulasikan dengan mencermati visi Kepala Wilayah yang diresmikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2015- 2021 ialah“ Terwujudnya Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat Serta Berdaya

Saing Besar”.<sup>90</sup> Berdasarkan pada visi Provinsi Bengkulu diatas, visi Bappeda diresmikan sebagai berikut :<sup>91</sup> “ Terwujudnya Sumberdaya Perencana, Pengamatan yang profesional serta terpercaya berbasis kemampuan teknologi dalam menciptakan dokumen perencanaan buat mewujudkan Bengkulu yang Maju, Sejahtera, Bermartabat serta Berdaya Saing”.

Visi tersebut memiliki iktikad kalau Bappeda Provinsi Bengkulu ialah salah satunya Lembaga / Organisasi perencanaan pembangunan wilayah di Provinsi Bengkulu yang dipercaya oleh Pengambil Keputusan (Gubernur) dalam bertugas menyusun serta merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan wilayah Provinsi Bengkulu dan di dukung oleh sumber energi manusia yang profesional serta kompetitif dalam bidangnya buat menciptakan produk rumusan kebijakan perencanaan pembangunan wilayah yang bermutu.

Guna mewujudkan visi tersebut sudah diformulasikan dalam 5 misi antara lain:

- a. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Wilayah Jangka Pendek, Jangka Menengah serta Jangka Panjang yang paham terhadap pergantian serta partisipatif dan berwawasan area.
- b. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penataan, penerapan, pengendalian, penilaian program dan riset pengembangan.
- c. Meningkatkan ilmu pengetahuan serta teknologi buat menunjang terwujudnya e- government.
- d. Meningkatkan sistem penilaian, monitoring, penerapan pembangunan.
- e. Meningkatkan mutu Sumber Energi Manusia dan memenuhi fasilitas serta prasarana kerja.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Dokumen Bappeda Provinsi Bengkulu

<sup>91</sup> Dokumen Bappeda Provinsi Bengkulu

<sup>92</sup> Dokumen Bappeda Provinsi Bengkulu

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu**

Badan Perencanaan Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki tugas melakukan penataan, penerapan, pengendalian serta penilaian kebijakan wilayah dibidang perencanaan pembangunan. Tubuh Perencanaan Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan guna, antara berikut:

- a. Menyusun, mengkoordinasikan serta merumuskan dan melakukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan wilayah;
- b. Melakukan pengendalian serta penilaian terhadap perencanaan pembangunan wilayah lingkup provinsi, antarkabupaten/ kota dalam daerah provinsi; dan
- c. Penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan administrasi universal di bidang perencanaan universal, ketatausahaan, organisasi serta tatalaksana, sumber energi manusia, keuangan, kearsipan, hukum, peralatan serta rumah tangga;

### **4. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu**

Pelaksanaan kerja setiap bagian kepegawaian di lingkungan Bappeda provinsi Bengkulu dalam melakukan tugas pokok serta gunanya dengan baik, Tubuh Perencanaan Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu dilengkapi dengan 1 (satu) sekretariat serta 5 (lima) bidang, sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretaris memiliki tugas pokok melakukan pembinaan administrasi meliputi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, peralatan serta keuangan dan penyusun program. Guna sekretaris selaku pengkoordinasian penataan program aktivitas internal; Pembinaan administrasi menyangkut ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian serta peralatan; Pelayanan teknis serta administratif; Pengkoordinasian penerapan aktivitas Bappeda; Pengelolaan administrasi keuangan. Sekretariat Terdiri Dari:

1) Sub Bagian Umum

Tugasnya ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pengurusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapannya, serta memberikan dukungan teknis dan administratif serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugasnya ialah melakukan menyiapkan bahan dan mengkoordinasi penyusunan perencanaan kegiatan dan laporan, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Keuangan

Tugasnya bertanggung jawab atas penyusunan anggaran belanja dan pengelolaan-pengelolaan keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Bidang Ekonomi

Tugas bidang ekonomi adalah membuat perumusan kebijakan dan melaksanakan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi. Secara umum, fungsi departemen ekonomi adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Fasilitas produksi dan ekonomi:

- 1) Mengkoordinasikan rencana pembangunan daerah untuk departemen produksi dan fasilitas ekonomi yang terkait dengan pertanian, industri, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi dan departemen terkait;
- 2) Inventarisasi masalah yang terkait dengan produksi dan fasilitas ekonomi di bidang perencanaan dan kebijakan ekonomi penanggulangannya
- 3) Dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana tahunan departemen pembangunan ekonomi;
- 4) Mengkoordinasikan usulan kepada pemerintah pusat untuk proyek-proyek yang termasuk dalam rencana tahunan;

Bidang Ekonomi terdiri dari sub bagian bidang tertentu yakni sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Produksi

Bertanggung jawab dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sekaligus pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rencana pengembangan wilayah departemen produksi, serta pemantauan dan evaluasi, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan..

2) Sub Bidang sarana Perekonomian

Bertanggung jawab dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sekaligus pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah bidang sarana ekonomi, serta pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan lainnya. tugas. ditugaskan oleh atasan.

c. Bidang Sosial Budaya

Tugas pokok dari Bidang Sosial Budaya Bappeda adalah melaksanakan perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah di bidang sosial budaya. Fungsi bidang sosial budaya adalah sebagai berikut::

- 1) Mengkoordinasikan rencana pembangunan di bidang sosial budaya dan ideologi politik ekonomi pertahanan dan keamanan negara;
- 2) Perencanaan sosial budaya dan ideologi politik, pemecahan masalah di bidang ekonomi pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Koordinasi perumusan ideologi sosial budaya dan rencana tahunan politik ekonomi pertahanan dan keamanan negara;

- 4) Perencanaan dan koordinasi antar dinas, unit organisasi lain di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten/kota, lingkungan , dan instansi yang berada di Provinsi Bengkulu;
- 5) Koordinasi rencana anggaran pendapatan belanja provinsi dan daerah dengan Biro Keuangan dan koordinasi dengan sekretariat provinsi dan daerah;
- 6) Tindak lanjut pelaksanaan rencana pembangunan untuk perbaikan lebih lanjut;

## 5. Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Bengkulu

Komposisi berdasarkan jenis kelamin pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu berjumlah 115 orang. Terdapat 58 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 57 orang pegawai berjenis kelamin perempuan. Hal ini menandakan bahwa rasio jenis kelamin pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu berimbang. Secara lebih rinci mengenai rasio pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel komposisi gender pegawai Bappeda di Provinsi Bengkulu berikut :

**Tabel 4.1 Komposisi gender pegawai Bappeda di Provinsi Bengkulu**

No	Bidang	Jenis Kelamin (Orang)		Total (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretaris	22	11	33
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	8	10	18
3	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6	10	16
4	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	11	17
5	Infrastruktur dan Kewilayahan	8	9	17
6	Penelitian dan Pengembangan	8	6	14
Total (Orang)		58	57	115
Presentase		50,43	49,57	100,00



Sumber : Dokumen Bappeda 2021<sup>93</sup>

Selain itu, data pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2 Jumlah pegawai dan tingkat pendidikan Bappeda di Bengkulu**

No	Bidang	Pendidikan (Orang)							Total
		SD	SLTP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretaris				3	16	11		33
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2	11	5		18
3	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam				1	7	8		16
4	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1		10	5	1	17
5	Infrastruktur dan Kewilayahan					11	6		17
6	Penelitian dan Pengembangan					10	4		14
<b>Total (Orang)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>115</b>
<b>Presentase</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,48</b>	<b>5,22</b>	<b>56,52</b>	<b>33,91</b>	<b>0,87</b>	<b>1,00</b>

Sumber : Dokumen Bappeda 2021<sup>94</sup>

Data tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 115 orang pegawai yang bekerja di Bappeda Provinsi Bengkulu, hanya ada 1 orang yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA dan tidak ada pegawai yang tingkat pendidikan SLTP dan SD. Kuota tertinggi diduduki oleh tamatan pendidikan Strata 1 yakni 65 orang yang kemudian diikuti oleh tamatan Strata 2 sebanyak 39 orang serta hanya ada 1 orang yang sudah mencapai pendidikan Strata 3 atau Doktoral. Artinya dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di Bappeda Provinsi Bengkulu telah mencapai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain data tingkat pendidikan, peneliti juga

<sup>93</sup> Dokumen Bappeda Provinsi Bengkulu tentang Kepegawaian

<sup>94</sup> Dokumen Bappeda Provinsi Bengkulu tentang Kepegawaian

memperoleh data kelompok atau jajaran staf di struktur Bappeda Provinsi Bengkulu. Tabel 4.3 Susunan kelompok pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu Berdasarkan Agama**

No	Agama	Tempat Ibadah	Total
1	Islam	Masjid	109
2	Protestan	Gereja	6
3	Katolik	Gereja	0
4	Hindhu	Pura	0
5	Buddha	Vihara	0
6	Khonghucu	Klenteng/Lintang	0
<b>Total</b>			115

Sumber : Dokumen Bappeda 2021<sup>95</sup>

Berdasarkan data tabel kepangkatan atau agama pegawai di atas, maka didapat kesimpulan bahwa dominan agama pegawai terbanyak adalah pada Agama Islam yang berjumlah 109 orang dengan nilai presentase 95% dari total keseluruhan pegawai yang ada di lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Makna nilai toleransi beragama

Sebelum peneliti mendeskripsikan lebih lanjut perihal implementasi nilai toleransi beragama yang terjadi di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu, terlebih dahulu peneliti mengumpulkn informasi dari beberapa narasumber dari kalangan yang berbeda-beda terkait pemaknaan

---

<sup>95</sup> Dokumen Bappeda Provinsi Bengkulu tentang Kepegawaian

individu terhadap toleransi itu sendiri. Menurut Kepala Bappeda<sup>96</sup> menyikapi perihal pemaknaan pribadi terkait toleransi adalah sikap rela atau ikhlas dalam menerima perbedaan pandangan. Bentuk tindakannya bisa dimunculkan dengan perilaku tidak memaksakan diri untuk menjadi atau memahami sudut pandang orang lain maupun sebaliknya memaksakan orang lain untuk memahami sudut pandang kita sendiri. (13 Juli 2021)

Informasi lainnya diperoleh dari bagian lain yang merupakan staf pada lembaga Bappeda. Menurut Informan X bahwa toleransi adalah sikap yang dapat ditunjukkan seseorang dalam bentuk perilaku kesehariannya, seperti menghormati perbedaan, menghargai keberagaman dalam berbagai hal. Dilanjutkan oleh informan lainnya yang merupakan pemeluk agama minoritas di lingkungan Bappeda bahwa untuk sampai pada taraf mengimplementasikan nilai toleransi, terlebih dahulu individu harus memaknai sepenuhnya apa itu toleransi, sebab mengimplementasikan toleransi hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas menerima keberagaman yang ada.<sup>97</sup> (19 Juli 2021)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai pemaknaan informan mengenai makna toleransi bahwa toleransi itu merupakan sebuah wujud penerimaan hati atau keikhlasan afeksi seorang individu dalam mengakui keberagaman yang ada dilingkungan sekitarnya. Untuk mampu mengimplementasikan nilai toleransi tersebut, setiap orang harus

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara, Bappeda pada 13 Juli 2021

<sup>97</sup> Hasil wawancara, Bappeda pada 19 Juli 2021

mengetahui dan memahami makna toleransi tersebut terlebih dahulu kemudian barulah mampu dalam mengimplementasikannya. Dalam implementasi pun tentunya harus mempunyai arahan atau pedoman dalam bersikap toleransi, sebab keberagaman penafsiran orang lain terhadap perilaku yang kita tunjukkan belum tentu dapat terbaca sebagai wujud dari toleransi. Untuk itu, selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan implementasi nilai toleransi beragama khususnya yang telah diwujudkan dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu melalui data-data dibawah ini.

## **2. Impelemntasi nilai toleransi beragama**

### **a. Kebijakan Implementasi nilai toleransi beragama**

Berdasarkan data yang didapat dalam penelitian ini, bahwa sejauh ini tidak terdapat kebijakan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan atau implementasi nilai toleransi beragama. Hal ini disimpulkan atas hasil wawancara dengan narasumber  $X_1$  mengenai apakah terdapat keberadaan kebijakan khusus di lembaga Bappeda terkait implementasi nilai toleransi beragama?, sesuai yang beliau jelaskan bahwa dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu telah terimplementasi dengan baik. Kategori terlaksana dengan baik tersebut adalah sejauh ini belum pernah ditemukan konflik ataupun permasalahan yang berhubungan dengan keragaman umat beragama.(13 Juli 2021)

Meskipun demikian, pada kenyataannya implementasi nilai-nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu berjalan secara alamiah sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh

adanya kebiasaan yang telah menjatidiri oleh setiap individu khususnya yang bekerja di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Kebiasaan ini merupakan hal yang sangat lazim dilakukan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari mengingat status sebagai makhluk sosial serta berperan sebagai warga negara indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi termasuk didalamnya adalah toleransi beragama.

Terkait tidak adanya kebijakan khusus tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa keberhasilan implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Lembaga Bappeda disebabkan oleh factor para pegawai merupakan masyarakat yang taat hukum, tentunya karyawan Bappeda juga berpayung pada dasar negara yakni Pancasila. Hal inilah yang diyakini menjadikan kondisi terkendali. Karena dapat dipastikan sejauh belum ada konflik atau hal-hal yang perlu dispesifikasikan maka kami rasa belum perlu menyusun turunan kebijakan mengenai nilai toleransi beragama di lembaga ini.

Informasi yang ditemukan peneliti atas wawancara dengan informasn X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> mengenai kepastian kebijakan secara lisan maupun tulisan kepada unsur karyawan bahwa sejauh ini belum pernah melihat ataupun disuguhi edaran terkait hal tersebut, dan saya rasa memang belum ada. Berkaitan dengan tidak ada kebijakan khusus atau kebijakan turunan tersebut ada tanggapan dari pimpinan Bappeda Provinsi Bengkulu yang memastikan belum ada proses-proses perencanaan pengembangan kebijakan tentunya. Sehingga hal ini juga menandakan

bahwa tidak ada proses evaluasi terhadap implementasi maupun terhadap kebijakan tersebut.(12 Juli 2021)

Berkaitan dengan simpulan hasil penelitian diatas, peneliti menemukan informasi terkait kebijakan lisan berupa arahan pernah ada disampaikan oleh pimpinan pada momen-momen tertentu. Selain lisan, gestur juga terlihat dengan perilaku menjaga jarak dan menghormati umat muslim yang menjaga wudhu juga tampak ada. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa setiap individu di Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu memang memegang tegus nilai nasionalis. Peneliti juga dapat memastikan tidak adanya kaum fanatik agama, ras, suku dan lainnya yang bekerja di lingkungan Bappeda ini. Karena menurut informasi yang didapat bahwa sistem *team work* sangat erat dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Tidak ada pemisahan-pemisahan terkait hal-hal tertentu termasuk didalamnya keragaman agama. Dapat dipastikan kepada setiap orang yang mampu bekerja dalam tim yang dapat bertahan bekerja dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu ini.

Berdasarkan beberapa informasi yang didapat diatas, didapat disimpulkan bahwa keberadaan pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu tentunya tidak terlepas dari kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta menjalankan kehidupan nasionalisme termasuk didalamnya toleransi beragama. Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah yakni Perpres No. 18 tahun 2020

tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah untuk tahun 2020-2024.<sup>98</sup> Didalam kebijakan tersebut tertuang hal-hal yang menyangkut tentang modernisasi beragama. Hal ini dirasa sangat berpengaruh dan dapat dikatakan merupakan induk dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai keagamaan di Indonesia ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa selain memang melekat dalam jati diri masyarakat Indonesia, secara khusus pemerintahan pusat pun mengeluarkan peraturan turunan dari pasal-pasal tersebut.

Informasi lanjutan mengenai kebijakan umum nasional adalah adanya Perpres (Peraturan Presiden) No 18 Tahun 2020 yang secara umum menjurus langsung pada ASN di Indonesia. Hal khusus yang disinggung adalah mengenai modernisasi atau toleransi beragama ini tadi. Karena target atau sasaran Perpres ini memang ke Aparat Sipil Negara dulu yang wajib mematuhi peraturan baru. Artinya bahwa ASN memang pada kenyataannya bekerja untuk Negara. Artinya wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh negara ini, begitupun karyawan di lingkungan Lembaga-lembaga seperti Bappeda. Mengingat spesifiknya perincian peraturan-peraturan umum baik Perpres, UU dan lainnya inilah yang membuat Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu sampai saat ini belum perlu menurunkan kebijakan Internal termasuk berkaitan dengan hal implementasi toleransi beragama. Karena pada dasarnya salah satu wujud toleransi beragama adalah dengan menjalin

---

<sup>98</sup> Perpres No. 18 tahun 2020 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah untuk tahun 2020-2024

dan mempererat hubungan antar umat beragama serta menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.<sup>99</sup>

Menurut Narasumber X<sub>1</sub> berkaitan dengan belum adanya turunan kebijakan internal atau khusus dari Perpes No. 18 tahun 2021 ini, dikuatkan oleh argumen narasumber penelitian bahwa untuk cakupan Negara memang dirasakan perlu adanya pedoman, agar jika ditemukan konflik dapat diselesaikan dengan hukum. Keragaman negara tentunya tidak seluas keragaman yang ada dalam suatu lembaga pemerintahan. Jika nantinya ditemukan permasalahan terkait hal tersebut, aturan yang negara tetapkan dapat dijadikan pedoman juga dalam pemecahannya<sup>100</sup>.

Artinya dapat disimpulkan bahwa kebijakan umum dari implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu adalah dasar Negara yakni UUD 1945, pasal 29 beserta ayat-ayatnya serta Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah tahun 2020-2024 beserta lampiran-lampirannya. Namun hal tersebut tidak secara tertulis terdokumenkan oleh Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu. Hanya diketahui secara bersama dan diamalkan secara bersama oleh seluruh masyarakat yang bekerja di Lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu.

Kebijakan umum ini yang menjadi pedoman terlaksananya nilai toleransi beragama di Lingkungan Bappeda. Selain itu dapat dipastikan oleh peneliti bahwa belum ada turunan kebijakan baik dari UUD 1945

---

<sup>99</sup> Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama: Dinamika Merebut Makna*. (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), h.214

<sup>100</sup> Hasil wawancara, Bappeda pada 19 Juli 2021



maupun Perpres No.18 Tahun 2020 menjadi kebijakan khusus yang berkaitan dengan toleransi beragama.

Bahkan hal kecil seperti SOP maupun edaran khusus mengenai implementasi toleransi beragama juga belum pernah disusun dan dikeluarkan oleh Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dikarenakan tidak pernah ada kebijakan khusus mengenai toleransi beragama di Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu, maka tidak ada proses dan tahapan perencanaan pengembangan kebijakan dan tidak juga ada tahapan evaluasi dari kebijakan. Semua berjalan alamiah serta belum pernah ditemui kasus kecil ataupun besar berkaitan dengan konflik keberagaman.

#### **b. Implementasi nilai toleransi beragama**

Setelah peneliti melakukan penelitian dilokasi penelitian baik berupa wawancara, dokumentasi maupun observasi maka didapatkan informasi yang disimpulkan bahwa implementasi nilai toleransi beragama terjadi di Bappeda Provinsi Bengkulu tidak melalui proses perencanaan dan evaluasi. Hal ini diinformasikan oleh informan X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> mengenai bentuk implementasi nilai toleransi beragama yang telah berjalan dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu sejauh ini?, yakni bahwa informan memastikan pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Bengkulu nilai toleransi beragama ini sudah tertanam sebagaimana mestinya pada individu pegawai. Hal ini menandakan

bahwa perencanaan dari implementasi nilai toleransi ini memang murni karena unsur internal setiap individu. Namun ada beberapa perlakuan khusus ditemukan pada kegiatan tertentu seperti bulan ramadhan. Ada penjadwalan kegiatan yang mengikuti waktu tertentu karena umat muslim berpuasa. Akan tetapi hal ini juga umum dilakukan diseluruh lembaga di Indonesia. Kemunduran waktu apel pagi yang biasanya pada pukul 08.00 akan dimundurkan 15 (lima belas) menit dari biasanya, atau percepatan pada waktu apel sore 15 (lima belas) menit lebih cepat.( 12 Juli 2021)

Dari segi pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama, didapatkan informasi hanya ada beberapa kaum non muslim dan mayoritas muslim sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan agama selalu ada sikap-sikap toleransi yang tinggi dari kaum minoritas kepad mayoritas. Belum pernah ada sikap diskriminasi yang ditunjukkan oleh kaum mayoritas. Terkait implementasi nilai toleransi beragama dilingkungan Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu bahwa implementasi nilai toleransi berjalan dengan baik dapat dievaluasi dari keberhasilan tim dalam menjalankan tugasnya dengan anggota tim yang memiliki keragaman agama. Jadi implementasi bisa ditunjukkan dengan kesamaan pemberian tugas, penggunaan pakaian yang tidak mendiskriminasi salah satu agama atau pun sebaliknya, kerja tim yang

tidak memandang perbedaan termasuk agama ya, itu merupakan implementasi dari nilai toleransi beragama.” (13 Juli 2021) <sup>101</sup>

Terkait dengan apa saja faktor pendukung berjalan dengan baiknya implementasi nilai toleransi beragama?, menurut Sekretaris Bappeda bapak X<sub>2</sub> dan ditambahkan oleh X<sub>5</sub> bahwa “ beberapa faktor pendukung implementasi ini adalah dengan adanya sikap saling menghargai dan saling menghormati. Toleransi beragama dapat ditunjukkan dengan sikap menghargai dan menghormati tersebut misalnya pada kegiatan hari-hari besar umat masing-masing, kebiasaan-kebiasaan dalam suatu agama dan terhadap larangan-larangan yang memang diimani oleh suatu agama tersebut, selain itu rasa Nasionalisme yang tinggi dalam diri teman-teman semua” <sup>102</sup> (17 Juli 2021)

Selama ini belum terlihat bentuk pelanggaran, atau laporan dan temuan mengenai pelanggaran nilai toleransi di lingkungan Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu termasuk pelanggaran toleransi beragama. Toleransi terhadap perbedaan. Karena pada prinsipnya para ASN dan karyawan diminta untuk kerja tim dan mampu meminimalisir perbedaan yang ada, bukan membesarkan keberagaman apalagi sampai menumbulkan konflik baru. Wujud implementasi toleransi beragama diwujudkan para pegawai seperti menahan diri untuk sama-sama tidak menyinggung atau menjadikan bahan candaan perbedaan agama tersebut. Sebab untuk kapasitas negara kita yang memiliki tingkat keberagaman

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara Bappeda, pada 13 Juli 2021

<sup>102</sup> Hasil wawancara Bappeda pada 17 Juli 2021

yang sangat tinggi serta keberadaan unsur keagamaan mayoritas beragama Islam, namun toleransi tetap menjadi agenda pertama dan sangat penting dalam kehidupan<sup>103</sup>.

Implementasi nilai toleransi beragama dapat juga terlihat berdasarkan pengamatan bahwa tidak ada pemaksaan penggunaan pakaian atau seragam. Tidak ada peraturan yang mendiskriminasi atau kewajiban penggunaan atribut keagamaan seperti jilbab atau pun pemaksaan menggunakan. Selanjutnya kegiatan-kegiatan keagamaan tidak dipaksakan untuk semua karyawan khususnya yang berlainan agama. Namun dibalik tidak ada pemaksaan untuk mengikuti tetapi tetap terbuka bagi yang ingin berkontribusi diri diperbolehkan sewajarnya. Artinya dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai toleransi beragama dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, tindakan, gaya berpakaian, pembicaraan.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai toleransi beragama telah berjalan dengan baik di lingkungan Bappeda. Namun terlaksana baik tersebut sejauh ini tanpa ada perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaannya tidak terdokumenkan dalam bentuk kebijakan dan aturan tertulis.

Bentuk implementasi nilai toleransi beragama diwujudkan dalam bentuk kesamaan kedudukan hak dan kewajiban pegawai Bappeda

---

<sup>103</sup> Abdullah Maskuri, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), h.56

Provinsi Bengkulu dalam segala hal. Aturan hak dan kewajiban diatur atas dasar Tupoksi dan Jobdisk masing-masing bagian, bukan atas perbedaan dan persamaan. Faktor pendukung dari pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu ini adalah sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, akhlak dari setiap individu, kewajiban sebagai warga Negara Indonesia dan jati diri Nasionalisme. Hal-hal tersebut menjadi poin penting dan alasan terlaksananya implementasi nilai toleransi beragama dengan baik walau tanpa pengawasan kebijakan dan evaluasi pelaksanaannya. Ditengah tingginya jumlah kaum mayoritas, namun tetap minim perselisihan terkait hal-hal yang berbau pelanggaran toleransi beragama. Hal ini disebabkan oleh faham kaum mayoritas terhadap keberadaanya ditengah keberagaman adalah Islam melarang permusuhan dan menyebarkan kebencian di antara manusia, tetapi Islam mengajarkan untuk bersikap toleran dan menghormati agama lain.<sup>104</sup>

### **c. Perilaku Toleransi Beragama**

Perilaku toleransi beragama berdasarkan berdasarkan instrument terdiri dari 3 indikator, yakni menghormati perbedaan agama, tidak membedakan sikap kepada yang berlainan agama, dan menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya. Berikut ini hasil penelitian yang didapat peneliti dari narasumber yang ada :

---

<sup>104</sup> M. Quraish, Shihab, *Islam yang saya anut (Dasar ajaran islam)*, (Tangerang : Lentera Hati, 2017), h 14

### 1) Menghormati Perbedaan Agama

Perilaku menghormati perbedaan agama di lingkungan lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terlaksana dengan sangat baik sebagaimana yang diharapkan. Sejauh ini belum ada perilaku-perilaku yang mencerminkan konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama. Menurut Kepala Badan Bappeda Provinsi Bengkulu selaku informan X<sub>1</sub> dan dilanjutkan oleh X<sub>3</sub> menyampaikan informasi bahwa “himbauan dengan rekan dan sraf bahwa pada penganut kepercayaan agama di lingkungan Bappeda harus ada sikap saling menghargai dan menghormati terhadap sesame. Hal ini wajib baik kaum mayoritas kepada kamu minoritas dan sebaliknya”<sup>105</sup>.(12 Juli 2021)

Kerja tim yang menjadi landasan adalah kerja sama bukan perbedaan yang menjadi fokusnya. Artinya saling menghormati tersebut harus terus ditingkatkan dalam upaya kerukunan di lingkungan kerja. Prinsipnya kemauan dalam bekerja serius sesuai tugas dan kewajiban akan menjadi landasan bagi pimpinan dalam menilai kinerja karyawan di Lembaga Bappeda. Beberapa perbedaan keyakinan di lingkungan Bappeda tentu sudah saling menghormati dan menyadari keragaman tersebut. Sehingga muncullah sikap yang tidak membeda-bedakan perlakuan berdasarkan perbedaan agama masing-masing individu. Perlakuan yang adil baik dari atasan terhadap bawahan maupun sesama tim atau staf yang bekerja.

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Isnain Fajri, S.Sos, M.Kes pada 12 Juli 2021

Bentuk perilaku dari implementasi nilai toleransi beragama juga terlihat dengan tidak memaksakan ajaran agama masing-masing kepada individu lain yang berlainan agama dengan kita. Ketika setiap individu menyadari keberadaan etika dalam dirinya harus ditegaskan maka akan menjadikan keharmonisan dalam interaksi di lingkungan. Etika menurut Al-Munawar adalah: pertama, saling menerima, masing-masing subjek menerima subjek lain dengan segala keberadaannya, dan tidak menurut kehendak dan kehendak subjek pertama. Dengan pengertian, setiap kelompok agama menerima kelompok agama lain, tanpa memperhitungkan perbedaan, kelebihan atau kekurangan.<sup>106</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dilihat dapat disimpulkan bahwa bentuk menghormati perbedaan agama di lingkungan diwujudkan dengan sikap, baik menghargai, menghormati, tidak memandang perbedaan dari sisi agama atau kepercayaan namun pada kemampuan kerjanya. Di Lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu ini tidak ada kebiasaan yang memusatkan pada perbedaan termasuk perbedaan agama. Segala sesuatu dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi bagian masing-masing.

## 2) Tidak Membedakan Sikap kepada yang Beragama Lain

Bentuk tidak membedakan sikap kepada teman-teman yang berbeda agama di lingkungan Bappeda pada tempat penelitian didapatkan informasi dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang

---

<sup>106</sup> M. Najir, A. *Tafsir Kebangsaan Cinta Tanah Air, Toleransi dan Bela Negara dalam al-quran*. (Tangerang Selatan : El-Bukhari, 2021), h.118

menganut kepercayaan minoritas bahwa tanggapan terhadap kondisi berbeda di lingkungan kerja sangat wajar. Sebab perihal agama itu HAM (Hak Asasi Manusia) bagi setiap individu yang telah diatur juga oleh dunia. Artinya perbedaan keyakinan adalah hak setiap orang yang tinggal di Negara Indonesia.<sup>107</sup>(10 Juli 2021). Salah satu sikap yang dapat meminimalisir perpecahan ditengah perbedaan keyakinan dalah saling percaya, karena pada kenyataannya salin percaya adalah kenyataan dan pernyataan saling menerima. Kendala utama dalam menjaga keharmonisan sosial adalah ketika rasa saling percaya hilang dan digantikan dengan saling prasangka dan saling curiga.<sup>108</sup>

Dukungan informasi mengenai kondisi ini diimplementasikan dengan bersikap sewajarnya pada perbedaan. Yang mana sesungguhnya harus adanya sikap positif dan saling mendukung dalam menalani keiimaan masing-masing individu. Pasti akan ada perbedaan mendasar terkait pemahaman agama masing-masing. Menanggapi hal perbedaan tersebut setiap individu haruslah meramunya menjadi sebuah keunikan dan kebersamaan yang indah dalam lingkungan kerja. Artinya dengan menjunjung tinggi sikap yang telah dipaparkan diatas maka tidak akan ada masalah, sepanjang masing-masing menjunjung tinggi dan menghormati satu sama lain”.<sup>109</sup>

Terkait perihal sikap menghargai terhadap teman yang beragama lain ini juga. Peneliti menemukan informasi dari hasil pengamatan bahwa

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara Bappeda pada 10 Juli 2021

<sup>108</sup> M. Quraish, Shihab. *Islam yang saya ...*, h.29

<sup>109</sup> Hasil wawancara Bappeda 12 Juli 2021



belum pernah terlihat situasi ketidakharmonisan pegawai dilingkungan kerja Bappeda Provinsi Bengkulu ini atas adanya perbedaan, baik itu perbedaan agama maupun yang lainnya. Semua berjalan dengan rukun. Pada momen perjalanan dinas dalam atau luar kota dengan teman yang berbeda agama pun semuanya juga tidak ada laporan yang tidak diinginkan. Baik agama Muslim maupun Non muslim tidak ada arahan atau amanah terkait bagaimana bersikap atau tindakan yang harus dan tidak harus dilakukan. Menurut informasi wawancara bahwa semua sudah berpendidikan dan tentunya menanamkan nasionalisme sebagai warga Negara.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai sikap yang ditunjukkan dengan teman yang berbeda agama maka dapat disimpulkan bahwa sikap yang ditunjukkan berupa sikap positif, memberikan kebebasan karena hal perbedaan merupakan keunikan yang dapat dibanggakan di Negara Indonesia.

b. Menghargai Teman yang Menjalankan Kewajiban Beragamanya

Berdasarkan data yang didapat dilapangan saat peneliti melakukan penelitian, bahwa pimpinan di lembaga Bappeda sejauh ini selalu memberikan dukungan atas semua kegiatan keagamaan sejauh tidak mengganggu pekerjaan atau tupoksi yang ada. Hal paling terpenting adalah setiap individu memahami sikap yang selayaknya mereka tunjukkan ketika berinteraksi, artinya faktor utama implementasi nilai

toleransi beragama berjalan dengan baik adalah tumbuhnya sikap. Dasar keyakinan di atas didasarkan pada keyakinan bahwa tidak benar adanya orang atau kelompok yang memaksakan kehendaknya sendiri pada orang atau kelompok lain.<sup>110</sup>

Karena pembiasaan dalam diri manusia itu sangat diperlukan dalam masalah ini. Perilaku toleransi yang ditunjukkan dari para pegawai yang menginformasikan bahwa kondisi-kondisi rapat yang berkenaan dengan jadwal shalat maka diizinkan bagi penganut kepercayaan untuk menjalankan shalat atau akan disepakati oleh semua peserta rapat. Selain itu misalkan rapat dihari minggu, maka kita menghargai non muslim menjalankan ibadah terlebih dahulu dengan memberikan jadwal yang tidak bertepatan dengan jadwal ibadah mereka. Artinya tidak ada yang dirugikan.

Contoh lain misalnya pada momen hari raya idul adha, tidak ada sikap yang menunjukkan yang acuh terhadap agama lain. Begitupun hak mereka atas daging kurban nanti akan itu dilibatkan mendapatkan daging dan lain sebagainya. Disisi kaum Minoritas misalnya ketika awal tahun atau akhir tahun umat agama non muslim meminta izin cuti oleh pimpinan diberikan, itu merupakan salah satu contohnya.

Informasi karyawan yang mengaut agama minoritas, bahwa tidak pernah ada bentuk deskriminasi. Non muslim pun akan melakukan sikap menghargai dan menghormati. Contohnya ketika berpuasa, mereka akan

---

<sup>110</sup> M. Imadadun Rahmat, *Isl am Pribumi Mendialogkan Agama...*, hlm.21

bertanya atau izin terlebih dahulu untuk merokok. Kegiatan yang dilarang bagi agama mayoritas akan dilakukan pada tempat yang menjauhi keramaian.

Faktor pendukung berjalan dengan baiknya proses implementasi nilai toleransi beragama adalah adanya akhlak, toleransi dari pendidikan dasar dan ajaran agama merupakan factor pendukung terlaksananya implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu.

Dari segi agama minoritas pun atau dalam hal ini non muslim, peneliti mendapatkan informasi dari X<sub>6</sub> bahwa beliau menuturkan “tidak ada paksaan yang mengharuskan melakukan kegiatan rapat atau persiapan-persiapan iven penting yang memerlukan lembur diwaktu luar jam kerja opsional biasa seperti hari minggu, maka akan memberikan kesepakatan kegiatan dimulai ketika jam ibadah agama mereka selesai. Hal ini juga merupakan bentuk menghormati hak mereka dalam menjalankan kewajiban beragama”<sup>111</sup>(12 Juli 2021)

Berdasarkan beberapa uraian informasi yang peneliti temukan dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dari menghargai teman yang sedang menjalankan kewajiban beribadah merupakan hal yang sudah terinternalisasi bagi Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu. Hal ini dilihat dari kebiasaan seluruh pegawai yang saling mendukung teman-temannya dalam menjalankan ibadahnya tanpa melihat perbedaan.

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara pada 12 Juli 2021

Baik agama mayoritas maupun minoritas semua menunjukkan bahwa keyakinan adalah hak mutlak. Sehingga dapat dipastikan tidak adanya perilaku yang akan merusak kerukunan beragama dengan tindakan menghalang-halangi atau melarang orang lain untuk menjalankan kewajiban kepercayaannya sebagai umat beragama.

**d. Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di Bappeda Provinsi Bengkulu mengenai implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Lembaga Bappeda dijabarkan pada bagian ini. Menurut salah satu narasumber yang juga penganut kepercayaan non muslim atau penganut kepercayaan minoritas di lingkungan Bappeda bahwa respon masyarakat di lingkungan Bappeda dalam menanggapi perbedaan agama baik, tidak ada diskriminasi atau pun perbedaan yang dialami oleh penganut agama minoritas atas kegiatan menjalankan agama ataupun pemberian pekerjaan atau menjalankan kewajiban.

Atas implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu yang telah terlaksana baiknya menimbulkan manfaat seperti kenyamanan, rasa bebas, rasa aman, tidak tertekan, tidak merasakan sakit hati karena diskriminasi dan rasis. Sejauh ini tidak ada kritik mengenai pelaksanaan nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda, karena sejauh ini tidak ada masalah. Artinya kebiasaan yang

berjalan di Bappeda ini baik dilanjutkan dan dipertahankan. Sejauh ini juga dirasakan dilapangan belum ditemukan respon negatif masyarakat terkait dengan adanya perbedaan agama dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Untuk pihak-pihak yang dirasa tidak mentoleransi keberagaman ada pada pribadi individu itu sendiri, maksudnya adalah pandangan mereka dalam menjalani kehidupan. Namun karena di Negara kita menganut Pancasila, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Apalagi kita yang bekerja di bawah naungan pemerintahan bukan swasta. Wajib memberikan contoh yang baik. Tidak akan terjadi apa-apa, saling menghormati antar sesama manusia jika tidak saling memahami. Saling anti dan saling membenci, saling memperebutkan pengaruh merupakan salah satu akibat dari kurangnya saling pengertian dan saling menghormati.<sup>112</sup>

Dalam proses pengimplementasian nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu tidak membutuhkan persiapan khusus, sebab pelaksanaan implementasinya berjalan secara alamiah sebagaimana terjadi di lingkungan masyarakat social. Faktor pendukung lain dalam keberhasilan implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda tidak lepas dari pemahaman masyarakat Indonesia akan keberagaman bangsa yang sudah sejak 76 tahun yang lalu. Prosesnya melalui pendekatan, misalnya pada kegiatan keagamaan pada suatu penganut. Ada pendekatan kepada pihak lainnya, begitu juga

---

<sup>112</sup> M. Imadadun, *Islam Pribumi Mendialogkan Agama...*, hlm.21

sebaliknya. Sehingga ada bentuk dukungan yang diberikan oleh penganut agama lainnya terhadap pelaksanaannya.

Secara konsep, implementasi ini terjadi dikarenakan tingginya sikap saling menghargai persamaan maupun perbedaan serta saling menghormati kepada individu lain, sehingga sejauh ini tidak ada konsep dan metode khusus yang perlu disusun oleh unsur pimpinan khususnya dalam jalannya konsep nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Berkaitan dengan apa factor pendukung khusus implementasi nilai toleransi beragama? Menurut informan X<sub>2</sub> bahwa “Factor pendukung keberhasilan dari implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda yakni dengan selalu saling mengingatkan, memupuk rasa kebersamaan dan persaudaraan, tidak pernah memutuskan tali silaturahmi, sehingga dengan sendirinya hubungan baik antar manusia antar personal itu selalu berjalan dengan baik. Sehingga otomatis demikian rasa saling menghormati dan toleransi beragama antar masing-masing itu tumbuh dengan baik”<sup>113</sup>. (14 Juli 2021).

Keberhasilan dan bentuk prestasi yang diraih dalam bentuk kecil di Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terkait implementasi nilai toleransi beragama yakni seperti pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang berjalan dengan baik. Seperti pada bulan ramadhan adanya kegiatan buka bersama, semua ikut tanpa terkecuali.

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara Bappeda pada 14 Juli 2021

Sehingga muncul manfaat-manfaat yang luar biasa dapat dirasakan setiap individu adalah kuatnya ikatan persaudaraan, kerukunan dalam organisasi, rasa persatuan itu sudah menjadi manfaat yang dapat dirasakan.

Berdasarkan data-data penelitian yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap perbedaan agama sangat positif, sebab perilaku toleransi beragama sudah tertanam dalam diri individu di lingkungan Bappeda sehingga sejauh ini tidak pernah ditemui perilaku yang bertentangan dengan konsep nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu.

### 3. Kategorisasi Implementasi Nilai Toleransi Beragama

Berdasarkan hasil sebaran angket yang mengukur sifat toleransi beragama bagi karyawan Bappeda Provinsi Bengkulu terlihat bahwa para pegawai Bappeda menjalai proses toleransi dengan disiplin dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil rekapitulasi sebaran angket toleransi beragama :

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Data Angket**

No	SAMPEL	Rata-Rata	Ket.
1	Responden 1	4,1	Aktif
2	Responden 2	3,3	Aktif
3	Responden 3	4,1	Aktif
4	Responden 4	4,3	Aktif
5	Responden 5	4,0	Aktif
6	Responden 6	3,9	Aktif
7	Responden 7	3,8	Aktif

8	Responden 8	4,0	Aktif
9	Responden 9	2,4	Pasif
10	Responden 10	4,2	Aktif
11	Responden 11	2,8	Pasif
12	Responden 12	4,1	Aktif
13	Responden 13	4,1	Aktif
14	Responden 14	3,8	Aktif
15	Responden 15	3,8	Aktif
16	Responden 16	2,2	Pasif
17	Responden 17	3,8	Aktif
18	Responden 18	3,7	Aktif
19	Responden 19	4,2	Aktif
20	Responden 20	2,8	Pasif
21	Responden 21	4,1	Aktif
22	Responden 22	3,4	Aktif
23	Responden 23	4,2	Aktif

Tabel diatas menunjukkan bahwa, hanya ada 4 responden dari 23 sampel yang dijadikan informan data yang melakukan dan menerapkan toleransi pasif. Hal tersebut menunjukkan bahwa 83 % sampel mengimplementasikan nilai toleransi dengan sifat aktif. Sedangkan 17 % lainnya menerapkan toleransi pasif dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu.

#### 4. Menentukan kategorisasi Implementasi Nilai Toleransi

Berdasarkan data pengkategorian berdasarkan jumlah presentase keseluruhan, bahwa secara umum implementasi nilai toleransi beragama tergolong pada toleransi aktif. Kemudian peneliti melakukan uji lanjutan untuk menentukan hasil perbandingan data angket dengan angka konstanta kategori toleransi aktif dan pasif yakni :

- a. Kategori toleransi aktif jika rata-rata skor butir angket  $>$  angka konstanta yang ditentukan yakni 2,5



- b. Kategori toleransi pasif jika rata-rata skor butir angket < angka konstanta yang ditentukan yakni 2,5

**Tabel 4.2 Presentase Kategori Toleransi**

Kategori	Jumlah	Presentase
Toleransi Aktif	19	83%
Toleransi Pasif	4	13%
Kesimpulan : Toleransi Aktif		

Peneliti juga melakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus *uji t one sample*, berikut hasil pengujian data :

**Tabel 4.3 Uji Normalitas Data**

Rata-rata	3,391304
Simpang Baku	0,742179
Nilai Maksimal	0,205452196
L hitung	0,205452196
L table	0,275
St dev	0,742179
Ho : Sampel berdistribusi normal	
Ha : Sampel berdistribusi tidak normal	
Kesimpulan :	
Ho diterima jika nilai D < Ks	
Data <b>Normal</b>	

**Tabel 4.4 Uji t One Sampel dengan Nilai Konstanta Pembanding 2,5**

t-Test: Paired Two Sample for Means

	4,1	0
Mean	3,652272727	0
Variance	0,379637446	0
Observations	22	22
Pearson Correlation	#DIV/0!	
Hypothesized Mean Difference	4	
Df	21	
t Stat	-2,647070897	
P(T<=t) one-tail	0,007537017	

t Critical one-tail	1,720742903
P(T<=t) two-tail	0,015074034
t Critical two-tail	2,079613845
Kesimpulan	
Ho diterima jika t hitung < t table	
Kesimpulan :	
t hitung < t table, yakni	
-2,647070897 < 2.06866	
<i>Artinya, Implementasi Nilai Toleransi Beragama Pada Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu Bersifat Toleransi Positif</i>	

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Implementasi Nilai Toleransi Beragama

##### a. Kebijakan Implementasi nilai toleransi beragama

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang didapat oleh peneliti dari data-data yang ada mengenai kebijakan implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu bahwa tidak ada kebijakan khusus yang disusun dan ditetapkan oleh Lembaga Bappeda mengenai implementasi nilai toleransi beragama. Semua berjalan secara alamiah sebagaimana yang dilakukan setiap individu dalam menanggapi keberagaman di Indonesia. Pada kenyataannya, memang tidak perlu diberikan peraturan dan edaran khusus mengenai implementasi nilai toleransi beragama di Indonesia sejauh belum ada terjadi konflik mengenai hal tersebut.

Sebab kewajiban bertoleransi dibidang agama sudah jelas dikembangkan dan dijabarkan dalam UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”<sup>114</sup>.

Atas dasar masyarakat Indonesia yang memahami betul makna Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “walaupun berbeda-beda tetap satu jua” diatas segala keberagaman termasuk didalamnya agama inilah sejauh ini Bappeda Provinsi Bengkulu belum pernah mengeluarkan kebijakan mengenai toleransi beragama tersebut. Selain kebijakan induk yang sepenuhnya bulat dan tidak dapat diganggu gugat, baru-baru ini presiden mengeluarkan peraturan yakni Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rancangan Program Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Dalam kebijakan ini juga menyinggung atau menggarisbawahi perihal Moderasi Beragama.<sup>115</sup>

Perpres Nomor 18 Tahun 2020 ini memuat beberapa krusial mengenai program pengembangan yang berkaitan dengan penciptakannya kerukunan, keharmonisan dan kenyamanan antar umat beragama guna melangsungkan dan mengisi kemerdekaan Negara Indonesia sesuai dengan tujuan Negara. Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memuat pengembangan lingkungan keagamaan umat beragama bagi seluruh agama yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Didalam Tabel Matrik Pembangunan RPJMN 2020-2024 dalam upaya

---

<sup>114</sup> Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29, ayat 2. Jakarta

<sup>115</sup> Puspita, Atalya. *ASN Sasaran Utama Internalisasi Moderasi Beragama*. <https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x/news/2020/10/ea73fe6144654c5b3310cb740e11f9d1.jpg>. Diakses pada 14 Agustus 2021

memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, termuat 472 poin yang terkait dengan pembangunan dibidang keagamaan.<sup>116</sup>

Selain turunan UUD 1945 Batang Tubuh Pasal 29 adalah Perpres Nomor 18 Tahun 2020, perihal peraturan atau yang dapat dikatakan sebagai kebijakan umum terkait tentang implementasi nilai toleransi beragama adalah Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.<sup>117</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut memuat poin-poin yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan kewajibannya kepada NKRI termasuk didalamnya adalah toleransi dalam menjalankan kewajiban beragama dilingkungan kerja dan masyarakat. Selanjutnya, sudah ada turunan kebijakan yang lebih kuat lagi dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan kepada ASN, yakni terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 10 Kementerian dan Lembaga Negara yakni :

“Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila, Administrasi Sipil Nasional Badan Layanan, dan Komisi Peralatan Sipil Nasional.”<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Lampiran III Perpres No. 18 Tahun 2020 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional* Tahun 2020

<sup>117</sup> Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

<sup>118</sup> Sa'idi, Zainut Tauhid. *ASN Garda Terdepan Moderasi Beragama*. Kementerian Agama Republik Indonesia. [Wamenag-zainut-tauhid-sa-adi--asn-garda-terdepan-moderasi-beragama.html](http://wamenag-zainut-tauhid-sa-adi--asn-garda-terdepan-moderasi-beragama.html). Diakses pada 14 Agustus 2021

Selanjutnya dalam SKB tersebut termuat 11 poin pelanggaran yang menjadikan dasar yang harus dipatuhi oleh ASN di Negara Indonesia.

Kesebelas poin tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengungkapkan pendapat lisan dan tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui jejaring sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan pemerintah
2. gambar , audio atau video yang diungkapkan secara lisan, melalui jejaring sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap suatu kelompok etnis tertentu, agama, ras, dan golongan
3. Menyebarkan pendapat yang mengandung ujaran kebencian dalam Pasal 1 dan 2 Melalui jejaring sosial (berbagi, mentransfer, unggah, teruskan, teruskan, dan sejenisnya)
4. Komentar atau dukungan sebagai tanda penerimaan, seperti angka 1 dan 2. Suka, tidak suka, suka, teruskan, atau komentar di jejaring sosial
5. Penyebarluasan informasi menyesatkan secara langsung atau melalui jejaring sosial
6. Penyebarluasan berita menyesatkan secara langsung atau melalui jejaring sosial
7. Menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada penghinaan, hasutan, provokasi, dan kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah Keikutsertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
8. Ikut serta dalam organisasi atau kegiatan yang diyakini menimbulkan penghinaan, hasutan, provokasi, dan kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan tindakan pemerintah
9. Pelecehan simbol nasional secara langsung atau melalui media sosial, dan/atau
10. Penggunaan atribut dan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI Bertentangan dengan Pemerintah Perbuatan dari poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN<sup>119</sup>
11. Perilaku 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN

---

<sup>119</sup> Surat Keputusan Bersama 10 Kementerian NKRI, *Sinergitas Kementerian Lembaga Dalam Rangka Penanganan Tindakan Ekstremisme Para ASN*, Tahun 2020

Atas dasar uraian perbandingan dasar Negara, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Surat Keputusan Bersama Lembaga dan Kementerian yang dengan leluasa membahas dan mengatur beberapa hal yang krusial dan intim bagi keberlangsungan kerukunan, termasuk didalamnya kerukunan antar umat beragama. Meskipun tidak secara khusus dalam beberapa peraturan diatas membahas mengenai implementasi nilai toleransi beragama, namun dengan ketegasan dan kedudukan kebijakan-kebijakan diatas sangat memungkinkan terjadinya kewajiban bagi semua pegawai dilingkungan Lembaga Pemerintahan termasuk Bappeda Provinsi Bengkulu mewajibkan menginternalisasikan nilai toleransi beragama.

#### **b. Implementasi Nilai Toleransi Beragama**

Data yang ada dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu dalam pengimplementasian nilai toleransi beragama sudah terlaksana dengan baik tanpa ada suatu kendala apapun, namun tanpa ada proses perencanaan dan evaluasi dari pelaksanaan yang ada. Hal ini dilatarbelakangi oleh nilai toleransi beragama itu sudah menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri individu. Sebagaimana konsep kehidupan bahwa

“Muslim dan non-Muslim hidup rukun, seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW akan membawa kedamaian dan kehidupan yang damai, apalagi juga dianjurkan untuk manusia lain (baik Muslim, Kristen atau Yahudi) Tetap lembut”<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. H 72

Demi kerukunan hidup berdampingan inilah maka setiap individu harus mampu menumbuhkan dan mengamalkan nilai toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari maupun khusus pada lembaga Bappeda sendiri. Meskipun tanpa ada kebijakan khusus terkait implementasi ini, namun secara tersirat ada terlaksana pendekatan individual untuk mengarahkan hidup rukun tanpa membedakan agama. Ini dijelaskan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier:

Memutuskan untuk melaksanakan kebijakan dasar umumnya berbentuk undang-undang, tetapi bisa juga berupa perintah atau keputusan administratif utama atau keputusan yang dibuat oleh otoritas kehakiman. Secara umum, keputusan menentukan masalah yang akan dipecahkan, secara jelas menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai metode untuk mengatur atau mengatur proses pelaksanaannya.<sup>121</sup>

### c. Perilaku Toleransi Beragama

#### 1) Menghormati Perbedaan Agama

Perilaku menghormati perbedaan agama di lingkungan lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terlaksana dengan sangat baik sebagaimana yang diharapkan. Sejauh ini belum ada perilaku-perilaku yang mencerminkan konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama. Berdasarkan beberapa pendapat dibagian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk menghormati perbedaan agama dilingkungan diwujudkan dengan sikap baik menghargai, menghormati, tidak

---

<sup>121</sup>Daniel Mazmanian and A. Sabatier Paul *Implementation and Public Policy*, (Scott Foresman and Company USA:2013), h.139

memandang perbedaan dari sisi agama atau kepercayaan namun pada kemampuan kerjanya.

## 2) Tidak Membedakan Sikap kepada yang Beragama Lain

Bentuk tidak membedakan sikap kepada teman-teman yang berbeda agama di lingkungan Bappeda pada tempat penelitian didapatkan kesimpulan bahwa mengenai sikap yang ditunjukkan dengan teman yang berbeda agama maka dapat disimpulkan bahwa sikap yang ditunjukkan berupa sikap positif, memberikan kebebasan karena hal perbedaan merupakan keunikan yang dapat dibanggakan di Negara Indonesia.

## 3) Menghargai Teman yang Menjalankan Kewajiban Beragamanya

Berdasarkan data yang didapat dilapangan saat peneliti melakukan penelitian, faktor utama implementasi nilai toleransi beragama berjalan dengan baik adalah tumbuhnya sikap saling menghargai karena pembiasaan dalam diri manusia itu sangat diperlukan dalam masalah ini. Selanjutnya akhlak, toleransi dari pendidikan dasar dan ajaran agama merupakan factor pendukung terlaksananya implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu. Ditinjau dari sejarah agama Indonesia, budaya keagamaan masyarakat adat merupakan etiket yang luhur. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, agama telah membudidayakan seseorang yang berbudaya. Bukti kehidupan budaya masyarakat adat Masih dapat dirasakan hingga saat ini, seperti sembahyang, gamelan, wayang dan tradisi lainnya. Melalui



budaya semacam ini, orang bijak suku asli secara tegas memiliki nilai-nilai luhur berupa kerukunan dan kesopanan<sup>122</sup>.

## 2. Kategorisasi Toleransi Beragama

Berdasarkan data hasil penelitian, ditemukan bahwa hanya ada 4 orang responden yang dikategorikan pada toleransi pasif dengan data rata-rata dibawah 2,5. 19 orang responden lainnya dikategorikan pada toleransi aktif. Berhasalkan hasil perhitungan normalitas, data sampel yang diajukan dalam angket berdata normal dengan data perhitungan nilai nilai  $D < K_s$  yakni  $0,205 < 0,275$ . Kemudian hasil perhitungan uji t dengan rumus  $t_{hitung} < t_{table}$ , yakni  $2,64 < 2,07$  yang artinya  $H_0$  diterima. Pernyataan tersebut menandakan bahwa implementasi nilai toleransi beragama pada karyawan di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu bersifat aktif. Menurut sukanto, bahwa :

“Ada dua model toleransi, yaitu : Pertama, toleransi pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Kedua, toleransi aktif, melibatkan diri dengan yang lain ditengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama”.<sup>123</sup>

Artinya pada dasarnya hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai diantara keragaman. Seluruh agama harus bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Hal ini tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan teologi eksklusif yang hanya berhenti pada klaim kebenaran, tetapi membutuhkan teologi pluralisme yang berorientasi pada pembebasan. Hal tersebut terwujud dalam factor-faktor pendukung dalam implementasi toleransi beragama oleh karyawan

<sup>122</sup> Wijaya, A. *Menusantarakan Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), h. 184

<sup>123</sup> Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Adapun bentuk factor pendukungnya adalah :

“Sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima ditengah keragaman budaya, suku, agama dan kebebasan berekspresi. Dengan adanya sikap toleransi, warga suatu komunitas dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dilingkungannya.”<sup>124</sup>

Artinya bahwa kemunculan sikap dan nilai norma lain dimasyarakat menjadikan keberhasilan dalam implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Ketergantungannya perilaku saling menghormati, menghargai dan menerima diantara sesama manusia merupakan wujud nyata dari nilai pancasilais dari masyarakat NKRI.

### **3. Toleransi Beragama Menurut Pendidikan Agama Islam**

Toleransi beragama yang diciptakan dilingkungan Bappeda provinsi Bengkulu tidak terlepas dari berbagai upaya penanaman pendidikan nilai melalui pendidikan formal sebelum setiap karyawan Bappeda bekerja. Jenjang pendidikan formal dari pendidikan dasar selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan khususnya nilai toleransi beragama dilingkungan masyarakat sehingga pencapaian internalisasi sikap-sikap pendukung keberhasilan implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Keberadaan nilai toleransi beragama dalam kaitannya dengan pendidikan agama islam tidak dapat terpisahkan. Dimana hal tersebut secara tertulis dalam peraturan yang sah, yakni :

---

<sup>124</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, ( Beirut: Darul Fikri, 2013), h.71

“Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, didalamnya menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan peserta didik mampu menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.”<sup>125</sup>

Selain itu, Pendidikan agama tentang toleransi agama sangatlah diperlukan untuk memberikan pedoman kepada pemeluknya tentang bagaimana berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Fungsi guru dan sekolah dalam proses pendidikan agama tentang toleransi agama ini adalah mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, dan membentuk watak dan kepribadian sehingga siswa itu berubah menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, cerdas, dan bermartabat. Dalam hubungan ini memahami toleransi agama menjadi sangat penting karena pada dasarnya agama mampu menjadi katalisator pencegah terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Agama melahirkan norma atau aturan tingkah laku kepada pemeluknya, walaupun pada dasarnya sumber agama itu adalah nilai-nilai transenden, agama memberi kemungkinan untuk berfungsi menjadi pedoman, dan petunjuk pola tingkah laku dan corak sosial. Disinilah agama dapat dijadikan instrument integrative dalam masyarakat.<sup>126</sup>

Artinya pendidikan agama diarahkan mengembangkan keragaman setiap individu dalam menyamakan persepsi bahwa pentingnya keberadaan toleransi dalam urusan interaksi social dimasyarakat. Hal ini didukung oleh panduan dalam kurikulum pendidikan agama islam yang tidak hanya berperan memperdalam ilmu agama, melainkan juga mendidik generasi penerus yang memiliki toleransi

---

<sup>125</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006

<sup>126</sup> Nurholish Madjid, *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta :Kompas, 2001), h. 12

terhadap agama yang ada dimuka bumi. Berikut bunyo pelaksanaan dari kurikulum Pendidikan Agama :

“Kurikulum tersebut dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.”<sup>127</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proses implementasi nilai toleransi beragama dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu sejauh ini tidak terlepas dari peran pendidikan agama islam yang telah dikenyam oleh setiap karyawan Bappeda ketika menempuh pendidikan formal. Seluruh agama dimuka bumi ini mengajarkan dan memanfaatkan keberadaan nilai toleransi dalam menjalani aktivitas dilingkungan masyarakat. Begitupun agama Islam, dimana ajaran nilai toleransi selain tertuang dalam Al-Quran, kurikulum pendidikan pun memberikan dukungan pelaksanaannya terhadap setiap generasi penerus bangsa.

---

<sup>127</sup> Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian hasil dan pembahasan yang telah dibandingkan dengan teori dan data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan belum pernah ditemukan perilaku pelanggaran toleransi. Selain itu, implementasi dapat dilihat dari 3 indikator, yakni :

- a) Kebijakan

Tidak ada kebijakan khusus yang disusun oleh Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terkait implementasi nilai toleransi beragama, namun kebijakan umum berupa UUD 1945, Pancasila, Perpres No 18 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Surat Keputusan Bersama Kementerian dan Lembaga tentang penguatan kerukunan beragama.

- b) Implementasi Nilai Toleransi Beragama

Toleransi beragama sudah berjalan, namun tanpa ada proses atau tahap perencanaan dan evaluasi, sebab tidak ada kebijakan khusus yang disusun atau dikembangkan.

c) Perilaku Toleransi Beragama

Perilaku ditunjukkan dengan sikap menghormati dan menghargai sesama teman kerja sehingga tidak mempermasalahkan perbedaan agama yang ada dalam bekerja.

2. Kategorisasi nilai toleransi beragama pada karyawan Bappeda Provinsi Bengkulu tergolong aktif dengan nilai perbandingan persentase aktif dan pasif adalah 83% : 17%.
3. Perhitungan uji hipotesis ditemukan bahwa data  $H_0$  diterima yang menandakan bahwa implementasi nilai toleransi beragama pada karyawan Bappeda Provinsi Bengkulu tergolong aktif dengan  $t_{hitung} < t_{table}$  dengan nilai  $-2,64 < 2,07$ .
4. Faktor pendukung implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu adalah sikap menghormati dan menghargai yang telah terinternalisasikan dalam diri setiap individu.

## B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberika beberapa implikasi diantaranya adalah proses implementasi nilai toleransi beragama oleh karyawan di lingkungan Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu berjalan atas dasar kesadaran masing-masing individu secara alamiah tanpa ada perhatian khusus oleh unsur pimpinan lembaga. Hal ini dimungkinkan akan berimplikasi pada terkikisnya sikap toleransi tersebut pada karyawan yang dipengaruhi oleh factor eksternal. Selanjutnya secara tertulis tidak ada arahan dan aturan berkait dengan hal keragaman beragama yang

mengakibatkan hal ini berimplikasi pada minimnya batasan-batasan cara berpakaian dan perilaku yang nantinya berpotensi pada konflik antar umat beragama.

Berdasarkan uraian implikasi yang dimungkinkan diatas, maka secara umum implementasi nilai toleransi beragama dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu harus dibekali dengan aturan atau kebijakan khusus yang merupakan turunan dari kebijakan yang telah pemerintah keluarkan. Sehingga bila nantinya ada konflik berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan nilai toleransi beragama, pihak terkait dapat meminimalisirnya sejak dini ataupun mengadilinya sesuai SOP yang telah disusun oleh Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu.

### **C. Saran**

Setelah pembahasan dan kesimpulan yang peneliti tuangkan dalam penelitian ini, maka peneliti menyampaikan saran bahwa:

1. Sebaiknya sebuah instansi atau lembaga dapat memberikan atau mengembangkan turunan kebijakan terkait keberagaman beragama secara tertulis untuk meminimalisir kemungkinan konflik yang terjadi.
2. Disarankan kepada kalangan peneliti lainnya untuk dapat lebih mendalami terkait penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut faktor penghambat implementasi dari nilai toleransi beragama di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, *Teori Pendidikan Karakter Remaja Dalam Keluarga.*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Arromadhloni, M. Najih, *Tafsir Kebangsaan (Cinta Tanah Air, Toleransi dan Bela Negara dalam Al-Quran)*, (Tangerang Selatan, Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, 2021),
- Ajat Sudrajatx. *Din Al Islam*: Yogyakarta UNY Press, 2018
- Al Munawar, Said Agil Husain. *Fikih Hubungan Antar Agama*: Ciputat Perss, Jakarta. 2015.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2018, Universitas PEPABARI Makassar, 2018, hlm 117.
- Agostiono. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 Maret 2021, hlm 139.
- Putra, Roby Hadi, *Edward III, George C (edited), 2011. Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London- England. Goggin, Malcolm L et al, hlm. 1
- Fatoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*: PT.Rineka Cipta, Jakarta. 2006
- Gernande, Heru. *Implementasi Kebijakan Melilee S. Grindle*. <http://heru2273.blogspot.com/2014/04/implementasi-kebijakan-merilee-s-grindle.html> , diakses 17 Februari 2021 pada pukul 12.31
- Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan dalam Islam: Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Media-K, Surabaya, 2019.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*: Bandung, Mandar Maju, 2010
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. Quraish, Shihab, *Islam yang saya anut (Dasar ajaran islam)*, (Tangerang : Lentera Hati. 2017
- Madjid, Nurcholis, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan Pemikiran NurcholisMuda*: Mizan, Bandung. 2013.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 2013, hlm 139.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1

**KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN**

Judul : Implementasi Nilai Toleransi Beragama Pada Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu

Peneliti : Nurma Hutari, S.Pd

Pembimbing : 1. Dr. Adisel, M.Pd  
2. Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I

No	Uraian	Indikator	Butir Pertanyaan	Informan	Teknik		
					Observasi	Wawancara	Dokumentasi
1	Implementasi nilai toleransi beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan umum</li> <li>• Kebijakan khusus</li> </ul>	No. 1, 2, 3, 4	Kepala Badan, Sekretaris	√	√	√
	Implementasi Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul>	No. 5 s/ d 13	Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Pegawai	√	√	√
	Toleransi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghormati perbedaan agama</li> <li>• Tidak membedakan sikap kepada yang berlainan agama</li> </ul>	No. 14,15, 16, 17,18	Pegawai /staff	√	√	√

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya</li> </ul>					
	Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu		No.19,20,21,22,23,24,25 26,27,28,29,30,31,32,33,34	Kepala Badan, Sekretaris, Kabasug Perencanaan	√	√	√

## Lampiran 2

**PEDOMAN WAWANCARA**

Judul : Implementasi Nilai Toleransi Beragama Pada Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu

Peneliti : Nurma Hutari, S.Pd

Pembimbing : 1. Dr. Adisel, M.Pd  
2. Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I

No	Uraian	Indikator	Butir Pertanyaan
1	Implementasi nilai toleransi beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan umum</li> <li>• Kebijakan khusus</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah terdapat kebijakan berkaitan dengan implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi Bengkulu?</li> <li>2. Apa bentuk kebijakan tersebut?</li> <li>3. Apa dasar kebijakan tersebut dikeluarkan?</li> <li>4. Bagaimana implementasi tersebut di lingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</li> </ol>
2	Implementasi Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Apakah ada perencanaan terkait implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi Bengkulu?</li> <li>6. Dalam bentuk apa perencanaan tersebut dilaksanakan?</li> <li>7. Bagaimana pelaksanaan nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan</li> </ol>

			<p>pengembangan daerah provinsi Bengkulu?</p> <p>8. Apa saja faktor pendukung implementasi nilai toleransi beragama?</p> <p>9. Apakah ada evaluasi dari pelaksanaan implementasi nilai tersebut?</p> <p>10. Bagaimana tindak lanjut dari evaluasi?</p>
3	Toleransi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghormati perbedaan agama</li> <li>• Tidak membedakan sikap kepada yang berlainan agama</li> <li>• Menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya</li> </ul>	<p>11. Bagaimana menghormati perbedaan agama dilingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</p> <p>12. Bagaimana tanggapan terkait dengan perbedaan agama yang ada?</p> <p>13. Apakah ada pihak-pihak yang tidak mendukung kegiatan menghormati kegiatan agama?</p> <p>14. Apakah pernah terjadi kegiatan yang melanggar toleransi berupa menghormati perbedaan agama tersebut?</p> <p>15. Bagaimana implementasi dari sikap tidak membedakan agama dilingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</p> <p>16. Bagaimana bentuk implementasi dari kegiatan-kegiatan umum yang berkaitan dengan tidak membedakan sikap dan perilaku kepada yang beragama lain?</p> <p>17. Siapa yang paling terlibat dalam menentukan kebijakan?</p> <p>18. Apakah faktor pendukung dalam menghormati perbedaan agama, tidak membedakan sikap kepada teman yang beragama lain dan melakukan menghormati kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan?</p>

4	Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Proses Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Faktor penghambat Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Faktor Pendukung Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Keberhasilan dan manfaat yang dicapai dalam upaya Implementasi nilai</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>19. Bagaimana respon masyarakat dilembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan nilai toleransi beragama?</li> <li>20. Proses apa saja yang dijadikan persiapan dalam pengimplementasian toleransi beragama tersebut?</li> <li>21. konsep apa yang dilaksanakan dalam implementasi tersebut?</li> <li>22. Adakah kaitan konsep implementasi terhadap pimpinan lembaga? Dalam hal ini jika terjadi penggantian pejabat berwenang?</li> <li>23. Adakah unsur lain yang dinilai subjektif dalam proses implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu?</li> <li>24. Dalam proses yang telah berlangsung saat ini, adakah menuai respon diluar yang diharapkan?</li> <li>25. proses yang terlaksana apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku?</li> <li>26. Adakah keterlibatan seluruh masyarakat lembaga dalam hal penyusunan SOP implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu?</li> <li>27. Metode apa yang diterapkan dalam pelaksanaan proses implementasi tersebut?</li> <li>28. Apa saja faktor penghambat dan apa solusi dalam mengatasinya?</li> <li>29. Apa saja faktor pendukung dan upaya apa yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu?</li> <li>30. Apa saja keberhasilan yang diraih oleh</li> </ol>
---	--	---	---

		<p>toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</p>	<p>lembaga dalam pengimplementasian tersebut?</p> <p>31. Apa manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama tersebut?</p> <p>32. Apa kritik terhadap pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ?</p> <p>33. Apa saran terhadap pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ?</p> <p>34. Apakah pernah dilakukan evaluasi secara berkala baik SOP maupun proses pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu?</p>
--	--	--	---

## Lampiran 3

**PEDOMAN OBSERVASI**

Judul : Implementasi Nilai Toleransi Beragama Pada Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu

Peneliti : Nurma Hutari, S.Pd

Pembimbing : 1. Dr. Adisel, M.Pd  
2. Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I

No	Variabel	Indikator	Poin Pengamatan	Keterangan	
				Ada	Tidak
1	Kebijakan tentang nilai toleransi beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan umum</li> <li>• Kebijakan khusus</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan berkaitan dengan implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi Bengkulu</li> <li>2. Bentuk kebijakan tersebut</li> <li>3. Dasar kebijakan tersebut dikeluarkan</li> <li>4. Bentuk implementasi tersebut di lingkungan bappeda provinsi Bengkulu</li> </ol>		
2	Implementasi Nilai Toleransi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bentuk perencanaan terkait implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi Bengkulu</li> <li>6. Waktu pelaksanaan tersebut dilaksanakan</li> <li>7. Proses pelaksanaan dari implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi Bengkulu</li> </ol>		



			8. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 9. Faktor pendukung implementasi nilai toleransi beragama 10. Bentuk evaluasi dari pelaksanaan implementasi nilai tersebut 11. Bentuk tindak lanjut dari evaluasi		
3	Perilaku dari Implementasi Nilai Toleransi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghormati perbedaan agama</li> <li>• Tidak membedakan sikap kepada yang berlainan agama</li> <li>• Menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya</li> </ul>	12. Bentuk menghormati perbedaan agama dilingkungan bappeda provinsi Bengkulu 13. Tanggapan terkait dengan perbedaan agama yang ada 14. Pihak-pihak yang tidak mendukung kegiatan menghormati kegiatan agama 15. Bentuk kegiatan yang melanggar toleransi berupa menghormati perbedaan agama tersebut 16. Bentuk implementasi dari sikap tidak membedakan agama dilingkungan bappeda provinsi Bengkulu 17. Bentuk implementasi dari kegiatan-kegiatan umum yang berkaitan dengan tidak membedakan sikap dan perilaku kepada yang beragama lain 18. Pihak yang paling terlibat dalam menentukan kebijakan 19. Bentuk penghormatan toleransi kepada keberagaman agama 20. Faktor pendukung dalam menghormati perbedaan agama, tidak membedakan sikap kepada teman yang beragama lain dan melakukan menghormati kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan		

4	Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Proses Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Faktor penghambat Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>21. Respon masyarakat dilembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan nilai toleransi beragama</li> <li>22. Proses yang dijadikan persiapan dalam pengimplementasian toleransi beragama tersebut</li> <li>23. Konsep yang dilaksanakan dalam implementasi tersebut</li> <li>24. Kaitan konsep implementasi terhadap pimpinan lembaga, dalam hal ini jika terjadi penggantian pejabat berwenang</li> <li>25. Unsur lain yang dinilai subjektif dalam proses implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu</li> <li>26. Dalam proses yang telah berlangsung saat ini, respon diluar yang diharapkan</li> <li>27. Proses yang terlaksana sudah sesuai dengan SOP yang berlaku</li> <li>28. Bentuk keterlibatan seluruh masyarakat lembaga dalam hal penyusunan SOP implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu</li> <li>29. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan proses implementasi tersebut</li> <li>30. Faktor pendukung dan upaya apa yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu</li> <li>31. Keberhasilan yang diraih oleh lembaga dalam pengimplementasian tersebut</li> <li>32. Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan</li> </ol>		

	<p>(Bappeda) Provinsi Bengkulu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor Pendukung Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Keberhasilan dan manfaat yang dicapai dalam upaya Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> </ul>	<p>implementasi nilai toleransi beragama tersebut</p> <p>33. Kritik terhadap pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</p> <p>34. Bentuk evaluasi secara berkala baik SOP maupun proses pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</p>		
--	--	---	--	--

## Lampiran 4

**PEDOMAN DOKUMENTASI**

Judul : Implementasi Nilai Toleransi Beragama Pada Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu

Peneliti : Nurma Hutari, S.Pd

Pembimbing : 1. Dr. Adisel, M.Pd  
2. Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I

No	Variabel	Indikator	Dokumen Pendukung	
			Ada	Tidak
1	Implementasi nilai toleransi beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan umum</li> <li>• Kebijakan khusus</li> </ul>		
2	Implementasi Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul>		
3	Toleransi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghormati perbedaan agama</li> <li>• Tidak membedakan sikap kepada yang berlainan agama</li> <li>• Menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya</li> </ul>		
4	Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> </ul>		

	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Proses Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>● Faktor penghambat Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>● Faktor Pendukung Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>● Keberhasilan dan manfaat yang dicapai dalam upaya Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> </ul>		
--	---	--	--	--

## HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes (X<sub>1</sub>)  
 Jabatan : Kepala Badan

No	Uraian	Indikator	Butir Pertanyaan	Jawaban
1	Kebijakan Implementasi nilai toleransi beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan umum</li> <li>• Kebijakan khusus</li> </ul>	<p>35. Apakah terdapat kebijakan berkaitan dengan implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</p> <p>36. Apa bentuk kebijakan tersebut?</p> <p>37. Apa dasar kebijakan tersebut dikeluarkan?</p> <p>38. Bagaimana implementasi tersebut di lingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalau kebijakan khusus tidak ada, sepanjang sejauh ini tidak terdapat konflik perihal toleransi beragama. Namun toleransi beragama di lingkungan Bappeda Prov. Bengkulu sudah berjalan sebagai mana mestinya.</li> <li>2. Tidak ada kebijakan tersebut, karena implementasi toleransi beragama di lingkungan Bappeda Prov. Bengkulu ini sudah tertanam dengan baik.</li> <li>3. Tidak ada kebijakan khusus</li> <li>4. Berjalan sebagaimana mestinya saja, mengikuti aktivitas biasanya dilingkungan social masyarakat.</li> </ol>
2	Implementasi Nilai Toleransi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul>	<p>39. Apakah ada perencanaan terkait implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</p> <p>40. Dalam bentuk apa perencanaan tersebut dilaksanakan?</p> <p>41. Bagaimana pelaksanaan nilai toleransi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tidak ada secara khusus, karena di OPD Prov Bengkulu bahkan memang toleransi beragama ini sudah tertanam sebagaimana mestinya pada individu pegawai</li> <li>6. Tidak ada, Berjalan sebagaimana mestinya seperti dilingkungan masyarakat social lainnya. Artinya tidak ada perencanaan</li> </ol>

			<p>beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</p> <p>42. Apa saja faktor pendukung implementasi nilai toleransi beragama?</p> <p>43. Apakah ada evaluasi dari pelaksanaan implementasi nilai tersebut?</p> <p>44. Bagaimana tindak lanjut dari evaluasi?</p>	<p>khusus yang mendasar. Hanya saja seperti bulan ramadhan jadwal kegiatan mengikuti saja seperti itu, krn umat muslim berpuasa. Selebihnya sama saja.</p> <p>7. Kalau pelaksanaan sudah terlihat jelas. Di Bappeda ini mayoritas muslim, ada beberapa yg non muslim. Jdi dalam pelaksanaan kegiatan yg berkaitan dengan agama selalu ada sikap-sikap toleransi yang tinggi dari kaum minoritas kpd mayoritas. Belum pernah ada sikap yang ditunjukkan oleh kaum mayoritas pun seperti bentuk penindasan dan lainnya.</p> <p>8. Saling menghargai dan saling menghormati hari-hari besar umat masing-masing, kebiasaan dan larangan</p> <p>9. Secara khusus tidak ada</p> <p>10. Tidak ada</p>
3	Perilaku Toleransi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghormati perbedaan agama</li> <li>• Tidak membedakan sikap kepada yang berlainan agama</li> <li>• Menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya</li> </ul>	<p>45. Bagaimana menghormati perbedaan agama dilingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</p> <p>46. Bagaimana tanggapan terkait dengan perbedaan agama yang ada?</p> <p>47. Apakah ada pihak-pihak yang tidak mendukung kegiatan menghormati kegiatan agama?</p> <p>48. Apakah pernah terjadi kegiatan yang melanggar toleransi berupa</p>	<p>11. Himbauan dengan rekan dan sraf bahwa pada penganut kepercayaan agama di lingkungan Bappeda harus ada sikap saling menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik kaum mayoritas kepada kamu minoritas dan sebaliknya</p> <p>12. Saya berpendapat bahwa dalam aplikasinya dalam kehidupan</p>

			<p>menghormati perbedaan agama tersebut?</p> <p>49. Bagaimana implementasi dari sikap tidak membedakan agama dilingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</p> <p>50. Bagaimana bentuk implementasi dari kegiatan-kegiatan umum yang berkaitan dengan tidak membedakan sikap dan perilaku kepada yang beragama lain?</p> <p>51. Siapa yang paling terlibat dalam menentukan kebijakan?</p> <p>52. Apakah faktor pendukung dalam menghormati perbedaan agama, tidak membedakan sikap kepada teman yang beragama lain dan melakukan menghormati kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan?</p>	<p>sehari-hari baik dilingkungan kerja tidak ada masalah, sepanjang masing-masing menjunjung tinggi dan menghormati satu sama lain</p> <p>13. Tidak ada</p> <p>14. Tidak ada</p> <p>15. Mendukung semua kegiatan keagamaan sejauh tidak mengganggu pekerjaan atau tupoksi yang ada</p> <p>16. Menghormati dan menghargai perbedaan yang ada</p> <p>17. Atasan atau petinggi atau kepala bagian masing-masing</p> <p>18. Sikap. Karena pembiasaan dalam diri manusia itu sangat diperlukan dalam masalah ini</p>
4	Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Proses Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> </ul>	<p>53. Bagaimana respon masyarakat dilembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan nilai toleransi beragama?</p> <p>54. Proses apa saja yang dijadikan persiapan dalam pengimplementasian toleransi beragama tersebut?</p> <p>55. konsep apa yang dilaksanakan dalam implementasi tersebut?</p> <p>56. Adakah kaitan konsep implementasi terhadap pimpinan lembaga? Dalam hal ini jika terjadi penggantian pejabat berwenang?</p> <p>57. Adakah unsur lain yang dinilai subjektif</p>	<p>19. Secara umum tidak mempermasalahakan, secara umum semua berjalan secara kondusif sebagaimana mestinya</p> <p>20. Pendekatan, kalau misalnya ada acara keagamaan pada suatu penganut, kita melakukan pendekatan kepada pihak lainnya, begitu juga sebaliknya. Sehingga ada bentuk dukungan yang diberikan oleh penganut agama lainnya terhadap pelaksanaannya</p> <p>21. Saling mendukung dan saling menghormati.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor penghambat Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Faktor Pendukung Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Keberhasilan dan manfaat yang dicapai dalam upaya Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> </ul>	<p>dalam proses implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu?</p> <p>58. Dalam proses yang telah berlangsung saat ini, adakah menuai respon diluar yang diharapkan?</p> <p>59. proses yang terlaksana apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku?</p> <p>60. Adakah keterlibatan seluruh masyarakat lembaga dalam hal penyusunan SOP implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu?</p> <p>61. Metode apa yang diterapkan dalam pelaksanaan proses implementasi tersebut?</p> <p>62. Apa saja faktor penghambat dan apa solusi dalam mengatasinya?</p> <p>63. Apa saja faktor pendukung dan upaya apa yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu?</p> <p>64. Apa saja keberhasilan yang diraih oleh lembaga dalam pengimplementasian tersebut?</p> <p>65. Apa manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama tersebut?</p> <p>66. Apa kritik terhadap pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ?</p> <p>67. Apa saran terhadap pelaksanaan</p>	<p>22. Tidak ada</p> <p>23. Tidak ada</p> <p>24. Tidak ada</p> <p>25. Sudah sesuai</p> <p>26. Kita tidak ada SOP khusus, artinya belum ada pelibatan pihak-pihak lain. Semua sudah tertaman didiri kita masing-masing</p> <p>27. Otodidak saja, atas dasar saing menghormati saja</p> <p>28. Hamipr tidak ada</p> <p>29. Selalu saling mengingatkan, memupuk rasa kebersamaan dan persaudaraan, tidak pernah memutuskan tali silaturahmi, sehingga dengan sendirinya hubungan baik itu kita antar manusia antar personal itu selalu berjalan dengan baik. Sehingga otomatis demikian rasa saling menghormati dan toleransi beragama antar masing-masing itu tumbuh dengan baik</p> <p>30. Pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang berjalan dengan baik. Seperti pada bulan ramadhan adanya kegiatan buka bersama, semua ikut tanpa terkecuali</p> <p>31. Sudah jelas, kuatnya ikatan persaudaraan, kerukunan dalam organisasi, rasa persatuan itu</p>
--	--	---	---	---

			<p>Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ?</p> <p>68. Apakah pernah dilakukan evaluasi secara berkala baik SOP maupun proses pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu?</p>	<p>sudah menjadi manfaat yang dapat dirasakan</p> <p>32. Tidak ada.</p> <p>33. Saran saja untuk selalu mengingatkan agar meninggikan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesame sehingga dapat selalu terjaga kegiatan tersebut sampai nantinya</p> <p>34. Tidak ada</p>
--	--	--	---	--

### HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Fahmi Renata, S.STP., M.Si (X<sub>2</sub>)  
 Jabatan : Staf Pegawai

No	Uraian	Indikator	Butir Pertanyaan	Jawaban
1	Implementasi nilai toleransi beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan umum</li> <li>• Kebijakan khusus</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah terdapat kebijakan berkaitan dengan implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</li> <li>2. Apa bentuk kebijakan tersebut?</li> <li>3. Apa dasar kebijakan tersebut dikeluarkan?</li> <li>4. Bagaimana implementasi tersebut di lingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>
2	Implementasi Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Apakah ada perencanaan terkait implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</li> <li>6. Dalam bentuk apa perencanaan tersebut dilaksanakan?</li> <li>7. Bagaimana pelaksanaan nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</li> <li>8. Apa saja faktor pendukung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Sebelum pandemic, ada kegiatan pengajian untuk muslim, agama lain pun juga dipersilahkan membuat acara di Bappeda sehingga tidak ada perbedaan antar agama. Lembaga Bappeda mendukung sepenuhnya kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan</li> <li>6. Untuk muslim, setiap jumat ada pengajian rutin, dalam sebulan sekali, untuk agama lain menyesuaikan dengan kegiatan keagamaan mereka</li> </ol>

			<p>implementasi nilai toleransi beragama?</p> <p>9. Apakah ada evaluasi dari pelaksanaan implementasi nilai tersebut?</p> <p>10. Bagaimana tindak lanjut dari evaluasi?</p>	<p>7. Berjalan dengan baik, tidak terjadi perbedaan</p> <p>8. Diri sendiri berupa sikap saling menghargai dan menghormati. Tidak membedakan, menghujat serta tidak ada ketersinggungan antar agama</p> <p>9. Secara keseluruhan kembali kepada kepribadian masing-masing</p> <p>10. Diberikan pemahaman untuk dapat mempertahankan sikap saling menghargai, menghormati kewajiban sesama agama maupun berbeda agama baik untuk lingkungan Bappeda sendiri maupun lingkungan social masyarakat.</p>
3	Toleransi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghormati perbedaan agama</li> <li>• Tidak membedakan sikap kepada yang berlainan agama</li> <li>• Menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya</li> </ul>	<p>11. Bagaimana menghormati perbedaan agama dilingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</p> <p>12. Bagaimana tanggapan terkait dengan perbedaan agama yang ada?</p> <p>13. Apakah ada pihak-pihak yang tidak mendukung kegiatan menghormati kegiatan agama?</p> <p>14. Apakah pernah terjadi kegiatan yang melanggar toleransi berupa menghormati perbedaan agama tersebut?</p> <p>15. Bagaimana implementasi dari sikap tidak membedakan agama dilingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</p>	<p>11. Kita harus memandang kerja sama bukan perbedaan yang kita titik beratkan. Artinya saling menghormati tersebut harus terus ditingkatkan dalam upaya kerukunan dilingkungan kerja. Asal mau bekerja maka Bappeda dipakai</p> <p>12. Ada perbedaan mendasar terkait pemahaman agama masing-masing, nah perbedaan tersebut akan diramu menjadi sebuah keunikan dan kebersamaan yang indah dalam lingkungan kerja. Laksanakan saja tupoksi sesuai</p>

			<p>16. Bagaimana bentuk implementasi dari kegiatan-kegiatan umum yang berkaitan dengan tidak membedakan sikap dan perilaku kepada yang beragama lain?</p> <p>17. Siapa yang paling terlibat dalam menentukan kebijakan?</p> <p>18. Apakah faktor pendukung dalam menghormati perbedaan agama, tidak membedakan sikap kepada teman yang beragama lain dan melakukan menghormati kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan?</p>	<p>bidang masing-masing</p> <p>13. Tidak ada</p> <p>14. Tidak ada</p> <p>15. Prinsipnya bekerja tidak memandang perbedaan agama, suku, ras dan lainnya namun lebih kepada mau atau tidaknya orang tersebut bekerja dan menjalankan tupoksinya sebagai apa posisinya tersebut. Dengan begitu munculah saling menghargai dan menghormati dalam diri individu sehingga lembaga Bappeda ini dapat melaksanakan segala fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya tersebut. Karena di Bappeda ini prinsipnya loyalitas kerja tim.</p> <p>16. Seperti sedang rapat, ada yg izin sholat maka diizinkan, bagi yang tidak menjalankan pun siap menunggu dalam waktu yang wajar sampai aktivitasnya selesai., selain itu misalkan rapat dihari minggu, maka kita menghargai non muslim menjalankan ibadah terlebih dahulu dengan memberikan jadwal yang tidak bertepatan dengan jadwal ibadah mereka. Artinya tidak ada yang dirugikan</p> <p>17. Sebenarnya pimpinan, namun juga diserahkan kepada pribadi</p>
--	--	--	--	---

				<p>masing-masing juga. Agar kerja tim berhasil sesuai tujuan.</p> <p>18. Kembali kepada diri sendiri, ketika kita tidak dapat menghargai orang lain, maka tidak akan mampu menghargai hal lainnya. Maka dari itu saling menghargai itulah yang benar-benar mendukung tercapainya implementasi toleransi beragama. Perbedaan harus dijadikan persamaan yang indah, dalam mencapai suatu tujuan bersama.</p>
4	Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Proses Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Faktor penghambat Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan</li> </ul>	<p>19. Bagaimana respon masyarakat dilembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan nilai toleransi beragama?</p> <p>20. Proses apa saja yang dijadikan persiapan dalam pengimplementasian toleransi beragama tersebut?</p> <p>21. konsep apa yang dilaksanakan dalam implementasi tersebut?</p> <p>22. Adakah kaitan konsep implementasi terhadap pimpinan lembaga? Dalam hal ini jika terjadi penggantian pejabat berwenang?</p> <p>23. Adakah unsur lain yang dinilai subjektif dalam proses implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu?</p> <p>24. Dalam proses yang telah berlangsung saat ini, adakah menuai respon diluar yang diharapkan?</p>	

		<p>Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor Pendukung Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Keberhasilan dan manfaat yang dicapai dalam upaya Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> </ul>	<p>25. proses yang terlaksana apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku?</p> <p>26. Adakah keterlibatan seluruh masyarakat lembaga dalam hal penyusunan SOP implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu?</p> <p>27. Metode apa yang diterapkan dalam pelaksanaan proses implementasi tersebut?</p> <p>28. Apa saja faktor penghambat dan apa solusi dalam mengatasinya?</p> <p>29. Apa saja faktor pendukung dan upaya apa yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu?</p> <p>30. Apa saja keberhasilan yang diraih oleh lembaga dalam pengimplementasian tersebut?</p> <p>31. Apa manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama tersebut?</p> <p>32. Apa kritik terhadap pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ?</p> <p>33. Apa saran terhadap pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ?</p> <p>34. Apakah pernah dilakukan evaluasi secara berkala baik SOP maupun proses</p>	
--	--	---	--	--

			pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu?	
--	--	--	---	--



## HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Hisbah Varina (X<sub>4</sub>)

Jabatan :

No	Uraian	Indikator	Butir Pertanyaan	Jawaban
1	Implementasi nilai toleransi beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan umum</li> <li>• Kebijakan khusus</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah terdapat kebijakan berkaitan dengan implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</li> <li>2. Apa bentuk kebijakan tersebut?</li> <li>3. Apa dasar kebijakan tersebut dikeluarkan?</li> <li>4. Bagaimana implementasi tersebut di lingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</li> </ol>	
2	Implementasi Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Apakah ada perencanaan terkait implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</li> <li>6. Dalam bentuk apa perencanaan tersebut dilaksanakan?</li> <li>7. Bagaimana pelaksanaan nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</li> <li>8. Apa saja faktor pendukung</li> </ol>	

			implementasi nilai toleransi beragama? 9. Apakah ada evaluasi dari pelaksanaan implementasi nilai tersebut? 10. Bagaimana tindak lanjut dari evaluasi?	
3	Toleransi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghormati perbedaan agama</li> <li>• Tidak membedakan sikap kepada yang berlainan agama</li> <li>• Menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya</li> </ul>	<p>11. Bagaimana menghormati perbedaan agama di lingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</p> <p>12. Bagaimana tanggapan terkait dengan perbedaan agama yang ada?</p> <p>13. Apakah ada pihak-pihak yang tidak mendukung kegiatan menghormati kegiatan agama?</p> <p>14. Apakah pernah terjadi kegiatan yang melanggar toleransi berupa menghormati perbedaan agama tersebut?</p> <p>15. Bagaimana implementasi dari sikap tidak membedakan agama di lingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</p> <p>16. Bagaimana bentuk implementasi dari kegiatan-kegiatan umum yang berkaitan dengan tidak membedakan sikap dan perilaku kepada yang beragama lain?</p> <p>17. Siapa yang paling terlibat dalam menentukan kebijakan?</p> <p>18. Apakah faktor pendukung dalam menghormati perbedaan agama, tidak membedakan sikap kepada teman yang beragama lain dan melakukan menghormati kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan?</p>	<p>11. Saya ketahui ada beberapa perbedaan keyakinan di lingkungan Bappeda ini, saling menghormatinya itu dalam membentuk tidak boleh membedakan perbedaan agama masing-masing individu. Perlakuan harus adil saja apapun agamanya.</p> <p>12. Positif dan saling mendukung. Yakini saja keiimaan masing-masing.</p> <p>13. Tidak ada mendukung, karena makhluk social serta bangsa Indonesia ini penuh dengan keberagaman yang menjadi ciri khas yang harus kita banggakan. Artinya melalui alas an tersebut kita sudah terbiasa dengan saling menghargai satu sama lainnya.</p> <p>14. Tidak ada, satu tahun ini belum pernah terjadi</p> <p>15. Saling menghargai, tidak membeda-bedakan kepercayaan, tidak saling mencampur adukkan keyakinan, solidaritas antar umat beragama</p> <p>16. Seperti hari raya idul adha, tidak ada sikap yang menunjukkan yang acuh terhadap agama lain.</p>

				<p>Begitupun hak mereka atas daging kurban nanti akan itu dilibatkan mendapatkan daging dan lain sebagainya</p> <p>17. Pimpinan</p> <p>18. Saling menghargai, tidak membedakan sikap kepada teman-teman yang beragama lain dalam kegiatan umum di Bappeda</p>
4	Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Proses Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Faktor penghambat Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Faktor Pendukung Implementasi nilai</li> </ul>	<p>19. Bagaimana respon masyarakat dilembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan nilai toleransi beragama?</p> <p>20. Proses apa saja yang dijadikan persiapan dalam pengimplementasian toleransi beragama tersebut?</p> <p>21. konsep apa yang dilaksanakan dalam implementasi tersebut?</p> <p>22. Adakah kaitan konsep implementasi terhadap pimpinan lembaga? Dalam hal ini jika terjadi penggantian pejabat berwenang?</p> <p>23. Adakah unsur lain yang dinilai subjektif dalam proses implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu?</p> <p>24. Dalam proses yang telah berlangsung saat ini, adakah menuai respon diluar yang diharapkan?</p> <p>25. proses yang terlaksana apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku?</p> <p>26. Adakah keterlibatan seluruh masyarakat lembaga dalam hal penyusunan SOP</p>	

		<p>toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberhasilan dan manfaat yang dicapai dalam upaya Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> </ul>	<p>implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu?</p> <p>27. Metode apa yang diterapkan dalam pelaksanaan proses implementasi tersebut?</p> <p>28. Apa saja faktor penghambat dan apa solusi dalam mengatasinya?</p> <p>29. Apa saja faktor pendukung dan upaya apa yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu?</p> <p>30. Apa saja keberhasilan yang diraih oleh lembaga dalam pengimplementasian tersebut?</p> <p>31. Apa manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama tersebut?</p> <p>32. Apa kritik terhadap pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ?</p> <p>33. Apa saran terhadap pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ?</p> <p>34. Apakah pernah dilakukan evaluasi secara berkala baik SOP maupun proses pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu?</p>	
--	--	---	---	--

## HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Sonitra, SE (X<sub>3</sub>)  
 Jabatan :

No	Uraian	Indikator	Butir Pertanyaan	Jawaban
1	Implementasi nilai toleransi beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan umum</li> <li>• Kebijakan khusus</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah terdapat kebijakan berkaitan dengan implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</li> <li>2. Apa bentuk kebijakan tersebut?</li> <li>3. Apa dasar kebijakan tersebut dikeluarkan?</li> <li>4. Bagaimana implementasi tersebut di lingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</li> </ol>	
2	Implementasi Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Apakah ada perencanaan terkait implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</li> <li>6. Dalam bentuk apa perencanaan tersebut dilaksanakan?</li> <li>7. Bagaimana pelaksanaan nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</li> </ol>	

			<p>8. Apa saja faktor pendukung implementasi nilai toleransi beragama?</p> <p>9. Apakah ada evaluasi dari pelaksanaan implementasi nilai tersebut?</p> <p>10. Bagaimana tindak lanjut dari evaluasi?</p>	
3	Toleransi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghormati perbedaan agama</li> <li>• Tidak membedakan sikap kepada yang berlainan agama</li> <li>• Menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya</li> </ul>	<p>11. Bagaimana menghormati perbedaan agama dilingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</p> <p>12. Bagaimana tanggapan terkait dengan perbedaan agama yang ada?</p> <p>13. Apakah ada pihak-pihak yang tidak mendukung kegiatan menghormati kegiatan agama?</p> <p>14. Apakah pernah terjadi kegiatan yang melanggar toleransi berupa menghormati perbedaan agama tersebut?</p> <p>15. Bagaimana implementasi dari sikap tidak membedakan agama dilingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</p> <p>16. Bagaimana bentuk implementasi dari kegiatan-kegiatan umum yang berkaitan dengan tidak membedakan sikap dan perilaku kepada yang beragama lain?</p> <p>17. Siapa yang paling terlibat dalam menentukan kebijakan?</p> <p>18. Apakah faktor pendukung dalam menghormati perbedaan agama, tidak membedakan sikap kepada teman yang beragama lain dan melakukan menghormati kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan?</p>	<p>11. Tidak memaksakan ajaran agama masing-masing kepada individu lain yang berlainan agama dengan kita</p> <p>12. Biasa saja, karena itu hak mereka</p> <p>13. Tidak ada</p> <p>14. Tidak ada</p> <p>15. Misalnya ketika awal tahun atau akhir tahun umat agama non muslim meminta izin cuti oleh pimpinan diberikan, itu merupakan salah satu contohnya</p> <p>16. Tidak ada diskriminasi antar umat beragama. Di Bappeda ini diperlakukan sesuai dengan tupoksi bidangnya masing-masing</p> <p>17. Pimpinan</p> <p>18. Akhlak, toleransi dari pendidikan dasar dan agama</p> <p>19.</p>

4	Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Proses Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Faktor penghambat Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Faktor Pendukung Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Keberhasilan dan manfaat yang dicapai dalam upaya Implementasi nilai</li> </ul>	<p>20. Bagaimana respon masyarakat dilembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan nilai toleransi beragama?</p> <p>21. Proses apa saja yang dijadikan persiapan dalam pengimplementasian toleransi beragama tersebut?</p> <p>22. konsep apa yang dilaksanakan dalam implementasi tersebut?</p> <p>23. Adakah kaitan konsep implementasi terhadap pimpinan lembaga? Dalam hal ini jika terjadi penggantian pejabat berwenang?</p> <p>24. Adakah unsur lain yang dinilai subjektif dalam proses implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu?</p> <p>25. Dalam proses yang telah berlangsung saat ini, adakah menuai respon diluar yang diharapkan?</p> <p>26. proses yang terlaksana apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku?</p> <p>27. Adakah keterlibatan seluruh masyarakat lembaga dalam hal penyusunan SOP implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu?</p> <p>28. Metode apa yang diterapkan dalam pelaksanaan proses implementasi tersebut?</p> <p>29. Apa saja faktor penghambat dan apa solusi dalam mengatasinya?</p> <p>30. Apa saja faktor pendukung dan upaya apa yang dilakukan dalam memperbaiki</p>	<p>19.</p> <p>20. Responnya baik tidak ada yang menolak</p> <p>21. Tidak ada prosesnya, karena berjalan alamiah</p> <p>22. Toleransi</p> <p>23. Tidak ada</p> <p>24. Ada, pemahaman terhadap agama masing-masing. Missal ada orang yang radikal, maka dia tidak toleransi,</p> <p>25. Tidak ada</p> <p>26. Tidak ada SOP</p> <p>27. Tidak ada</p> <p>28. Pendekatan personalitas</p> <p>29. Tidak ada sejauh ini</p> <p>30. Sudah terbiasa di Negara Indonesia dan masyarakat social</p> <p>31. Belum pernah dievaluasi</p> <p>32.</p>
---	--	---	--	--

		<p>toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</p>	<p>pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu?</p> <p>31. Apa saja keberhasilan yang diraih oleh lembaga dalam pengimplementasian tersebut?</p> <p>32. Apa manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama tersebut?</p> <p>33. Apa kritik terhadap pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ?</p> <p>34. Apa saran terhadap pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ?</p> <p>35. Apakah pernah dilakukan evaluasi secara berkala baik SOP maupun proses pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu?</p>	
--	--	--	---	--



## HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ronggi (non Muslim) (X<sub>5</sub>)

Jabatan :

No	Uraian	Indikator	Butir Pertanyaan	Jabatan
1	Implementasi nilai toleransi beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan umum</li> <li>• Kebijakan khusus</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah terdapat kebijakan berkaitan dengan implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</li> <li>2. Apa bentuk kebijakan tersebut?</li> <li>3. Apa dasar kebijakan tersebut dikeluarkan?</li> <li>4. Bagaimana implementasi tersebut di lingkungan bappeda provinsi Bengkulu?</li> </ol>	
2	Implementasi Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Apakah ada perencanaan terkait implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</li> <li>6. Dalam bentuk apa perencanaan tersebut dilaksanakan?</li> <li>7. Bagaimana pelaksanaan nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah provinsi begkulu?</li> <li>8. Apa saja faktor pendukung</li> </ol>	

			implementasi nilai toleransi beragama? 9. Apakah ada evaluasi dari pelaksanaan implementasi nilai tersebut? 10. Bagaimana tindak lanjut dari evaluasi?	
3	Toleransi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghormati perbedaan agama</li> <li>• Tidak membedakan sikap kepada yang berlainan agama</li> <li>• Menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya</li> </ul>	11. Bagaimana menghormati perbedaan agama dilingkungan bappeda provinsi Bengkulu? 12. Bagaimana tanggapan terkait dengan perbedaan agama yang ada? 13. Apakah ada pihak-pihak yang tidak mendukung kegiatan menghormati kegiatan agama? 14. Apakah pernah terjadi kegiatan yang melanggar toleransi berupa menghormati perbedaan agama tersebut? 15. Bagaimana implementasi dari sikap tidak membedakan agama dilingkungan bappeda provinsi Bengkulu? 16. Bagaimana bentuk implementasi dari kegiatan-kegiatan umum yang berkaitan dengan tidak membedakan sikap dan perilaku kepada yang beragama lain? 17. Siapa yang paling terlibat dalam menentukan kebijakan? 18. Apakah faktor pendukung dalam menghormati perbedaan agama, tidak membedakan sikap kepada teman yang beragama lain dan melakukan menghormati kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan?	11. Tidak terlalu dibahas secara mendalam dalam kehidupan sehari 12. Biasa saja, karena masalah agama itu HAM bagi setiap individu 13. Tidak ada 14. Tidak pernah, kami biasanya bertanya atau izin. Missal ketika rapat pada bulan puasa, saya Tanya boleh atau tidak merokok disini, seperti itu prosesnya 15. Saat ada pekerjaan berkelompok sama-sama dikerjakan tidak ada potensi perselisihan berkaitan dengan agama walaupun dalam tim ada anggota yang berbeda agama 16. Misalnya bulan puasa, menjalankan keyakinannya sesuai dengan yang dianutnya, saling menghormati saja 17. Pimpinan 18. Saling menghormati, menghargai dan kewajiban melaksanakan tupoksi
4	Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman nilai</li> </ul>	19. Bagaimana respon masyarakat	19. Baik

	<p>nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</p>	<p>toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Faktor penghambat Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Faktor Pendukung Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</li> <li>• Keberhasilan dan manfaat yang dicapai dalam upaya Implementasi nilai toleransi beragama</li> </ul>	<p>dilembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan nilai toleransi beragama?</p> <p>20. Proses apa saja yang dijadikan persiapan dalam pengimplementasian toleransi beragama tersebut?</p> <p>21. konsep apa yang dilaksanakan dalam implementasi tersebut?</p> <p>22. Adakah kaitan konsep implementasi terhadap pimpinan lembaga? Dalam hal ini jika terjadi penggantian pejabat berwenang?</p> <p>23. Adakah unsur lain yang dinilai subjektif dalam proses implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu?</p> <p>24. Dalam proses yang telah berlangsung saat ini, adakah menuai respon diluar yang diharapkan?</p> <p>25. proses yang terlaksana apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku?</p> <p>26. Adakah keterlibatan seluruh masyarakat lembaga dalam hal penyusunan SOP implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Bengkulu?</p> <p>27. Metode apa yang diterapkan dalam pelaksanaan proses implementasi tersebut?</p> <p>28. Apa saja faktor penghambat dan apa solusi dalam mengatasinya?</p> <p>29. Apa saja faktor pendukung dan upaya apa yang dilakukan dalam memperbaiki pelaksanaan implementasi nilai</p>	<p>20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Kenyamanan, rasa bebas, rasa aman, tidak tertekan, tidak merasakan sakit hati karena diskriminasi dan rasis 32. Tidak ada, karena sejauh ini tidak ada masalah 33. Dijalankan dan dipertahankan apa yang sudah terjadi</p>
--	--	--	---	---

		<p>di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu</p>	<p>toleransi beragama dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu?</p> <p>30. Apa saja keberhasilan yang diraih oleh lembaga dalam pengimplementasian tersebut?</p> <p>31. Apa manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama tersebut?</p> <p>32. Apa kritik terhadap pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ?</p> <p>33. Apa saran terhadap pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu ?</p> <p>34. Apakah pernah dilakukan evaluasi secara berkala baik SOP maupun proses pelaksanaan Implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu?</p>	
--	--	---	--	--

## REKAP HASIL ANGGKET TOLERANSI BERAGAMA

No	SAMPSEL	BUTIR ANGGKET																				Rata-Rata	Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Responden 1	2	5	5	1	5	2	5	1	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	3	4,1	Aktif	
2	Responden 2	3	4	5	2	4	2	3	1	3	2	5	5	4	1	3	1	5	3	4	5	3,3	Aktif
3	Responden 3	3	5	5	3	5	2	3	1	5	5	5	5	5	5	4	4	5	3	3	5	4,1	Aktif
4	Responden 4	3	5	5	1	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,3	Aktif
5	Responden 5	3	4	3	2	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4,0	Aktif
6	Responden 6	5	4	5	4	3	5	4	1	5	3	5	4	3	2	5	3	2	5	4	5	3,9	Aktif
7	Responden 7	2	4	5	1	3	1	4	1	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	4	3,8	Aktif
8	Responden 8	2	4	5	1	4	1	4	1	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	4,0	Aktif
9	Responden 9	1	4	4	1	2	3	1	2	4	4	4	4	2	1	1	1	2	3	2	2	2,4	Pasif
10	Responden 10	5	4	5	5	4	3	4	3	4	5	4	5	5	4	4	3	5	5	3	4	4,2	Aktif
11	Responden 11	3	4	3	4	3	2	1	1	3	4	3	3	2	3	3	2	2	3	1	5	2,8	Pasif
12	Responden 12	4	4	5	3	4	3	3	2	5	5	5	5	5	4	4	3	5	4	4	5	4,1	Aktif
13	Responden 13	4	4	4	4	5	2	5	1	5	5	5	5	4	5	5	1	5	4	3	5	4,1	Aktif
14	Responden 14	3	4	5	1	5	3	3	1	5	5	5	5	5	5	5	1	5	3	3	4	3,8	Aktif
15	Responden 15	3	4	5	1	5	2	3	1	5	5	5	5	5	5	3	1	5	2	5	5	3,8	Aktif
16	Responden 16	1	2	4	5	1	1	1	1	4	3	4	3	1	2	1	1	3	1	1	3	2,2	Pasif
17	Responden 17	3	3	5	1	3	2	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	3,8	Aktif
18	Responden 18	2	4	4	1	4	2	1	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3,7	Aktif

19	Responden 19	4	4	4	4	5	2	5	1	5	5	5	5	5	4	4	5	2	5	4	5	5	4,2	Aktif
20	Responden 20	1	2	4	2	4	2	1	1	5	5	5	5	5	2	1	1	3	1	2	3	2,8	Pasif	
21	Responden 21	2	5	5	1	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4,1	Aktif
22	Responden 22	4	4	4	1	4	2	4	1	5	5	4	4	1	2	4	1	4	3	5	5	3,4	Aktif	
23	Responden 23	5	4	5	5	4	3	4	3	4	5	4	5	5	4	4	3	5	5	3	4	4,2	Aktif	

Kesimpulan :

- Kategori toleransi aktif jika rata-rata skor butir angket  $>$  angka konstanta yang ditentukan yakni 2,5
- Kategori toleransi pasif jika rata-rata skor butir angket  $<$  angka konstanta yang ditentukan yakni 2,5

Kategori	Jumlah	Persentase
Toleransi Aktif	19	83%
Toleransi Pasif	4	13%
Kesimpulan : Toleransi Aktif		

**REKAP HASIL ANGGKET TOLERANSI BERAGAMA**

No	SAMPSEL	BUTIR ANGGKET																			Rata-Rata	Dummy	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20
1	Responden 1	2	5	5	1	5	2	5	1	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	3	4,1	0	
2	Responden 2	3	4	5	2	4	2	3	1	3	2	5	5	4	1	3	1	5	3	4	5	3,3	0
3	Responden 3	3	5	5	3	5	2	3	1	5	5	5	5	5	4	4	5	3	3	5	4,1	0	
4	Responden 4	3	5	5	1	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,3	0	
5	Responden 5	3	4	3	2	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4,0	0	
6	Responden 6	5	4	5	4	3	5	4	1	5	3	5	4	3	2	5	3	2	5	4	5	3,9	0
7	Responden 7	2	4	5	1	3	1	4	1	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	4	3,8	0	
8	Responden 8	2	4	5	1	4	1	4	1	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	4,0	0	
9	Responden 9	1	4	4	1	2	3	1	2	4	4	4	4	2	1	1	1	2	3	2	2	2,4	0
10	Responden 10	5	4	5	5	4	3	4	3	4	5	4	5	5	4	4	3	5	5	3	4	4,2	0
11	Responden 11	3	4	3	4	3	2	1	1	3	4	3	3	2	3	3	2	2	3	1	5	2,8	0
12	Responden 12	4	4	5	3	4	3	3	2	5	5	5	5	5	4	4	3	5	4	4	5	4,1	0
13	Responden 13	4	4	4	4	5	2	5	1	5	5	5	5	4	5	5	1	5	4	3	5	4,1	0
14	Responden 14	3	4	5	1	5	3	3	1	5	5	5	5	5	5	1	5	3	3	4	3,8	0	
15	Responden 15	3	4	5	1	5	2	3	1	5	5	5	5	5	5	3	1	5	2	5	5	3,8	0
16	Responden 16	1	2	4	5	1	1	1	1	4	3	4	3	1	2	1	1	3	1	1	3	2,2	0
17	Responden 17	3	3	5	1	3	2	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	3,8	0	
18	Responden 18	2	4	4	1	4	2	1	1	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3,7	0	
19	Responden 19	4	4	4	4	5	2	5	1	5	5	5	5	4	4	5	2	5	4	5	5	4,2	0
20	Responden 20	1	2	4	2	4	2	1	1	5	5	5	5	5	2	1	1	3	1	2	3	2,8	0
21	Responden 21	2	5	5	1	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4,1	0	
22	Responden 22	4	4	4	1	4	2	4	1	5	5	4	4	1	2	4	1	4	3	5	5	3,4	0
23	Responden 23	5	4	5	5	4	3	4	3	4	5	4	5	5	4	4	3	5	5	3	4	4,2	0

**UJI NORMALITAS  
DATA ANGKET**

No	data	frekuensi	f Kom	S(x)	Z (Score)	F (x)	[IF (Z)- S (Z) I]
1	2,3	1	1	0,043478	-1,47	0,07	0,027247739
2	3,3	1	2	0,086957	-0,12	0,45	0,064088332
3	4,1	1	3	0,130435	0,95	0,83	0,099747228
4	2,2	1	4	0,173913	-1,61	0,05	0,119681951
5	4	1	5	0,217391	0,82	0,79	0,176542373
6	3,9	1	6	0,26087	0,69	0,75	0,19258721
7	3,8	1	7	0,304348	0,55	0,71	0,04722127
8	4	1	8	0,347826	0,82	0,79	0,046107591
9	2,4	1	9	0,391304	-1,34	0,09	0,100475281
10	4,2	1	10	0,434783	1,09	0,86	0,127277789
11	2,8	1	11	0,478261	-0,80	0,21	0,205452196
12	4,1	1	12	0,521739	0,95	0,83	0,10844288
13	4,1	1	13	0,565217	0,95	0,83	0,204964619
14	3,8	1	14	0,608696	0,55	0,71	0,100374301
15	3,8	1	15	0,652174	0,55	0,71	0,05689604
16	2,2	1	16	0,695652	-1,61	0,05	0,041421082
17	3,8	1	17	0,73913	0,55	0,71	0,030060482
18	3,7	1	18	0,782609	0,42	0,66	0,121338798
19	3	1	19	0,826087	-0,53	0,30	0,127072441
20	2,8	1	20	0,869565	-0,80	0,21	0,056756543
21	2,1	1	21	0,913043	-1,74	0,04	0,072103612



22	3,4	1	22	0,956522	0,01	0,50	0,051847688
23	4,2	1	23	1	1,09	0,86	0,137939603

### Simpulan

Rata-rata	3,391304
Simpang Baku	0,742179
Nilai Maksimal	0,205452196
L hitung	0,205452196
L tabel	0,275
St dev	0,742179
Ho : Sampel berdistribusi normal	
Ha : Sampel berdistribusi tidak normal	
Kesimpulan :	
Ho diterima jika nilai $D < K_s$	
<b>Data Normal</b>	

### PERHITUNGAN

#### UJI t One Sampel dengan Nilai Konstanta Pembanding 2,5

t-Test: Paired Two Sample for Means

	<i>4,1</i>	<i>0</i>
Mean	3,652272727	0
Variance	0,379637446	0
Observations	22	22

Pearson Correlation	#DIV/0!	
Hypothesized Mean Difference	4	
Df	21	
t Stat	-2,647070897	
P(T<=t) one-tail	0,007537017	
t Critical one-tail	1,720742903	
P(T<=t) two-tail	0,015074034	
t Critical two-tail	2,079613845	
Kesimpulan		
Ho diterima jika $t_{hitung} < t_{table}$		
Kesimpulan :		
$t_{hitung} < t_{table}$ , yakni		
$-2,647070897 < 2,06866$		
<b><i>Artinya, Implementasi Nilai Toleransi Beragama Pada Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu Bersifat Toleransi Positif</i></b>		

## KISI-KISI ANGKET

## TOLERANSI BERAGAMA

ASPEK	INDIKATOR	DESKRIPSI	ITEM	JML
Terbuka antar pemeluk beragama dan aliran kepercayaan dalam bersosialisasi	a. Memahami realita perbedaan konsep iman dan ibadah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui konsep iman dan ibadah secara umum dalam beragama dan aliran kepercayaan.</li> <li>Memaknai perbedaan konsep iman dan ibadah masing-masing pemeluk agama dan aliran kepercayaan.</li> </ul>	1,2 3,4	4
	b. Menerima realita perbedaan konsep iman dan ibadah masing-masing agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengambil hikmah perbedaan konsep iman dan ibadah dalam beragama.</li> <li>Menghargai perbedaan konsep iman dan ibadah masing-masing pemeluk agama dan aliran kepercayaan</li> </ul>	5,6 7,8	4
Merdeka dalam mengamalkan agama	a. Memberikan kesempatan beribadah disetiap waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kesempatan beribadah (shalat/ berdo'a/nyanyian agama/yoga/sembahyang, dsb) disetiap waktu sesuai konsep keimanan dan ibadah masing-masing pemeluk agama dan aliran kepercayaan</li> </ul>	10,11	2
	b. Mempersilahkan pemeluk agama dan aliran kepercayaan beribadah di tempat ibadah masing-masing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempersilahkan/membiarkan pemeluk agama dan aliran kepercayaan beribadah ditempat/ rumah ibadah pemeluk agama dan aliran kepercayaan masing-masing</li> </ul>	12	1
Hormat ketika beribadah menurut keimanan beragama	a. Merawat symbol simbol agama dan aliran kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merawat dan menjaga simbol-simbol agama dan aliran kepercayaan</li> </ul>	13, 14	2
	b. Bertenggang rasa dalam memperingati hari besar keagamaan pemeluk agama dan aliran kepercayaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga perasaan pemeluk agama dan aliran kepercayaan dalam merayakan hari besar keagamaan dan aliran kepercayaan.</li> </ul>	15, 16, 17	3
	c. Memberikan suport pemeluk agama dan aliran Kepercayaan mengembangkan keimanan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan dorongan atau motivasi bagi pemeluk agama dan aliran kepercayaan dalam mengembangkan</li> </ul>	18	1

	ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa			
	d. Mengapresiasi kepada pemeluk agama dan aliran kepercayaan melakukan perbuatan kebajikan dan kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberi ucapan selamat, materi atau penghargaan lainnya dalam melakukan kebajikan dan kemanusiaan.</li> </ul>	19	1
Interaksi positif lintas agama	Bekerjasama dan atau tolong menolong dalam mencerdaskan kehidupan bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyepakati, saling mensupport atau membentuk tim bersama dalam mencerdaskan kehidupan bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, politik, sosial, budaya, pariwisata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</li> </ul>	20	1

**Catatan :**

**Tabel Pedoman Penskoran Signifikansi dari Kategori**

Skala Penilaian	Kategori
Selalu (SL) = 5 Sering (SR) = 4	Toleransi Aktif
Kadang- kadang (KD) = 3 Jarang(JR) =2 tidak Pernah (TP) = 1	Toleransi Pasif

## ANGKET

### TOLERANSI BERAGAMA

#### A. Pengantar

Angket ini merupakan alat pengumpulan data dan atau keterangan dari ananda yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi toleransi beragama dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Angket ini telah disusun dan di nilai oleh tim ahli layak di gunakan untuk mengetahui kondisi toleransi beragama dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Untuk itu diharapkan memberikan respon melalui pilihan jawaban yang tersedia dengan jujur sesuai dengan keadaan diri anda apa adanya. Pilihan jawaban yang sampaikan tidak mempenaruhi nilai dan atau kualitas dan menjamin kerahasiannya. Atas perhatian dan kesediaan anda diucapkan terima kasih.

.....2021

**Tim Peneliti**

**B. Identitas**

Nama/ NIM : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Agama : ..... Jabatan` : .....  
 : ..... Tanggal Pengisian :  
 .....

**C. Petunjuk Pengisian**

Pada lembaran berikut dikemukakan sejumlah pernyataan yang menyangkut tentang diri anda. Anda diharapkan memilih jawaban yang sesuai kondisi dan pengalaman toleransi beragama dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu kolom yang tersedia. Masing-masing pernyataan disediakan lima pilihan jawaban, yaitu Selalu (SL) = 5, Sering (SR) = 4, Kadang- kadang (KD) = 3, Jarang(JR) =2 dan tidak Pernah (TP) = 1. Jika isi pernyataan sesuai dengan kondisi diri berkisar 81-100%, maka pilih jawaban **Selalu (SL)**. Jika isi pernyataan sesuai dengan kondisi diri berkisar 61-80%, maka pilih jawaban **Sering (SR)**. Jika isi pernyataan sesuai dengan kondisi diri berkisar 41-60%, maka pilih jawaban **Kadang-kadang (KD)**. Jika isi pernyataan sesuai dengan kondisi diri berkisar 21-40%, maka pilih jawaban **Jarang (JR)**. Jika isi pernyataan sesuai dengan kondisi diri berkisar 1, maka pilih jawaban **Tidak Pernah (TP)**.

Contoh Soal:

No	PERNYATAAN	Alternait Jawaban				
		Selalu (SL)	Sering (SR)	Kadang -kadang	Jarang (JR)	Tidak Pernah (TP)
1	Saya enggan mengucapkan selamat kepada teman yang berbeda agama yang sedang merayakan hari besar keagamaan mereka		X			

Jawaban :

Pada contoh di atas, isi pernyataan *“Saya enggan mengucapkan selamat kepada teman yang berbeda agama yang sedang merayakan hari besar keagamaan mereka”* isi pernyataan sesuai dengan kondisi diri anda berkisar 61-80%, maka anda pilih jawaban Sering (SR).

**\*Selamat Mengerjakan dan Semoga Memperoleh Berkah**

No	Pernyataan	Alternait Jawaban				
		Selalu (SL)	Sering (SR)	Kadang -kadang	Jarang (JR)	Tidak Pernah
1	Saya berupaya mencari tahu agama dan aliran kepercayaan yang diakui oleh Negara					
2	Saya bahagia memiliki teman yang berbeda agama					
3	Saya senang mengawali acara atau kegiatan berdoa menurut kepercayaan masing-masing					
4	Saya enggan berdoa bersama diwakili oleh agama orang lain					
5	Saya merasa nyaman bekerjasama dengan teman yang berbeda agama					
6	Saya senang berdiskusi tentang konflik atas nama					
7	Saya tidak merasa terganggu ketika saya mendengar bunyi simbol agama orang lain					
8	Menurut saya agama tertentu yang menyebabkan					
9	Saya mengizinkan teman beribadah dikantor ketika jam kerja					
10	Ketika rapat sedang berlangsung, saya memberikan izin ibadah kepada teman yang berbeda agama dengan					
11	Saya siap membantu ketika teman berbeda agama dengan saya membutuhkan bantuan					
12	Saya mempersilahkan teman yang berbeda agama yang hendak beribadah ketika waktu istirahat di tempat ibadahnya					
13	Saya menghormati symbol-simbol agama yang terpampang dikantor atau ruang kerja atau meja kerja teman yang berbeda agama dengan saya					
14	Saya mempersilahkan kepada teman-teman yang berbeda agama memakai aksesoris agamanya					
15	Ketika teman berbeda agama dengan saya merayakan hari besar keagamaannya dikantor saya turut bersimpat					
16	Saya mengikuti dan berpartisipasi meramaikan kegiatan agama yang diadakan dikantor meskipun berbeda keyakinan dengan saya					

17	Saya ikut menjaga ketertiban dalam rangka memperingati kegiatan keagamaan tertentu dikantor meskipun berbeda keyakinan dengan saya					
18	Saya senang menyampaikan pujian kepada teman yang berbeda agama aktif menjalankan ibadah keagamaan mereka					
19	Saya ikhlas mengucapkan selamat kepada teman yang berbeda agama yang sedang merayakan hari besar keagamaan mereka					
20	Saya ikut berpartisipasi dalam sumbangan atau donasi korban bencana atau korban perang meskipun berbeda agama					





Gambar 1: Peneliti Wawancara dengan Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu



Gambar 2: Peneliti Wawancara dengan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bengkulu



Gambar 3: Peneliti Wawancara dengan Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu



Gambar 4: Peneliti Wawancara dengan Kasubid Pemerintahan dan Politik Bappeda Provinsi Bengkulu



Gambar 5: Peneliti Wawancara dengan Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu



Gambar 6: Peneliti Wawancara dengan Kasubbag Umum Bappeda Provinsi Bengkulu



Gambar 7: Peneliti Wawancara dengan Pegawai Non Muslim Bappeda Provinsi Bengkulu



Gambar 8: Peneliti Wawancara dengan Pegawai Non Muslim Bappeda Provinsi Bengkulu



Gambar 9: Peneliti Wawancara dengan Pegawai Non Muslim Bappeda Provinsi Bengkulu



Gambar 10: Peneliti Wawancara dengan Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Bengkulu



ambar 11: Peneliti Wawancara dengan Honorer Bappeda Provinsi Bengkulu



Gambar 12: Peneliti Wawancara dengan Honorer Bappeda Provinsi Bengkulu